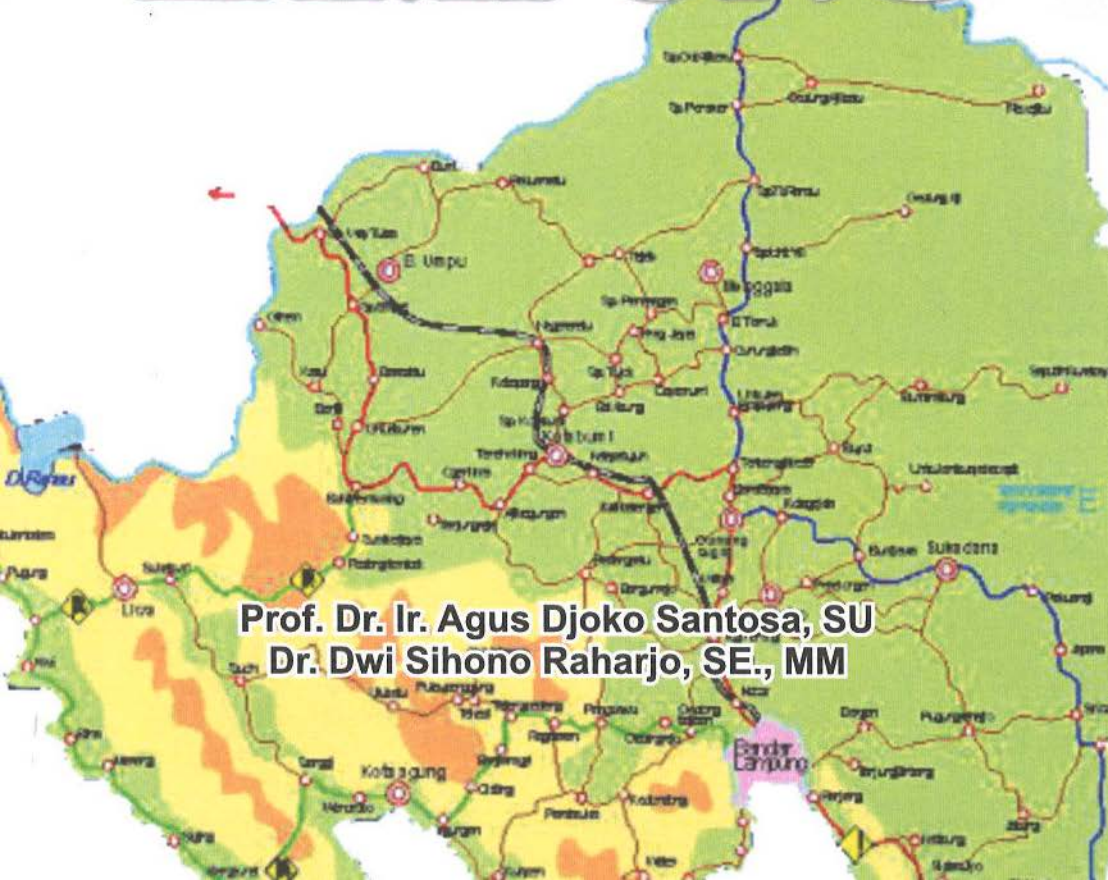


AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMPUNG



Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Santosa, SU
Dr. Dwi Sihono Raharjo, SE., MM

AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMPUNG

Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Santosa, SU

Dr. Dwi Sihono Raharjo, SE., MM



AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMPUNG

© Penerbit Kepel Press

Penulis :

Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Santosa, SU
Dr. Dwi Sihono Raharjo, SE., MM

Desain Sampul :
Winengku Nugroho

Desain Isi :
Safitriyani

Cetakan Kedua, Januari 2015

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp/faks : 0274-884500
Hp : 081 227 10912
email : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-341-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Perkembangan transmigrasi di Indonesia sebagai langkah strategis dalam penyeimbangan kepadatan penduduk di Indonesia diakui telah banyak mengubah wajah pembangunan di Indonesia. Kompetensi Transmigrasi dan *stakeholder* maupun pelaku, menjadi basis yang sangat signifikan dalam pembangunan wilayah berbasis pada kearifan lokal.

Wilayah Pengembangan Transmigrasi menjadi salah satu *trigger* bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. Hal ini dapat diindikasikan dari unit pemukiman transmigrasi sebagai unit analisisnya. Pemikiran untuk menjadikan WPP menjadi *centre of growth* dalam jangka panjang akan menjadi simpul utama rantai pemasaran komoditas yang diproduksi di wilayah transmigrasi pada tingkat unit pemukiman.

Kota Terpadu Mandiri, merupakan deskripsi dari perkembangan dan pertumbuhan WPP. Dengan telah dibangunnya lebih dari 44 KTM di seluruh Indonesia, termasuk KTM Mesuji sebagai generasi pertama, di wilayah Lampung. Kiranya perlu kajian evaluatif khususnya evaluasi pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan pada tingkat provinsi. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan indeks komposit, dari beberapa faktor, antara lain faktor pengembangan usaha, kondisi penduduk dan kelembagaan.

Akhir kata diharapkan kajian ini, bermanfaat secara signifikan bagi para *user* dan *stakeholder* pengembangan wilayah yang dirancang dan diimplementasikan secara strategik dan komprehensif.

Yogyakarta, Januari 2015
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Perumusan Masalah	5
1.4. Tujuan dan Sasaran.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.6. Landasan Pemikiran	24
1.7. Metodologi penelitian	29
1.8. Metode Pelaksanaan Pekerjaan.....	54
1.9. Keluaran yang dihasilkan.....	55
1.10. Sistematika Penyajian	55
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN.....	57
2.1 Letak Geografis dan Batas Kawasan.....	57
2.2. Topografi dan Geologi Kawasan KTM Mesuji .	62
2.3. Penggunaan Lahan, Jenis Tanah, dan Kesesuaian lahan.....	63
2.4. Kondisi Sosial ekonomi.....	64

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	67
3.1. Dasar Dukungan Perundangan Pembangunan	67
3.2. Pelaksanaan Perundangan KTM dalam bidang pembangunan daerah	70
3.3. Kondisi yang diharapkan	74
3.4. Indikator evaluasi pusat pertumbuhan KTM....	77
3.5. Analisis pusat Kawasan dan Pusat Pertumbuhan	95
3.6. Sintesis Kelemahan dari indikator pengukur Kawasan dan Pusat Pertumbuhan ...	119
3.7. Sintesis dasar pembagian dinamika kawasan dan pusat pertumbuhan.....	121
3.8. Strategi Pengembangan KTM Mesuji secara umum.....	130
3.9. Faktor Penentu Keberhasilan	140
3.10. Sintesis Kelemahan dari indikator pengukur Kawasan dan Pusat Pertumbuhan ...	141
 BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	 145
4.1. Kesimpulan	145
4.2. Rekomendasi:.....	161
 DAFTAR PUSTAKA.....	 167

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah

Implementasi Undang-Undang No. 32 tahun 2004, mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan ketransmigrasian. Dengan mengacu pada perundangan UU No. 29 tahun 2009 tentang ketransmigrasian, tujuan pembangunan kawasan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, kondisi ini di indikasikan dengan sasaran utama dari pembangunan transmigrasi adalah, pembangunan wilayah, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya.

Aspek dasar UU No. 29 tahun 2009 pasal 1, menyebutkan bahwa elemen dari kawasan transmigrasi yang disebut dengan Wilayah Pembangunan Parsial atau WPT terdiri dari beberapa SKP, di mana dalam satu SKP tersebut akan direncanakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan baru. Di sisi lain LPT mendukung pusat pertumbuhan yang baru dalam bentuk pelaksanaan program Kota Terpadu Mandiri (KTM). transmigrasi sebagai upaya:

- a. meningkatkan transmigran dan warga sekitar dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar serta terbukanya kesempatan pertumbuhan sosial-ekonomi di daerah transmigrasi.
- b. menciptakan sentra-sentra aktifitas bisnis sebagai daya tarik investor, dan berfungsi menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat sekitar.

Bila dikaitkan dengan UU No. 15/1997, KTM merupakan suatu strategi pengembangan kawasan setara Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) di mana disebutkan bahwa pengembangan WPT dimaksudkan untuk menumbuhkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi (PPE) baru. Untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan/KTM di kawasan transmigrasi perlu dilakukan upaya pengembangan dan menumbuhkan dalam konteks nyata untuk pengusaha kesempatan serta peluang kerja, di mana dalam pengembangan serta pertumbuhan KTM, pelaksanaannya diselaraskan dalam integrasi terpadu dengan pembangunan daerah secara keseluruhan, di samping itu dilaksanakan serta didukung oleh sektor-sektor terkait, masyarakat, dan investor.

Konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM) digulirkan pada tahun 2006, saat ini KTM sudah menjadi ikon Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagai suatu ikon pelaksanaan pembangunan KTM merupakan akulturasi, simplifikasi, terhadap paradigma baru pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang mengacu kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan arah kebijakan UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, arah kebijakan di dalam PP No. 34 Tahun 2009 tentang Kawasan Perkotaan Baru dan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Upaya mendorong pertumbuhan serta pengembangan, pada beberapa KTM diberikan masukan/input sebagai dasar pengembangan agribisnis. pada Pusat Pertumbuhan, terutama berupa pembangunan prasarana fisik (jalan dan jembatan) dan sarana untuk kepentingan publik (pusat bisnis, pasar, mesjid dan lainnya) dengan harapan akan merangsang kegiatan ekonomi dan jasa di pusat pertumbuhan KTM serta kegiatan produksi di kawasan KTM.

Perkembangan KTM dari generasi pertama sampai generasi ketiga saat ini tentunya memerlukan evaluasi, sebagai layaknya permukiman transmigrasi pada tingkatan *base service*. Evaluasi

dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria pengembangan usaha, kondisi penduduk, kelembagaan, hubungan antar pusat, dan sarana prasarana. Evaluasi kinerja pengembangan kawasan secara komprehensif, diawali dari sisi input proses, output, outcome, hingga dampak.

Begitu penting pemahaman pertumbuhan dan perkembangan pusat pertumbuhan serta kawasan secara komprehensif khususnya adalah KTM. Pengujian evaluasi dilaksanakan oleh kementerian Transmigrasi pada tahun 2010, dengan mempergunakan instrumen ukur, diperoleh data-data empirik untuk KTM Lunang Silaut, KTM Parit Rambutan, KTM Telang, maupun KTM Lunang Silaut masuk dalam kriteria *basic service*. Pemahaman mengenai evaluasi yang komprehensif dilaksanakan menjadi basis solusi untuk meningkatkan KTM bersangkutan dari kondisi saat ini (*road map*) menjadi minimal pada kondisi mandiri tingkat awal.

Kawasan Mesuji di Provinsi Lampung merupakan salah Kawasan Transmigrasi yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menjadi Kota Terpadu Mandiri, yang diharapkan akan mampu mendorong percepatan laju pembangunan kawasan di Provinsi Lampung. Pemilihan Kawasan Transmigrasi Mesuji direncanakan menjadi Kota Terpadu Mandiri dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdapatnya beberapa desa eks transmigrasi, yang pada saat ini memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi serta kawasan, secara umum di Provinsi Lampung.
2. Jaringan jalan dan kondisi jalan yang *acceptable* untuk menjadi akses ke orde pertumbuhan di atasnya (orde III) di tingkat kecamatan.
3. Kawasan tersebut masuk pada kawasan budidaya non kehutanan (APL) dengan areal yang masih luas sehingga masih berpotensi untuk pembukaan pemukiman transmigrasi yang baru dan pembukaan TSM.

Berdasarkan kriteria tersebut dan diintegrasikan dengan pengembangan masyarakat di kawasan yang partisipatif dan berkesinambungan maka Kawasan Mesuji dimungkinkan secara postulat mampu menjadi pusat pertumbuhan baru sebagai embrio, kawasan perkotaan baru.

KTM Mesuji merupakan generasi pertama dari pembangunan KTM oleh kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, walaupun demikian kondisi eksisting yang masih rendah secara indikator ekonomi (kondisi ekonomi, sosial budaya) yang menjadi dasar serta tolok ukur untuk dilaksanakan upaya mendorong pertumbuhan, sehingga dirasakan perlunya untuk melaksanakan evaluasi pusat pertumbuhan menjadi satu ukuran yang sangat dibutuhkan, khususnya untuk mengetahui kinerja institusi KTM Mesuji sebagai pusat pertumbuhan sekaligus sebagai kutub pertumbuhan bagi pembangunan Kawasan di Provinsi Lampung. Untuk itu Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi khususnya untuk KTM Mesuji pada tahun 2012 perlu menyusun konsep *review* serta Evaluasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria Pengembangan Usaha, Kondisi Penduduk, Kelembagaan, Hubungan Antar Pusat dan Sarana Prasarana. Evaluasi kinerja pengembangan kawasan secara komprehensif, diawali dari sisi proses, *output*, *outcome*, diakhiri dengan proyeksi dampak khususnya untuk peningkatan indikator sosial dalam pengukuran potensi daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Konstelasi pembangunan ketransmigrasian secara implementatif mengacu pada UU 32/2004, dengan mempertimbangkan pola pembangunan ketransmigrasian berbasis pada *community development*. Paradigma pembangunan memperhatikan fenomena yang membawa konsekuensi logis bagi

pelaku pembangunan kawasan atau daerah, yaitu pemerintah selaku fasilitator, masyarakat bukan sebagai subyek dan mitra dalam pembangunan. Mempunyai dampak nyata bagi pendekatan pembangunan. Dengan demikian dinamika pembangunan transmigrasi, menjadi daya ungkit untuk mencari pendekatan yang lebih komprehensif memadukan antara orientasi relasi dalam bentuk ekosistem, yang implementatif antara infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat, yang diindikasikan dalam bentuk pembangunan kota Terpadu Mandiri.

Pembangunan kawasan kota terpadu mandiri secara praktis, menunjang kestabilan ekonomi dan politik daerah, keberadaan KTM dalam konstelasi ekonomi dan politik, menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan yang holistik dan terpadu dari perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Sinergitas pembangunan KTM dengan pemerintah daerah dalam jangka panjang sudah cukup baik secara konseptual, tentunya dalam pelaksanaan dan hasil akhirnya diperlukan evaluasi tingkat keberhasilan, kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya dilaksanakan evaluasi kawasan KTM khususnya KTM Mesuji.

1.3. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang serta permasalahan dan dukungan keberadaan kawasan Kota Terpadu Mandiri khususnya KTM Mesuji terhadap pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Mesuji, dibutuhkan langkah evaluasi kemajuan yang terjadi saat ini khususnya untuk KTM Mesuji konstelasinya untuk perkembangan ekonomi, politik dan sosial budaya di wilayah kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.

1.4. Tujuan dan Sasaran

Evaluasi perkembangan pusat pertumbuhan kawasan KTM Mesuji, dengan *outcome* adalah potensi kinerja kawasan KTM Mesuji, hasil tersebut mampu memberikan dasar untuk melaksanakan percepatan perbaikan dari KTM Mesuji, sehingga metode serta sub indikator yang dipergunakan sebagai alat ukur evaluasi tersebut bermanfaat bagi pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan Kawasan Transmigrasi Mesuji dalam mewujudkan Pusat perkembangan baru.

Sasaran yang harus dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Tersusunnya indikator kriteria pusat pertumbuhan serta kawasan pada KTM Mesuji, dalam bidang pengembangan usaha, pembangunan Prasarana dan sarana, Kelembagaan, Struktur Ruang, keterkaitan Pusat dengan Hinterland di kawasan transmigrasi dan pusat kawasan transmigrasi.
2. Tersusunnya Pedoman evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan.

1.4.1 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan evaluasi Pusat Pertumbuhan Kota Terpadu Mandiri Mesuji di kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, meliputi:

1. Mengidentifikasi potensi pusat pertumbuhan dan kawasan KTM Mesuji, dengan memperhatikan aspek dasar potensi suatu kota tumbuh, yaitu aspek pengembangan usaha, pembangunan prasarana dan sarana, Kelembagaan, Struktur Ruang,
2. Menguji keabsahan indikator secara deskriptif dan kuantitatif, dengan sasaran akhir adalah sub indikator signifikan untuk setiap kebutuhan dari hubungan pusat

pertumbuhan dengan kawasan (berdasarkan gradasi kriteria pusat pertumbuhan) sehingga akan tercapai kriteria KTM Mesuji menuju mandiri penuh.

1.4.2 Pengertian

1. Transmigrasi merupakan proses perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Kota Terpadu Mandiri
Merupakan Kawasan Transmigrasi dimana pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
3. Wilayah Pengembangan Parsial, merupakan suatu kawasan pengembangan yang didukung oleh beberapa Satuan kawasan Permukiman (3-5 SKP) setara dengan satu WPT.
4. Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) merupakan satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. LPT dipersiapkan untuk mendukung pusat pertumbuhan
5. Pusat KTM, merupakan pusat aktifitas Kota Terpadu Mandiri, di mana dalam pusat pertumbuhan tersebut didukung oleh sarana serta prasarana pengembangan suatu kota setara dengan jumlah penduduk sebesar 9.000 KK.
6. Kawasan perkotaan baru, merupakan desain pembangunan aktifitas kota, dalam kawasan transmigrasi setara dengan agropolitan, dengan aktifitas agribisnis, aktifitas berbasis pada usaha pertanian secara luas.

7. Fungsi Perkotaan

Tersedianya berbagai fasilitas yang meliputi: (1) Pusat kegiatan ekonomi wilayah Pusat kegiatan industri Pengolahan hasil (2) Pusat pelayanan Jasa dan perdagangan (3) Pusat pelayanan kesehatan (4) Pusat pendidikan dan pelatihan (5) Sarana pemerintahan (6) Fasilitas Umum dan Sosial.

8. Layanan dasar

merupakan penilaian progress pusat pertumbuhan kawasan, dimana kawasan *tidak mampu memenuhi* kebutuhan dasar masyarakatnya, masih memiliki **banyak kelemahan** khususnya untuk menjadi pusat pertumbuhan.

9. Layanan sedang

merupakan penilaian progress pusat pertumbuhan kawasan, di mana kawasan *kurang mampu memenuhi* kebutuhan dasar masyarakatnya, masih memiliki cukup banyak kelemahan khususnya untuk menjadi pusat pertumbuhan.

10. Mandiri pertama

merupakan penilaian progress pusat pertumbuhan kawasan, dimana daya dukung kawasan tersebut memiliki kemampuan **cukup memenuhi** kebutuhan dasar masyarakatnya, walaupun masih memiliki kelemahan sedikit sampai sedang sedang untuk menjadi pusat pertumbuhan.

11. Mandiri penuh

merupakan penilaian progress pusat pertumbuhan kawasan, di mana daya dukung kawasan tersebut memiliki kemampuan **memenuhi** kebutuhan dasar masyarakatnya, walaupun masih memiliki kelemahan sedikit untuk menjadi pusat pertumbuhan.

12. Berdaya saing

merupakan penilaian progress pusat pertumbuhan kawasan, kawasan tersebutpotensi dalam bidang komoditas unggulan

yang berkualitas, potensial untuk pemasaran dan memiliki daya saing yang tinggi untuk berkembang menjadi *agribisnis centre*.

1.5. Tinjauan Pustaka

a. Konsep pemikiran KTM dalam pembangunan daerah

Perkembangan UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong kinerja institusi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengikuti dinamika perkembangan pembangunan daerah dengan melaksanakan secara aktif sehingga secara langsung institusi Kemenakertrans berfungsi kontributor pembangunan daerah. Kondisi ini diperjelas dengan implementasi konsep dan konstruk dari UU No.29 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian, yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan transmigrasi adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar
- b. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah
- c. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

Peranan program transmigrasi terhadap pembangunan cukup besar, baik terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional, terutama dalam membuka isolasi wilayah, menambah tenaga kerja/petani, mendukung ketahanan pangan, menambah devisa negara, pembentukan desa-desa baru dan pembangunan sarana sosial-ekonomi budaya di setiap pemukiman transmigrasi.

Pengembangan transmigrasi di masa depan tidak bisa berjalan secara singular, akan tetapi membutuhkan keterpaduan dengan lintas sektor lain khususnya dalam menjalankan manajemen strategik pembangunan kawasan. Untuk melaksanakan

perencanaan strategik pengembangan kawasan transmigrasi dengan dasar pemikiran:

1. Kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan agribisnis yang berorientasi pada kebutuhan pasar (*market needs*), pemberdayaan dilaksanakan terpadu dengan melibatkan seluruh pelaku ekonomi kawasan, yaitu masyarakat transmigran, investor, dan pemerintah.
2. Pengembangan sarana dan prasarana, dalam upaya sebagai daya ungkit pemasaran komoditas dari tingkat pasar lokal, maupun pemasaran internasional. pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan orde pemasaran Orde IV setara UPT/desa, Orde III setara SKP, dan orde II setara dengan WPP dan orde I di tingkat provinsi atau outlet-inlet.
3. Dukungan fasilitasi pemerintah untuk deregulasi situasi dan kondisi aman dengan jaminan pemerintah penuh, sebagai upaya memberikan *brain image* bagi calon investor.

Keterpaduan tiga butir konsep transmigrasi bagi pengembangan masa depan wilayah kabupaten/kota, perlu diikuti dengan perencanaan terpadu lintas sektor dengan pendekatan multidisiplin, terselenggaranya Kota Terpadu Mandiri, yang selanjutnya disebut dengan "KTM". Wacana dari terbentuknya KTM secara konkrit adalah mendorong munculnya komoditas unggulan pada setiap kecamatan, desa ataupun dusun dengan mengacu pada pembangunan *land basis*, sehingga dapat berupa pertanian dalam arti umum, meliputi Pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman industri, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dengan demikian secara konseptual KTM hampir mirip dengan konsep Agropolitan (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.412 tahun 2007). Perkembangan

perekonomian kawasan dengan mengacu pada KTM maupun Agropolitan ini sasarannya berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan potensi sumberdaya terbarukan kawasan pedesaan.

Mengacu pada Arah pembangunan nasional pada periode reformasi sesuai GBHN tahun 1999-2004 dan UU. No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 meletakkan transmigrasi sebagai alat pembangunan nasional. Keterkaitannya dengan arah kebijakan pembangunan nasional, diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu, serta mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal. Berdasarkan arahan kebijakan tersebut antara lain dilaksanakan program:
 - a). pengembangan usaha masyarakat miskin dengan kegiatan pokok berupa penyediaan permukiman transmigrasi baru untuk petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian,
 - b). program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan kegiatan pokok membangun permukiman transmigrasi baru beserta pembinaannya untuk meningkatkan kesempatan kerja utamanya bagi pekerja di sektor pertanian. Selain itu dalam rangka memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja, akan dilakukan upaya percepatan proses inovasi teknologi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian di lokasi transmigrasi,

- c). program pengembangan agribisnis melalui kegiatan pokok pembukaan areal pertanian baru melalui pengembangan perdesaan, pengembangan wilayah dan pengembangan transmigrasi.
2. Pembangunan sosial dan budaya diarahkan untuk mewujudkan keserasian kebijakan kependudukan melalui pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
 3. Pembangunan daerah diarahkan untuk:
 - a) mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah,
 - b) mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam,
 - c) meningkatkan pembangunan di seluruh daerah terutama di kawasan timur Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Berdasarkan arahan kebijakan tersebut pembangunan daerah dilaksanakan melalui program:

- a) pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan kegiatan pokok meliputi pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri dan pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lainnya termasuk kawasan transmigrasi,

- b) program pembangunan wilayah tertinggal dengan kegiatan pokok berupa pembangunan permukiman transmigrasi,
- c) program pengembangan daerah perbatasan dengan kegiatan pokok adalah pengembangan pusat-pusat permukiman potensial termasuk permukiman transmigrasi di daerah perbatasan.

Bukti empirik selama lebih dari 32 tahun pembangunan di Indonesia, peran institusi Transmigrasi nampaknya sangat *relevan* dengan program pembangunan nasional. Kontribusi program pembangunan transmigrasi secara nyata memberikan dukungan/sumbangan yang cukup penting dan besar bagi pembangunan daerah. Peran transmigrasi terhadap pembangunan nasional diukur keberhasilannya dengan indikator terukur yang berupa fisik maupun non fisik dalam mengisi arah kebijakan pembangunan nasional. Sebagai contoh, telah ditegaskan oleh Pemerintah melalui pidato kenegaraan Presiden R.I. tanggal 16 Agustus 1996 bahwa dukungan/sumbangan tersebut dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pembukaan areal produksi baru, yang terdiri atas lahan pekarangan (LP), lahan usaha tanaman pangan (LU I), dan lahan usaha tanaman keras (LU II). Selama PJP I, telah dibuka lahan seluas 928.616 ha (LP dan LU I) dan LU II (dibuka secara swadaya oleh transmigran) seluas 811.382 ha, dan pada masa Kabinet Reformasi telah dibuka lahan pekarangan 16.312 ha dan LU I seluas 88.315 ha.
2. Pembangunan sarana prasarana perhubungan dalam meningkatkan aksesibilitas suatu daerah, yang dapat meningkatkan peluang terjadinya interaksi ekonomi, sosial dan budaya.
3. Pembangunan rumah, sarana air bersih dan fasilitas umum, menunjukkan peningkatan jumlah pemilikan rumah dan sarannya.

4. Perluasan kesempatan kerja, artinya penambahan tenaga kerja sehingga produksi usahatani meningkat.
5. Mendukung kelancaran program sektor lain melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan (pembangunan gedung sekolah, penyediaan guru), sarana kesehatan.

Pembangunan yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan baik antar pelaku pembangunan, antar golongan, antar desa dan kota, antar kawasan dan antarwilayah. Oleh sebab itu di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 mengamanatkan antara lain bahwa:

- a. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang selama ini masih belum berkembang secara optimal sehingga dapat menjadi motor penggerak bagi wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis.
- b. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpinggirkan sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
- c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
- d. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah perdesaan dengan yang berada di perkotaan.
- e. Mengoperasikan '*Rencana Tata Ruang*' sesuai dengan hirarki perencanaan sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antarwilayah.

- f. Pembangunan pedesaan dengan mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi pedesaan; meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan produk pedesaan lainnya; memperluas akses masyarakat pedesaan ke sumber daya-sumber daya produktif, pelayanan publik dan pasar; meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kualitasnya, penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat pedesaan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan; serta mengembangkan praktik-praktik budidaya pertanian usaha nonpertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Walaupun disadari selama ini banyak program transmigrasi mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya, namun harus diakui bahwa keberadaan transmigrasi sampai saat ini masih relevan dan diperlukan. Kontribusi transmigrasi dalam percepatan pembangunan daerah cukup besar. Salah satu contoh konkrit kontribusi transmigrasi adalah banyaknya pemekaran wilayah kabupaten dan kecamatan yang didukung oleh pembangunan pemukiman transmigrasi, hal ini merupakan salah satu indikasi positif.

b. KTM Mesuji Dalam Konteks Regional

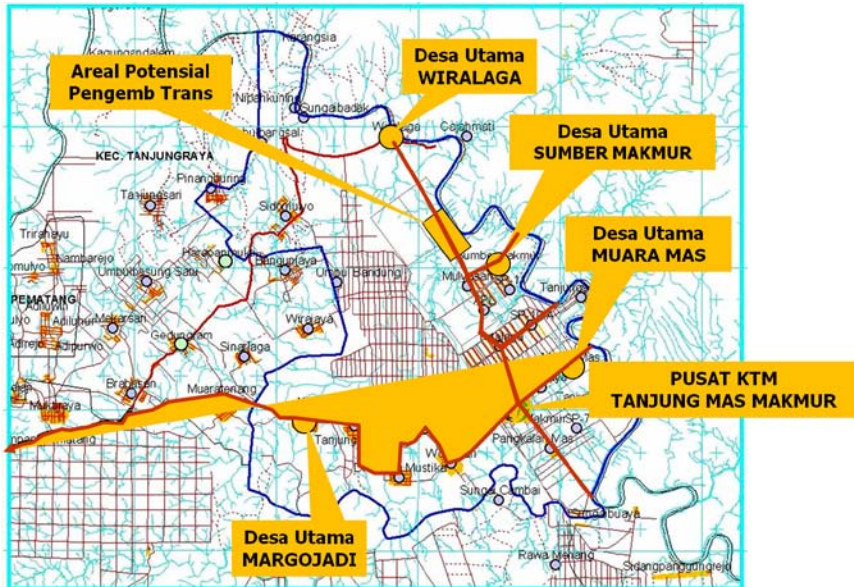
Kawasan Pengembangan Mesuji merupakan bagian utama dari Kabupaten Mesuji, secara geografis wilayah Kabupaten Mesuji, terletak pada posisi di sebelah barat dari pusat ibukota Provinsi Lampung di Kota Bandarlampung. Dilihat dari struktur geografis kawasan Mesuji dinilai strategis, dengan alasan:

1. Kawasan Pengembangan Mesuji, merupakan kawasan transmigrasi dan didukung oleh hinterland berupa desa-desa, di mana perkembangan ke depan kawasan tersebut dipersiapkan sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi,

- dengan basis lahan untuk tanaman perkebunan (Sawit, Karet), dan maupun tanaman pangan (padi, jagung), di samping adalah jasa dan industri.
2. Pemikiran dari Pemerintah daerah Kabupaten Mesuji untuk mengembangkan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, merupakan langkah strategis dengan keberadaan KTM Mesuji yang dipersiapkan menjadi *Growth pole*, dengan basis utama pada lahan (*land basis*) sebagai wilayah komoditas yang diharapkan mensuplai kebutuhan pasar di regional di wilayah barat Provinsi Lampung.
 3. Pemikiran Kabupaten Mesuji untuk mengembangkan usaha pertanian ataupun perkebunan, sebagai antisipasi untuk mendorong pertumbuhan Pusat Agribisnis di kecamatan yang menjadi basis orde III dalam *grand design* perkembangan KTM Mesuji.
 4. Penyatuan secara komprehensif budidaya usahatani skala besar, dengan melibatkan pelaku di tingkat investor, diharapkan mampu menjadi pendorong dan akselerasi kawasan agribisnis di KTM Mesuji sebagai penyangga pembangunan ekonomi, wilayah Provinsi Lampung di sisi barat.

Aksesibilitas dari pusat desa utama yang terdiri atas empat *hinterland* desa utama, Wiralaga, Sumber Makmur, Desa Muara mas, dan desa utama Margodadi, dengan pusat KTM Tanjung Mas Makmur, hubungan internal dirasakan sangat signifikan, dengan dicirikan oleh letak setiap desa utama berada di pinggir jalan utama kabupaten, hubungan internal dengan desa utama sebagai *hinterland* dari pusat KTM, secara sinergi akan berfungsi pula sebagai *hinterland* bagi pusat kawasan di orde III Kecamatan Mesuji dan Mesuji timur, dengan distribusi masukan sebagai input dari kecamatan sebagai pusat kawasan KTM Mesuji berupa barang-barang kebutuhan pokok dan bahan lain yang bersifat kebutuhan

sehari-hari. Kota Mesuji sebagai ibukota kabupaten untuk jalur pasar dan pemasaran regional, berjarak 2 jam perjalanan darat, gambaran secara skematik untuk desa *hinterland*, pusat KTM dan kawasan Mesuji disajikan pada gambar.1.1.



Gambar 1.1. Peta skematik desa utama sebagai hinterland dan pusat KTM Mesuji

Mengacu pada peranan wilayah pengembangan KTM Mesuji sebagai kontributor bagi perkembangan daerah Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung dalam konteks regional, dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kawasan Pengembangan dalam hal ini adalah kawasan KTM Mesuji, secara strategis akan mampu mendukung perekonomian regional khususnya di Provinsi Lampung sisi barat, sekaligus menjadi persiapan kawasan pengembangan menjadi daerah penyanga komoditas

2. Kawasan Pengembangan dalam hal ini adalah kawasan KTM Mesuji dalam konteks regional, mempunyai peluang besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan untuk tanaman perkebunan skala besar dan pangan, dengan *multiplier efectnya*, peningkatan PDRB daerah dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat secara umum, dan khususnya bagi warga transmigran, dan masyarakat sekitarnya.
3. Kedudukan kawasan pengembangan Mesuji, menjadi prioritas menjadi *triger pertumbuhan serta* pengembangan *ekonomi* di Kabupaten Mesuji.

c. Arahlan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Mesuji

Program Kota Terpadu Mandiri merupakan program ke depan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di unit-unit permukiman transmigrasi, terutama pada Kawasan Tertinggal dengan harapan program KTM ini dapat mengejar ketertinggalannya sehingga menjadi kawasan cepat tumbuh.

Kawasan Mesuji merupakan kawasan transmigrasi yang dinilai termasuk kawasan cukup maju dan berkembang, sekali pun demikian keinginan pemerintah daerah setelah pemekaran merupakan usulan Bupati Kabupaten Mesuji No. SK Men No 137/MEN/VI/2008 dikembangkan menjadi Kawasan Terpadu Mandiri. Apabila dilihat dari aspek legalitas penanganan kawasan maka diharapkan KTM Mesuji dapat dikembangkan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya yaitu sebagai suatu kawasan kota yang berbasis agronomis yaitu berbasis tanaman perkebunan maupun tanaman pangan.

Pengembangan Kawasan KTM Mesuji ini meliputi Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur yang terstruktur menjadi 1 Pusat Pengembangan Ekonomi dengan dukungan desa sekitarnya

antara lain: Wiralaga, Sumber Makmur, Desa Muara Mas, dan desa utama Margodadi, dengan total luas kawasan KTM Mesuji sekitar 4.650 km².

Perkembangan luas areal produktif yang diusahakan oleh petani serta proyeksi empirik volume produksi untuk setiap komoditas yang tersedia di kawasan pengembangan Mesuji, secara langsung menjadi dasar pemikiran para pengelola, termasuk didalamnya pokja dan badan pengelola pada tingkat kecamatan ataupun kabupaten dalam upaya pengembangan Agribisnis di kawasan besar Mesuji yang dipersiapkan menjadi pusat pemasaran pada orde III, Sesuai dengan konsep pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Mesuji maka strategi pengembangan yang dilakukan adalah pemerataan pelayanan dan penjalaran fungsi pusat-pusat pelayanan, sebagaimana disajikan dalam struktur pengembangan Tabel.1.1.

Tabel 1.1.Hirarki Pusat-Pusat Permukiman Kabupaten Mesuji

No	Kota/ Kecamatan	Skala Pelayanan	Orde Kota	Fungsi					
				A	B	C	D	E	F
1	Desa Tanjung Mas Makmur (Kec. Mesuji)	Wilayah	I	√	√	√	√	√	√
2	Margodadi (Kec. Mesuji)	Sub-Wilayah/ kecamatan	II	√	√	√	-	-	-
3	Wiralaga (Kec.Mesuji)	Sub-Wilayah/ kecamatan	II	√	√	√	-	-	-
4	Sumber Makmur (Kec.Mesuji)	Sub-Wilayah/ kecamatan	II	√	√	√	-	-	-
5	Muara mas (Kec.Mesuji)	Sub-Wilayah/ kecamatan	II	√	√	√	-	-	-
6	Desa sekitar (Kec.Mesuji)	Sebagian kecamatan	III	√	√	√	√	-	-

Sumber: RTRW Kabupaten Mesuji, 2009

Keterangan :

Fungsi : A = Pusat Administrasi Pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa)

B = Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi

C = Pusat Perdagangan, Jasa, dan Pemasaran

D = Pusat Perhubungan dan Komunikasi

E = Pusat Produksi Pengolahan

F = Pusat Pendidikan Tinggi

d. Strategi Pengembangan Struktur Tata Ruang Wilayah

Indikator untuk melihat hirarki pusat-pusat pelayanan eksisting pada Kawasan Mesuji dapat dilihat dari pola/orientasi perjalanan ke sarana ekonomi (pasar, bank). Sarana pendidikan (SMA/SMK), sarana kesehatan (puskesmas, apotek, bidan), sarana rekreasi dan sarana jasa pemerintahan (layanan tingkat kecamatan) (Ditjen PM2KT, 2009). Hirarki pusat-pusat pelayanan eksisting pada Kawasan Mesuji berdasarkan indikator di atas memperlihatkan 4 desa utama: Margodadi, Wiralaga, Sumber Makmur, dan Muara Mas merupakan pusat permukiman dengan hirarki tertinggi dalam melayani kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jasa pemerintahan bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan dalam penentuan desa utama di atas, maka terpilih desa-desa utama yang akan dipromosikan menjadi desa utama sebagai pusat SKP, yaitu:

1. **Desa Margodadi.** Memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan di dalam kawasan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Memiliki potensi komoditas yang dapat dikembangkan seperti aman perkebunan khususnya kelapa sawit, karet, dan padi sawah, jagung.
 - Akses ke pusat desa cukup baik karena di dukung oleh ruas jalan kabupaten dengan kondisi yang baik.
 - Masih terdapat lahan kosong, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan fungsi-fungsi pelayanan sarana sosial dan ekonomi.
2. **Desa Wiralaga.** Dipromosikannya Desa Wiralaga menjadi salah satu pusat pertumbuhan antara lain:

- Memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkembang di antaranya kegiatan pendidikan, kesehatan, koperasi, penyaluran bahan bakar minyak, industri rumah tangga, jasa perbengkelan kendaraan dan jasa persewaan lainnya.
 - Berada dalam ruas jalan kabupaten.
 - Memiliki akses yang baik terhadap desa-desa utama yang berada dalam wilayah KTM Mesuji.
 - Masih terdapat lahan kosong, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan fungsi-fungsi pelayanan sarana sosial dan ekonomi.
3. **Desa Sumber Makmur.** Desa ini berpotensi untuk menjadi salah satu pusat pengembangan dengan pertimbangan di antaranya:
- Masih terdapat lahan kosong, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan fungsi-fungsi pelayanan sarana sosial dan ekonomi.
 - Kelengkapan sarana sosial ekonomi sudah cukup tersedia seperti sarana SMP sudah ada, posyandu aktif, jasa perbengkelan, industri rumah tangga dan sebagainya.
4. **Desa Makmur Mas.** Desa ini berpotensi untuk menjadi salah satu pusat pengembangan dengan pertimbangan diantaranya:
- Masih terdapat lahan kosong, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan fungsi-fungsi pelayanan sarana sosial dan ekonomi Kelengkapan sarana sosial ekonomi sudah cukup tersedia seperti sarana SMP sudah ada, posyandu aktif, jasa perbengkelan, industri rumah tangga dan sebagainya.

Selanjutnya kelima desa tersebut berpotensi menjadi pusat Satuan Kawasan Permukiman di Kawasan Mesuji, sebagaimana disajikan pada Tabel.1.4.

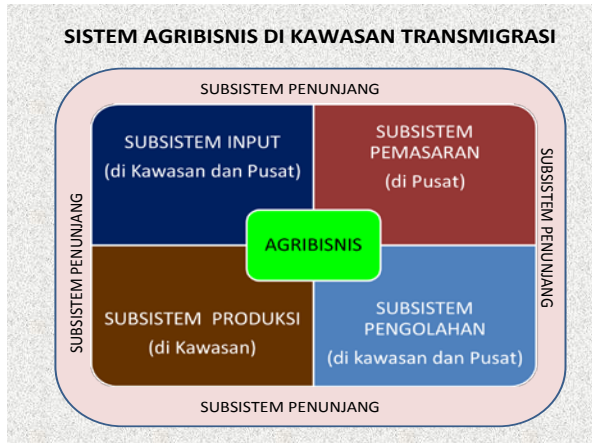
Tabel 1.4. Hierarki Orde Kota Kawasan Batu Betumpang

NO	HIERARKI	Orde Kota	DESA
1	Hierarki I	II	Pusat KTM Mesuji
2	Hierarki II	III	Wiralaga Margodadi Makmur mas Sumber makmur
3	Hierarki III	IV	desa ataupun UPT

e. Evaluasi pusat pertumbuhan Kota Terpadu Mandiri

Keberhasilan dalam pembangunan yang berjalan secara kasuistik di negara maju ataupun negara berkembang, ditunjukkan oleh paradigma pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Moelyarto, 1996). Pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah mengacu pada Undang-undang No. 32 tahun 2004, dengan paradigma pembangunan KTM sebagai kontribusi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PerMen N0.142 tahun 2006) dan dasar UU No. 29 tahun 2009. Merupakan bentuk nyata keikutsertaan institusi Kemenakertrans dalam mencapai pembangunan di tingkat daerah, sekaligus menjadi *triger* dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan model pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di wilayah tersebut, sehingga dalam implementasinya pendekatan sistem banyak memberikan keuntungan, untuk mempermudah melaksanakan analisis, dengan demikian diperlukan deskripsi permasalahan secara keseluruhan. dalam bentuk gambaran pemikiran secara sistem, yang secara sistemik diindikasikan dalam input-proses dan ooutput. Evaluasi bagi pembangunan pusat pertumbuhan Kota Terpadu Mandiri telah dilakukan di 8 KTM dalam bentuk sosialisasi, dengan mengacu pada perencanaan pedoman evaluasi Pusat pertumbuhan (Ditjen PM2KT, dit.PL,2010). Dengan memanfaatkan konsepsi dasar kawasan dan pusat pertumbuhan sebagaimana di gambarkan pada gambar.1.2 berikut.



Gambar.1.2. Keterkaitan antara pusat pertumbuhan dan pusat kawasan

Gambaran perkembangan ke depan dalam tataran konsep dan konstruk untuk KTM, ditunjukkan dengan bentuk sistem dinamik, di mana desa sekitar dan SP akan menjadi sub penunjang bahan sebagai *raw material* bagi pertumbuhan perekonomian regional di kawasan KTM, yang dipersiapkan menjadi sistem pembangunan agribisnis. Dengan mengandalkan kontribusi dari sub sistem penunjang secara sistem hirarkhis termasuk dalam orde III, diolah dan diproduksi di pusat pertumbuhan maupun kawasan (pada orde II atau orde I), dan dilanjutkan pemasaran melalui kawasan di orde II atau orde I. Dalam pelaksanaan evaluasi didasarkan pada indikator pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan terdiri atas 130 indikator, yang dipergunakan sebagai dasar untuk menilai secara existing KTM, selanjutnya setiap indikator variabel diukur dengan menggunakan skala Likert, dengan menggunakan klas interval, yang terklasifikasi menjadi 5 sebagai berikut.

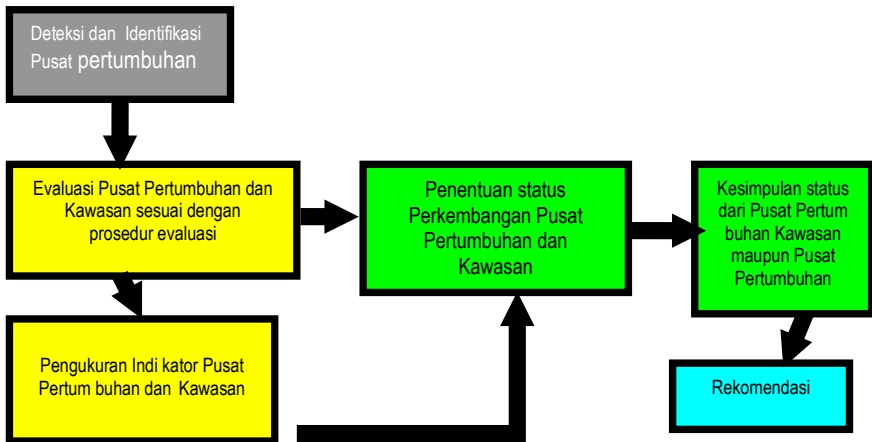
Tabel.1.5. Klasifikasi penilaian kawasan berdasarkan indikator

Klas	Interval	Keterangan
I	1,0-1,99	Layanan Dasar
II	2,0-2,99	Layanan Sedang
III	3,0-3,99	Mandiri Pertama
IV	4,0-4,99	Mandiri Penuh
V	5,0	Daya Saing

Sumber: Dit.PL, Ditjen P2MKT, 2009 (draft).

1.6. Landasan Pemikiran

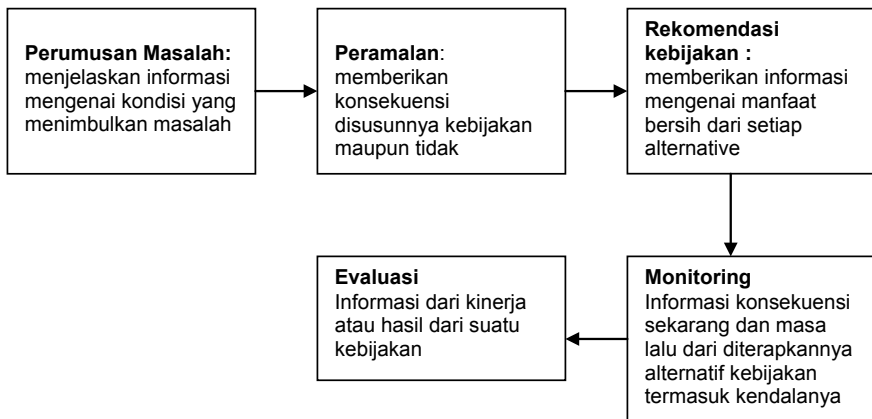
Prosedur yang harus dilakukan dalam Evaluasi Pusat Pertumbuhan dan Kawasan adalah seperti bagan alir berikut:



Gambar.1.3. mekanisme evaluasi Pusat pertumbuhan dan kawasan

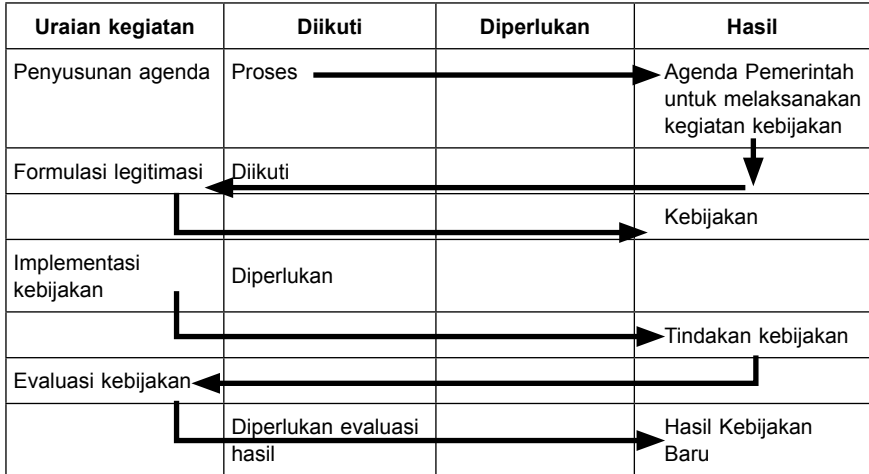
Analisis kebijakan merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk mencermati deviasi dari determinan, yaitu antara kondisi eksisting dengan kondisi yang diharapkan, untuk mendeskripsikan ketepatan dari metode tersebut, sekiranya pengenalan analisis merupakan kelengkapan dari metode untuk mengurai kebijakan yang diperlakukan pada bidang tertentu. Di

mana analisis kebijakan merupakan salah satu pendekatan yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kebijakan *public* (Subarsono, Ag, 2008), termasuk di dalamnya adalah semua layanan yang terkait dengan kesejahteraan publik sebagai indikasinya adalah kawasan KTM yang dipersiapkan oleh institusi Kemenakertrans, menjadi ikon kontribusi pembangunan daerah (PerMen 142 Tahun 2006). Analisis kebijakan publik (Subarsono, Ag, 2008, Dunn, W, 2000), memiliki prosedur dasar, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, monitoring dan evaluasi, digambarkan sebagai berikut.



Gambar.1.4. Proses Kebijakan Publik (Dunn, W, 1994)

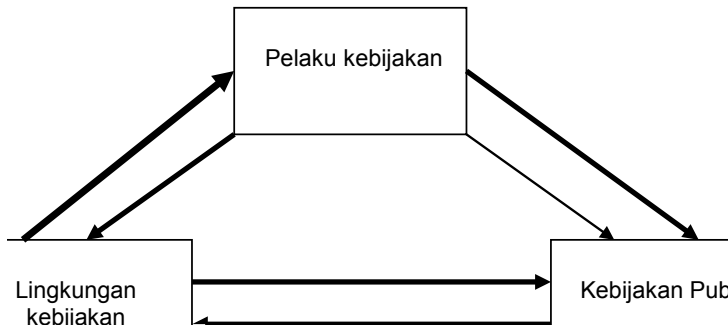
Menurut Ripley (1985) di dalam Ag. Subarsono (2008), kebijakan yang dilaksanakan secara jelas digambarkan sebagai berikut:



Gambar.1.5. Tahapan Kebijakan Publik (Ripley, 1985)

Dari Tahapan mekanisme kebijakan publik yang dijalankan di berbagai bidang atau pun sektoral secara langsung akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang disebut dengan lingkungan kebijakan, adanya deviasi seperti halnya dengan lemahnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum di kawasan transmigrasi, memaksa pemerintah sebagai aktor pelaku untuk meresponnya dan memasukkan dalam agenda pemerintah dan selanjutnya akan melahirkan kebijakan untuk memecahkan permasalahan bersangkutan. Sebagai contoh kebijakan pengembangan kawasan pertumbuhan KTM untuk mengatasi lemahnya dinamika pembangunan daerah dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Solichin, A, 2002,

Subarsono, 2008). Hubungan antara 3 elemen yang terlibat dalam sebuah kebijakan, sebagaimana gambar 3.



Gambar.1.6. Hubungan tiga elemen sistem kebijakan (William Dunn, 1994)

Evaluasi di dasarkan hal yang menjadi faktor penghambat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 hal penting dari pelaksanaan kebijakan evaluasi bidang pusat pertumbuhan KTM, 3 pilar tersebut adalah: 1) Peraturan perundangan, dan dasar hukum 2). Pelaksanaan peraturan seharusnya dan sebenarnya 3) Penyebab terjadinya deviasi pelaksanaan dipandang dari sisi internal perundangan dan eksternal lingkungan kebijakan yang bersifat *local indegios*, 4) Dengan demikian evaluasi kebijakan dirunut dengan logika proses sistemik input-ouput sebagai berikut:

Input	Proses	Output
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum dalam pelaksanaan Peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah melalui KTM yang masih perlu dicermati 2. Pelaksanaan perundangan yang sering terjadi overlapping, dan kurang efektif dan efisien 3. Manfaat pelaksanaan perundangan bagi stakeholder 4. Saprass sebagai bagian fisik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan fisik di kawasan KTM 2. Tidak terjadi kontroversi perundangan dalam pelaksanaan pembangunan KTM dalam menjangkau pembangunan daerah 3. Peningkatan ketepatan manfaat bagi stakeholder 4. perencanaan, forecasting, pelaksanaan dan evaluasi berjalan sesuai mekanisme 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar Hukum pembangunan KTM terhadap dasar hukum pembangunan daerah dan tata ruang 2. manfaat pelaksanaan pembangunan KTM 3. Dukungan optimal dari pelaku internal service pembangunan KTM dan implementasi ke depan

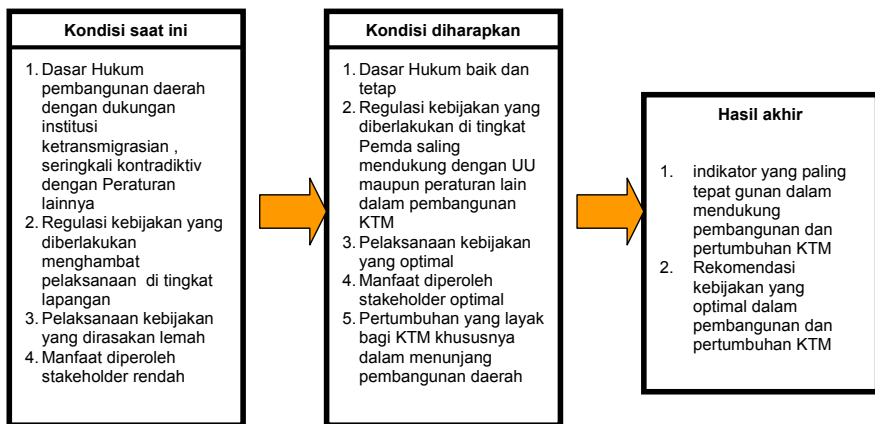
Gambar.1.7. Sistemik input-output Pelaksanaan kebijakan pembangunan Kawasan KTM

Secara empirik mendasari suatu pernyataan dengan meningkatnya investasi di kawasan KTM, selanjutnya akan menjadi daya dorong untuk meningkatkan pendapatan asli pemerintah daerah, di samping membuka kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat.

Keberhasilan untuk mencapai optimasi pertumbuhan kawasan KTM belum dapat dirasakan oleh *stakeholder*, hal ini nampaknya menjadi penghambat serius perlu ditangani oleh pemerintah daerah atau pun *stakeholder* di luar pemerintah daerah, salah satunya melalui program pembangunan ketransmigrasian khususnya KTM. Mengutamakan tiga pilar utama sebagai faktor dasar dalam langkah evaluasi kebijakan pembangunan KTM di beberapa kawasan transmigrasi, terdiri atas dasar hukum, pelaksanaan, dan nilai manfaat. Ketiga pilar tersebut diindikasikan menjadi indikator dasar pengukuran.

Dalam pendekatan analisis kebijakan secara deskriptif, akan lebih menekankan pada fenomena serta fakta yang ditemukan di

lapangan, yang disusun dalam langkah analisis kebijakan (Dunn, W, 1994), dari permasalahan, *forecasting*, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Di mana tahapan tersebut diterjemahkan dalam peta kerja (*road map*), menjadi lebih mendekati dengan menggunakan faktor sebagaimana digambarkan pada gambar.6.



Gambar.1.8 Roadmap evaluasi pertumbuhan KTM

1.7. Metodologi penelitian

1. Lokasi Penelitian

Secara purposive lokasi penelitian ditetapkan di KTM Mesuji Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

2. Sampel penelitian dan Informan

Penelitian ini merupakan *sample research* dengan penetapan lokus kajian secara purposive, menggunakan klaster Kawasan KTM Mesuji, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Mesuji,

atau pun instansi yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan Kawasan Kota Terpadu Mandiri, dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel.1.6. Unit sampel, pengukuran kawasan KTM Mesuji

No	Prov/Kabupaten	Sampel uji formal	Sampel uji non formal	Informan/ responden
1	Lampung Mesuji	KTM Mesuji dengan pusat pertumbuhan tanjung mas makmur (sebagai pusat pertumbuhan)	Lembaga /institusi yang bekerja dalam pembangunan KTM Mesuji	10 Informan Sebagai stakeholder maupun shareholder pusat pertumbuhan KTM Mesuji
		Dinas Sosial dan tenaga Kerja	Lembaga /institusi yang bekerja dalam pembangunan KTM Mesuji	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Mesuji (informan)
2	Kecamatan Mesuji dan Mesuji timur	Kecamatan	Lembaga /institusi yang bekerja dalam layanan pembangunan KTMesuji	Kecamatan dalam angka Monografi desa informan
3	BPS	Badan pusat Statistik Kab. Mesuji	Lembaga /institusi yang bekerja dalam layanan pembangunan KTM Mesuji	Data Kecamatan Data kabupaten
4	Pusat Kawasan	Mesuji	Lembaga /institusi yang bekerja dalam layanan perizinan bidang PM	10 Informan Sebagai stakeholder maupun shareholder kawasan Mesuji

3. Variabel penelitian

Akuntabilitas variabel kajian dalam penyusunan indikator untuk menilai kawasan pusat pertumbuhan khususnya di KTM Mesuji Menurut kategorinya dibedakan menjadi dua, yaitu kategori kawasan pertumbuhan dan pusat pertumbuhan.

Pusat Pertumbuhan setara dengan pusat Kota Terpadu Mandiri, sedangkan kawasan pertumbuhan analog dengan kawasan Kota

Terpadu Mandiri, di mana kawasan tersebut merupakan integrasi antara pusat pertumbuhan dengan kawasan pendukung atau pun zone pendukung (*buffer zone*).

a. *Beberapa variabel terukur untuk kawasan meliputi:*

1) Pengembangan Usaha

- a) Memiliki komoditas unggulan, sebagaimana diusulkan dalam syarat pembangunan pusat pertumbuhan kawasan, di dalam pelaksanaan komoditas memiliki skala usaha untuk kelas ekonomi lokal, maupun regional.
- b) Pengolahan lahan, sebagai bagian utama *land basis system* pertanian di lokasi permukiman transmigrasi, diolah oleh sebagian besar transmigran, atau pun masyarakat tani, khususnya untuk lahan menunjang komoditas unggulan.
- c) Lembaga Ekonomi penunjang usaha petani atau masyarakat petani transmigrasi, terdiri atas Koperasi Usaha, Koperasi Usaha bersama, atau pun dalam bentuk kelembagaan gabungan kelompok tani (Gapoktan), di mana tidak sebatas tersedia dan ada bentuk fisik, akan tetapi lebih ditekankan adanya wadah serta akses kegiatan. berbadan hukum dan berjalan dengan baik.
- d) Kemitraan, dengan adanya kelompok usaha, serta adanya pendampingan, dimaksudkan akses untuk kemitraan dengan pihak swasta besar (pola kemitraan), kemitraan dapat dengan usaha pertanian maupun non pertanian, dengan demikian pola Kemitraan dalam konteks pembangunan ekonomi rakyat khususnya transmigran akan merupakan akses pasar serta pemasaran baik dalam *spesifik market* maupun *mixed market*.

- e) Lembaga keuangan, dengan peningkatan akses ekonomi, serta kebutuhan keuangan bagi masyarakat keberadaan pendukung keuangan menjadi sangat penting, dan indikasi kemajuan perekonomian antara lain adalah lembaga perbankan dan sejenisnya antara lain pegadaian.
- f) Pasar yang merupakan wadah untuk terjadinya transaksi produk usaha pertanian maupun non pertanian, dan terjadinya proses pengaliran barang dan atau pun jasa dari produsen ke konsumen dalam bentuk pemasaran. aktivitas pemasaran didukung dengan keberadaan pasar harian (*local market*) yang berada di wilayah pertumbuhan, pemasaran pada tingkat regional, dari sisi bentuk pasar terdiri atas pasar induk, pasar grosir, atau pun bauran dari bentuk antara induk dan sekaligus menjadi grosir.
- g) Pusat bisnis, di mana pusat bisnis merupakan pusat pertokoan, yang menjadi indikator penting keberadaan pada kawasan pertumbuhan, di mana pusat bisnis menjadi pasar dan pemasaran segala usaha jasa, industri, maupun produk pertanian.
- h) Industri pengolahan hasil panen ,merupakan industri proses pengolahan dari produkbaik unggulan maupun normatif yang dihasilkan oleh daerah penyangga, misalnya industri pengolahan hasil pertanian (proses RMU, industri tepung tapioka, industri pengolahan karet, industri pengolahan coklat).
- i) Industri pengolahan bernilai tinggi, untuk kawasan yang sudah maju, keberadaan industri sangat dibutuhkan sebagai diversifikasi pengolahan untuk meningkatkan marjin keuntungan, antara lain pengolahan Kernel, industri pengolahan kopi bubuk, pengolahan karet mentah.

2) Penduduk

Keberadaan penduduk sebagai faktor produksi, dapat dilihat dari potensi serta kapasitas untuk pengusahaan lahan, atau pun industri dan jasa. Sebagai faktor produksi indikator penduduk dilihat dari:

- a) Jumlah penduduk dengan jumlah ≤ 5.000 KK
- b) Jumlah penduduk berkisar 5.000 KK - 9.000 KK
- c) Jumlah penduduk dengan jumlah ≥ 9.000 KK

3) Sarana dan Prasarana serta, Fasilitas Umum

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang aktifitas *corporasi*, baik kecil maupun *corporasi* besar. Pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, mencapai tingkat IPM yang tinggi, dibutuhkan sarana maupun prasarana standar dalam bidang:

- a) Pendidikan, merupakan dasar utama selain faktor lain dalam mendukung indikator pembangunan manusia, pendidikan di butuhkan antara lain sarana dan prasarana pada tingkat kawasan adalah tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA/SMK, dan tingkat Akademik/politeknik.
- b) Kesehatan, sebagai hal nya indikator pendidikan, kesehatan merupakan faktor penting dalam pemerintah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. pada tingkat kawasan tersedianya Puskesmas Pembantu untuk setiap 5 kecamatan, dan satu puskesmas untuk setiap kecamatan, demikian pula untuk rumah sakit tipe C untuk tingkat kota kabupaten /kotamadya.
- c) Tempat peribadatan, meliputi mesjid kecil, mesjid besar, *islamic centre*.
- d) Pembangkit listrik, bersumber dari Diesel, tenaga surya maupun PLN.

- e) Terminal, sebagai akses distribusi jasa dan penumpang, pada akses lokal, atau pun antarwilayah.
- f) Pelayanan keamanan untuk masyarakat sipil, diindikasikan dengan keberadaan pos polisi setingkat polsek.
- g) Jaringan irigasi, merupakan sarana pengairan usaha pertanian padi, dibutuhkan bagi kawasan dengan komoditas unggulan adalah padi.

b. *Variabel Pusat Pertumbuhan, meliputi:*

1) Keterpusatan dan fungsi pusat, meliputi:

a) Penduduk

Keberadaan penduduk sebagai faktor produksi, dapat dilihat dari potensi serta kapasitas untuk pengusaha lahan, ataupun industri dan jasa. Sebagai faktor produksi indikator penduduk dilihat dari:

- (1) Jumlah penduduk dengan jumlah 1.000 KK
- (2) Jumlah penduduk berkisar 1.500 KK
- (3) Jumlah penduduk dengan jumlah ≥ 2.000 KK

b) Fasilitas sarana dan prasarana

- (1) Pendidikan, merupakan dasar utama selain faktor lain dalam mendukung indikator pembangunan manusia, pendidikan dibutuhkan antara lain sarana dan prasarana pada tingkat kawasan adalah tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA/SMK, dan tingkat Akademik/politeknik.
- (2) Kesehatan, sebagai halnya indikator pendidikan, kesehatan merupakan faktor penting dalam pemerintah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. pada tingkat kawasan tersedianya Puskesmas Pembantu untuk setiap 5 kecamatan, dan satu puskesmas untuk setiap kecamatan, demikian pula untuk rumah sakit tipe C untuk tingkat kota kabupaten /kotamadya

- (3) Tempat peribadatan, meliputi mesjid kecil, mesjid besar, *islamic centre*.
- (4) Terminal, sebagai akses distribusi jasa dan penumpang, pada akses lokal, ataupun antarwilayah.
- (5) Pelayanan keamanan untuk masyarakat sipil, diindikasikan dengan keberadaan pos siskamling, pos polisi, dan polsek.
- (6) Lembaga Ekonomi penunjang usaha petani atau masyarakat petani transmigrasi, terdiri atas Koperasi Usaha, Koperasi Usaha bersama, atau pun dalam bentuk kelembagaan gabungan kelompok tani (Gapoktan), di mana tidak sebatas tersedia dan ada bentuk fisik, akan tetapi lebih ditekankan adanya wadah serta akses kegiatan. berbadan hukum dan berjalan dengan baik
- (7) Kemitraan, dengan adanya kelompok usaha, serta adanya pendampingan, dimaksudkan akses untuk kemitraan dengan pihak swasta besar (pola kemitraan), kemitraan dapat dengan usaha pertanian maupun non pertanian, dengan demikian pola Kemitraan dalam konteks pembangunan ekonomi rakyat khususnya transmigran akan merupakan akses pasar serta pemasaran baik dalam *spesifik market* maupun *mixed market*.
- (8) Lembaga keuangan, dengan peningkatan akses ekonomi, serta kebutuhan keuangan bagi masyarakat keberadaan pendukung keuangan menjadi sangat penting, dan indikasi kemajuan perekonomian antara lain adalah lembaga perbankan dan sejenisnya antara lain pegadaian.
- (9) Pasar yang merupakan wadah untuk terjadinya transaksi produk usaha pertanian maupun non pertanian, dan terjadinya proses pengaliran barang dan ataupun jasa dari produsen ke konsumen dalam

bentuk pemasaran. aktivitas pemasaran didukung dengan keberadaan pasar harian (*local market*) yang berada di wilayah pertumbuhan, pemasaran pada tingkat regional, dari sisi bentuk pasar terdiri atas pasar induk, pasar grosir, ataupun bauran dari bentuk antara induk dan sekaligus menjadi grosir.

- (10) Pusat bisnis, dimana pusat bisnis merupakan pusat pertokoan, yang menjadi indikator penting keberadaan pada kawasan pertumbuhan, di mana pusat bisnis menjadi pasar dan pemasaran segala usaha jasa, industri, maupun produk pertanian
- (11) Industri pengolahan hasil panen, merupakan industri proses pengolahan dari produk baik unggulan maupun normatif yang dihasilkan oleh daerah penyangga, misalnya industri pengolahan hasil pertanian (proses RMU, industri tepung tapioka, industri pengolahan karet, industri pengolahan coklat).
- (12) Industri pengolahan bernilai tinggi, untuk kawasan yang sudah maju, keberadaan industri sangat dibutuhkan sebagai diversifikasi pengolahan untuk meningkatkan marjin keuntungan, antara lain pengolahan Kernel, industri pengolahan kopi bubuk, pengolahan karet mentah.
- (13) Pembangkit listrik, bersumber dari Diesel, tenaga surya maupun PLN.
- (14) Telekomunikasi, meliputi telpon seluler dengan operator ≥ 1 orang.
- (15) Ketersediaan air bersih, dengan kualitas air minum standar baku, atau tersedia Pengolahan PDAM.
- (16) Komposisi luas lahan terbangun, dengan gradasi atau kategori: rendah, sedang dan tinggi.

2) Keterhubungan inter dan antar

a) keterhubungan dalam kawasan

- (1) belum seluruhnya terhubung
- (2) seluruhnya sudah terhubung
- (3) tersedia angkutan umum dalam kawasan
- (4) seluruhnya terhubung dan diperkeras dengan aspal

b) keterhubungan di luar kawasan

- (1) terhubung dengan kondisi jalan perkerasan
- (2) terhubung melalui jalur air
- (3) sebagian jalan diaspal
- (4) sudah seluruh jaringan diaspal/hotmix
- (5) tersedia angkutan umum dalam kawasan

3) Kelembagaan pengelola

- a) Badan Pengelola KAWASAN TRANSMIGRASI
- b) Lembaga adhoc (instansi pemerintah)
- c) Lembaga profesional (Badan Pengelola sesuai PP 39/2009, Badan layanan Umum, lembaga profesional independen)
- d) Lembaga pengelola unit kegiatan
 - (1) Pasar
 - (2) Pusat pertanian (*agrocentre*)
 - (3) Pusat pengolahan
 - (4) Pusat bisnis
 - (5) Pusat pelatihan dan penyuluhan agribisnis
 - (6) Lembaga Pengembangan Sosial Masyarakat
 - (7) Lembaga pengembangan seni budaya
 - (8) Lembaga pengembangan mental spiritual
 - (9) Lembaga Pengawasan dan pengendalian pembangunan

3.2. Pengukuran Indikator Pusat Pertumbuhan dan Kawasan

- a. Untuk evaluasi Kawasan variabelnya adalah: (1) Pengembangan Usaha, (2) Kependudukan, (3) Sarana dan Prasarana, dan (4) Struktur Ruang.
- b. Untuk Pusat Pertumbuhann variabelnya adalah: (1) Keterpusatan dan Fungsi Pusat, (2) Koleksi dan Distribusi, (3) Pola Interaksi Internal-Eksternal, dan (4) Kelembagaan Pengelola.
- c. Masing-masing variabel diberi bobot yang jumlahnya adalah 100%. Bobot masing-masing variabel tidak sama, variabel yang paling besar kontribusinya bagi pertumbuhan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan diberi bobot yang lebih besar dari variabel yang lainnya.
- d. Masing-masing variabel dibagi dalam beberapa indikator dan masing-masing indikator diberi bobot yang jumlahnya adalah sebesar bobot variabelnya. Kemudian masing-masing indikator dibagi dalam beberapa sub indikator mempunyai bobot.
- e. Parameter dan indikator tersebut bobotnya adalah sebagai berikut:

No	Parameter	Indikator	Bobot (%)
1.	Kawasan KTM	Pengembangan Usaha	60,0
		Kependudukan	10,0
		Sarana dan prasarana	20,5
		Struktur Ruang	9,5
2.	Pusat KTM	Keterpusatan dan Fungsi pusat	15,0
		Koleksi dan Distribusi	60,0
		Pola Interaksi (intrernal & eksternal)	15,0
		Kelembagaan pengelola	10,0

3.3. PENENTUAN STATUS PERKEMBANGAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN

- a. Untuk penilaian Status Perkembangan Pusat Pertumbuhan masing-masing sub indikator diberi nilai antara 1 sampai dengan 5 dan kemudian dikalikan dengan bobot sub indikatornya.
- b. Nilai hasil Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan adalah jumlah total dari nilai indicator dikalikan bobot indikatornya (hasil perhitungan angka "a" di atas).
- c. Hasil perhitungan dari data pada point "b" di atas diklasifikasikan menjadi 5 kelas sebagai berikut:

Klas	Interval	Keterangan
I	1,0-1,90	Layanan Dasar
II	2,0-2,90	Layanan Sedang
III	3,0-3,90	Mandiri Pertama
IV	4,0-4,9	Mandiri Penuh
V	5,0	Daya Saing

3.4. Variabel dan indikator pertumbuhan KTM Mesuji

Variabel untuk pengukuran pertumbuhan dari KTM Mesuji, bertumpu dari dua pengukuran utama, yang menjadi relationship antara kawasan pertumbuhan, meliputi seluruh kawasan KTM dan desa penyangga sekitar, dan yang ke dua adalah pusat pertumbuhan secara analogi setara dengan pusat KTM. dengan demikian variabel dan indikator disajikan pada tabel.1.7

INDIKATOR TINGKAT PERKEMBANGAN KAWASAN

No	Parameter & Indikator	Bobot	Bobot	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
I. PENGEMBANGAN USAHA (60%)								
1	Komoditas unggulan sudah berkembang dengan skala usaha ekonomi kawasan (20%)	Penetapan komoditas unggulan disetarkan dengan produksi beras (X1)	5.00%	Tidak terdapat produksi komoditas unggulan	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio kurang dari 1 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan 1 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan 2 - 3 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan > 4 kali produksi berat pada satuan yang sama
		Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat (X2)	5.00%	Pendapatan masyarakat rata-rata 100-500.000/bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 501-999.000 /bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 1000.000-1.499.000 /bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 1.500.000-1.999.000 /bulan	Pendapatan petani rata-rata 2000.000-2.499.000 /bulan
		Memberikan kontribusi bagi PDRB pemerintah pada tingkat orde pemerintahan dimana komoditas tersebut berada (kecamatan / kabupaten) (X3)	5.00%	Memberikan Kontribusi 0- 5 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 6- 10 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 11-20 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 21-29 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 30- 39 % dalam sektor pertanian
		Kontuitas komoditas unggulan ke pasar sasaran (X4)	5.00%	Kurang dari 10 % kontuitas komoditas diterima pasar sasaran	10-15% kontuitas komoditas diterima pasar sasaran	15-20% kontuitas komoditas diterima pasar sasaran	20-25% kontuitas komoditas diterima pasar sasaran	>25 % kontuitas komoditas diterima pasar sasaran
2	Pengolahan Lahan (7%)	Produktifitas lahan usaha untuk komoditas unggulan (X5)	4.00%	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar <19% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 20-39% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 40-59% - dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 60-79% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 80-100% dari luas total kawasan 18000 ha
		Teknologi dan sarana produksi pengolahan lahan (X6)	3.00%	Pengolahan sepenuhnya dengan tenaga manusia	Pengolahan separoh dengan tenaga manusia, dibantu hewan	Pengolahan sepenuhnya menggunakan tenaga hewan	Pengolahan 50% dengan tenaga menggunakan alisintan dengan alisintan	Pengolahan -100 % dengan alisintan
3	Koperasi/Gapoktan (4%)	Keberadaan Koperasi / Gapoktan (X7)	2.00%	Tidak tersedia KUD/Gapoktan/KUB	KUD/KUB/ Gapoktan sedang dalam proses pembentukan	KUD/KUB/ Gapoktan sudah terbentuk, dengan dukungan sarana prasarana kelembagaan	KUD/KUB/ Gapoktan, sudah beraktifitas, belum optimal 100 %	KUD/KUB/ Gapoktan, sudah beraktifitas, belum optimal 100 %

4	Investor/Mitra Usaha (3%)	Jumlah Mitra usaha (X9)	2.00%	Tidak ada anggota	Anggota sebanyak 25 orang, belum ada aktifitas	Anggota 26-50 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul	Anggota 50-75 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul	Anggota 75- 100 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul
5	Investor Non Pertanian (2%)	Bentuk Mitra (X10)	1.00%	Tidak ada mitra usaha	Terdapat Mitra kerja tingkat local, sebanyak 2-3 mitra	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak 4-5 mitra	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak 5-6 mitra	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak >6 mitra
6	Lembaga Keuangan (Pegadaian/Bank) (5%)	Lembaga keuangan (X11)	3.00%	Tidak tersedia pegadaian ataupun bank	Terdapat Mitra kerja tingkat local, sebanyak 1 mitra usaha pertanian	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak 1-3 mitra usaha pertanian, dan 1 mitra usaha non pertanian	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak >3 mitra usaha pertanian, dan >2 mitra usaha non pertanian	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak >3 mitra usaha pertanian, dan >2 mitra usaha non pertanian
7	Terdapat Pasar: (harian, induk, grosir) (8%)	Jumlah pasar (X13)	3.00%	Tidak tersedia pasar	Terdapat bank sebanyak 1 buah	Terdapat bank 1-2 buah dan 1 pegadaian	Terdapat bank 1-2 buah dan pegadaian serta lembaga keuangan lainnya sebanyak 1 buah	Terdapat bank 1-2 buah dan pegadaian serta lembaga keuangan lainnya sebanyak 1-2 buah
		Pemanfaatan lembaga oleh masyarakat(X12)	3.00%	Tidak ada pemanfaatan lembaga	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 10-15 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 15-25 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 25-35 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh > 35 petani /hari
		Frekuensi kegiatan pasar (X15)	2.00%	Tidak ada kegiatan pasar	Kegiatan pasar harian /kalangan setiap 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian /kalangan setiap hari, dan pasar grosir setiap 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian /kalangan setiap hari, pasar grosir 1 hari dan pasar induk 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian/ kalangan setiap hari, pasar grosir 1 hari dan pasar induk 1 hari sekali
		Terdapat lembaga pengelola pasar (X14)	3.00%	Tidak terdapat lembaga pengelola	Terdapat lembaga pengelola informal (tidak resmi)	Terdapat lembaga pengelola, dengan pengurus yang lengkap tetapi tidak mengelola pasar	Terdapat lembaga pengelola, dengan pengurus yang lengkap dan kurang baik dalam mengelola pasar	Terdapat lembaga pengelola, dengan pengurus yang lengkap dan baik dalam mengelola pasar dengan

8	Pusat Bisnis, Pertokoan (4%)	Jumlah pusat bisnis (X16)	2,00%	Tidak tersedia pusat bisnis pada kawasan	Tersedia pusat bisnis sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah pusat bisnis	Tersedia pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
		Frekuensi aktifitas bisnis (X17)	2,00%	Tidak ada aktifitas bisnis	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 2 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu
9	Industri Pengolahan Hasil Panen (6%)	Jumlah industri pengolahan (X18)	3,00%	Tidak tersedia industri pengolahan hasil pertanian pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian 1 buah pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
		Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X19)	3,00%	Tidak ada aktifitas industri pengolahan pada kawasan	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu
10	Industri Olahhan yang lebih bernilai tinggi (6%)	Jumlah industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X20)	3,00%	Tidak tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
		Frekuensi aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X21)	3,00%	Tidak ada aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) pada kawasan	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu
II. Kondisi penduduk							
11	Jumlah Penduduk pada kawasan (5%)	Jumlah pada saat kajian dilaksanakan (X22)	5,00%	Jumlah penduduk < dari 2000 KK	Jumlah penduduk 2000-5000 KK	Jumlah penduduk 5000- 7000 KK	Jumlah penduduk > 9000 KK

III. Sarana prasarana									
12	Pendidikan (5%)	TK (X23)	0.50%	Tidak tersedia TK pada kawasan	Tersedia TK sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah
13		Aktifitas TK (X24)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan TK	< 50 % anak usia TK mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia TK mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia TK mengikuti pendidikan	>90 % anak usia TK mengikuti pendidikan	
14		SD (X25)	0.50%	Tidak tersedia SD pada kawasan	Tersedia SD sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah	
15		Aktifitas SD (X26)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan SD	< 50 % anak usia SD mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SD mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SD mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SD mengikuti pendidikan	
16		SMP (X27)	0.50%	Tidak tersedia SMP pada kawasan	Tersedia SMP sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SMP 1-2 buah pada kawasan	Tersedia SMP 2-3 buah pada kawasan	Tersedia SMP >3 buah pada kawasan	
17		Aktifitas SMP (X28)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan SMP	< 50 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	
18		SMA (X29)	1.00%	Tidak tersedia SMA pada kawasan	Tersedia SMA sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SMA 1-2 buah pada kawasan	Tersedia SMA 2-3 buah pada kawasan	Tersedia SMA >3 buah pada kawasan	
19		Aktifitas SMA (X30)	1.00%	Tidak ada aktifitas pendidikan SMA	< 50 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	
20	Kesehatan (5%)	Jumlah Pustu/polides (X31)	0.50%	Tidak tersedia Pustu pada kawasan	Tersedia Pustu sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Pustu 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Pustu 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Pustu >3 buah pada kawasan	
21		Penggunaan Pustu/ Polides oleh Masyarakat (X32)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan Pustu	< 50 % masyarakat memanfaatkan Pustu	50-70 % masyarakat memanfaatkan Pustu	70-90 % masyarakat memanfaatkan Pustu	>90 % masyarakat memanfaatkan Pustu	
22		Jml Puskesmas (X33)	1.00%	-	-	Tersedia 1 puskesmas	Tersedia 1-2 Puskesmas	Tersedia Puskesmas 1-2 dengan fasilitas Rawat inap	
23		Penggunaan Puskesmas oleh Masyarakat (X34)	1.00%			< 50 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas	50-70 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas	70-90 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas dan rawat inap	
24		Rumah sakit tipe C (X35)	1.00%					Terdapat 1 RS tipe C	

25	Penggunaan RS oleh Masyarakat (X36)	1.00%		Penduduk <50% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk 50% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk 50-80% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk >80% menggunakan layanan RS tipe C
26	Peribadatan (2%)	0.25%	Tidak tersedia Mesjid kecil pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid >3 buah pada kawasan
27	Penggunaan Mesjid Kecil oleh Masyarakat (X38)	0.25%	Tidak ada aktifitas layanan Mesjid kecil	< 50 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	50-70 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	70-90 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	>90 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil
28	Jml Mesjid Besar (X39)	0.25%	-	-	Tersedia 1 Mesjid Besar	Tersedia 1-2 Mesjid Besar	Tersedia >2 Mesjid Besar
29	Penggunaan Mesjid Besar oleh Masyarakat (X40)	0.25%		< 50 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	< 50 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	50-70 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	70-90 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar
30	Islamic Centre (X41)	0.50%					Terdapat 1 Islamic Centre
31	Penggunaan Islamic Center oleh Masyarakat (X42)	0.50%		Penduduk <50% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk 50% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk 50-80% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk >80% menggunakan layanan Islamic Centre
32	Terminal Lokal (X43)	1.00%	Tidak tersedia terminal local pada kawasan	Tersedia terminal local sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia terminal local 1-2 buah pada kawasan	Tersedia terminal local 2-3 buah pada kawasan	Tersedia terminal local >3 buah pada kawasan
33	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X44)	1.00%	Tidak ada aktifitas layanan terminal local	< 50 % masyarakat memanfaatkan terminal local	50-70 % masyarakat memanfaatkan terminal local	70-90 % masyarakat memanfaatkan terminal local	>90 % masyarakat memanfaatkan terminal local
34	Antar Daerah (X45)	1.00%					Tersedia terminal antar daerah 1-2 buah pada kawasan
35	Penggunaan terminal oleh masyarakat (X46)	1.00%		< 50 % masyarakat memanfaatkan terminal local	50-70 % masyarakat memanfaatkan terminal local	70-90 % masyarakat memanfaatkan terminal local	>90 % masyarakat memanfaatkan terminal local
36	Kantor polisi (2%)	0.50%	Tidak tersedia Pos polisi pada kawasan	Tersedia Pos polisi sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi >3 buah pada kawasan
37	Akifitas pos/Pelayanan pada masyarakat (X48)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan Pos polisi	< 50 % masyarakat memanfaatkan Pos polisi	50-70 % masyarakat memanfaatkan Pos polisi	70-90 % masyarakat memanfaatkan Pos polisi	>90 % masyarakat memanfaatkan Pos polisi

LAMPIRAN.3.b. INDIKATOR TINGKAT PUSAT PERTUMBUHAN

I. Variabel 1: Keterpusatan & fungsi Pusat

No	Parameter & Indikator	Indikator	Bobot	Nilai				
				1	2	3	4	5
1	Keterpusatan dan Fungsi Pusat	Jumlah penduduk di SKP – Pusat pertumbuhan (X1)	10.00%	Jumlah penduduk <1000- KK	Jumlah penduduk 1000-1500 KK	Jumlah penduduk 1500- 2000 KK	Jumlah penduduk > 2000 KK	Jumlah penduduk > 2000 KK
2	Ketersedian komoditas diusahakan masyarakat petani	Komoditas diunggulkan petani (x2)	3.00%	Tidak terdapat produksi komoditas unggulan	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio kurang dari 1 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan 1 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan 2 - 3 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan > 4 kali produksi berat pada satuan yang sama
		Memberikan kontribusi pendapatan petani (x3)	2.00%	Pendapatan masyarakat rata-rata 100-500.000//bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 501-999.000//bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 1000.000 - 1.499.000 /bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 1.500.000-1.999.000 /bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 2000.000-2.499.000 /bulan

II. Variabel 2: Sarana dan Prasarana

No	Parameter & Indikator	Indikator	Bobot	Nilai				
				Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
3	SARANA DAN PRASARANA (60)	indikator						
4	Pendidikan (5)	TK (X4)	0.50%	Tidak tersedia TK pada pusat pertumbuhan	Tersedia TK sebanyak 1 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia TK di setiap pada pusat pertumbuhan dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia TK pada pusat pertumbuhan dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia TK pada pusat pertumbuhan dengan rata-rata >3 buah
5		Aktifitas TK (X5)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan TK	< 50 % anak usia TK mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia TK mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia TK mengikuti pendidikan	>90 % anak usia TK mengikuti pendidikan
6		SD (X6)	0.50%	Tidak tersedia SD pada pusat pertumbuhan	Tersedia SD sebanyak 1 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia SD pada pusat pertumbuhan dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia SD pada pusat pertumbuhan dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia SD pada pusat pertumbuhan dengan rata-rata >3 buah

7	Aktifitas SD (X7)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan SD pertumbuhan	< 50 % anak usia SD mengikuti pendidikan pada pusat pertumbuhan	50-70 % anak usia SD mengikuti pendidikan pada pusat pertumbuhan	70-90 % anak usia SD mengikuti pendidikan pada pusat pertumbuhan	>90 % anak usia SD mengikuti pendidikan pada pusat pertumbuhan
8	SMP (X8)	1.00%	Tidak tersedia SMP pada pusat pertumbuhan	Tersedia SMP sebanyak 1 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia SMP 1-2 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia SMP 2-3 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia SMP >3 buah pada pusat pertumbuhan
9	Aktifita (X9)	1.00%	Tidak ada aktifitas pendidikan SMP	< 50 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SMP mengikuti pendidikan
10	SMA/SMK (X10)	1.00%	Tidak tersedia SMA pada pusat pertumbuhan	Tersedia SMA sebanyak 1 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia SMA 1-2 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia SMA 2-3 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia SMA >3 buah pada pusat pertumbuhan
11	Aktifitas SMA (X11)	1.00%	Tidak ada aktifitas pendidikan SMA	< 50 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SMA mengikuti pendidikan
12	Akademi/poli (X12)	0.50%	Tidak tersedia akademi/poli pada pusat pertumbuhan	Tersedia akademi/poli sebanyak 1 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia akademi/poli 1-2 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia akademi/poli 2-3 buah pada pusat pertumbuhan	Tersedia akademi/poli >3 buah pada pusat pertumbuhan
13	Aktifitas (X13)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan akademi/poli	< 50 % anak usia akademi/poli mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia akademi/poli mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia akademi/poli mengikuti pendidikan	>90 % anak usia akademi/poli mengikuti pendidikan
14	Kesehatan (5%) Jumlah Pustu (X14)	1.00%	Tidak tersedia Pustu pada kawasan	Tersedia Pustu sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Pustu 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Pustu 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Pustu >3 buah pada kawasan
15	Penggunaan Pustu oleh Masyarakat (X15)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan Pustu	< 50 % masyarakat memanfaatkan Pustu	50-70 % masyarakat memanfaatkan Pustu	70-90 % masyarakat memanfaatkan Pustu	>90 % masyarakat memanfaatkan Pustu
16	Jml Puskemas (X16)	1.00%	-	-	Tersedia 1 puskesmas	Tersedia 1-2 Puskemas	Tersedia Puskemas 1-2 dengan fasilitas Rawat inap
17	Penggunaan Puskemas oleh Masyarakat (X17)	0.50%	-	< 50 % masyarakat memanfaatkan Puskemas	50-70 % masyarakat memanfaatkan Puskemas	70-90 % masyarakat memanfaatkan Puskemas	>90 % masyarakat memanfaatkan Puskemas dan rawat inap
18	Rumah sakit tipe C (X18)	1.00%	-	-	-	-	Terdapat 1 RS tipe C
19	Penggunaan RS oleh Masyarakat (X19)	1.00%	-	Penduduk <50% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk 50% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk 50-80% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk >80% menggunakan layanan RS tipe C

20	Perbadatan (2%)	Jumlah Mesjid kecil (X20)	0.25%	Tidak tersedia Mesjid kecil pada pertumbuhan	Tersedia Mesjid kecil sebanyak 1 buah pada pertumbuhan	Tersedia Mesjid kecil 1-2 buah pada pertumbuhan	Tersedia Mesjid kecil 2-3 buah pada pertumbuhan	Tersedia Mesjid >3 buah pada pertumbuhan
21		Penggunaan Mesjid kecil oleh Masyarakat (X21)	0.25%	Tidak ada aktifitas layanan Mesjid kecil	< 50 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	50-70 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	70-90 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	>90 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil
22		Jmi Mesjid besar (X22)	0.25%	-	-	Tersedia 1 Mesjid Besar	Tersedia 1-2 Mesjid Besar	Tersedia >2 Mesjid Besar
23		Penggunaan Mesjid Besar oleh Masyarakat (X23)	0.25%			< 50 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	50-70 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	70-90 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar
24		Islamic Centre (X24)	0.50%					Terdapat 1 Islamic Centre
25		Penggunaan oleh masyarakat (X25)	0.50%		Penduduk <50% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk 50% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk 50-80% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk >80% menggunakan layanan Islamic Centre
26	Terminal (2%)	Lokai (X26)	0.50%	Tidak tersedia terminal local pada kawasan	Tersedia terminal local sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia terminal local 1-2 buah pada kawasan	Tersedia terminal local 2-3 buah pada kawasan	Tersedia terminal local >3 buah pada kawasan
27		Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X27)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan terminal local	< 50 % masyarakat memanfaatkan terminal local	50-70 % masyarakat memanfaatkan terminal local	70-90 % masyarakat memanfaatkan terminal local	>90 % masyarakat memanfaatkan terminal local
28		Antar Daerah (X28)	0.50%					Tersedia terminal antar daerah 1-2 buah pada kawasan
29		Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X29)	0.50%		< 50 % masyarakat memanfaatkan terminal local	50-70 % masyarakat memanfaatkan terminal local	70-90 % masyarakat memanfaatkan terminal local	>90 % masyarakat memanfaatkan terminal local
30	Kantor polisi I (2%)	Pos polisi (X30)	0.50%	Tidak tersedia Pos polisi pada kawasan	Tersedia Pos polisi sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi >3 buah pada kawasan
31		Pelayanan untuk masyarakat (X31)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan Pos polisi	< 50 % masyarakat dilayani Pos polisi	50-70 % masyarakat dilayani Pos polisi	70-90 % masyarakat dilayani Pos polisi	>90 % masyarakat dilayani Pos polisi
32		Polsek (X32)	0.50%					Tersedia Polsek 1-2 buah pada kawasan
33		Pelayanan masyarakat (X33)	0.50%		< 50 % masyarakat dilayani Polsek	50-70 % masyarakat dilayani Polsek	70-90 % masyarakat dilayani Polsek	>90 % masyarakat dilayani Polsek

34	KUD/KUB/Gapoktan (3%)	Keberadaan KUD/KUB/Gapoktan (X34)	2.00%	Tidak tersedia KUD/Gapoktan / KUB	KUD/KUB/ Gapoktan sedang dalam proses pembentukan	KUD/KUB/ Gapoktan sudah terbentuk, dengan dukungan sarana prasarana kelembagaan	KUD/KUB/ Gapoktan, sudah beraktifitas, belum optimal 100 %	KUD/KUB/ Gapoktan, sudah beraktifitas, belum optimal 100 %
35		Aktifitas anggota (X35)	1.00%	Tidak ada anggota	Anggota sebanyak 25 orang, belum ada aktifitas	Anggota 26-50 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul	Anggota 50-75 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul	Anggota 75- 100 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul
36	Investor/Mitra Usaha (3%)	Jumlah Mitra usaha (X36)	3.00%	Tidak ada mitra usaha	Terdapat Mitra kerja lokal, sebanyak 2-3 mitra	Mitra kerja setempat lokal dan regional, sebanyak 4-5 mitra	Mitra kerja setempat lokal dan regional, sebanyak 5-6 mitra	Mitra kerja setempat lokal dan regional, sebanyak >6 mitra
37	Investor Non Pertanian (2%)	Bentuk mitra (X37)	2.00%	Tidak ada mitra usaha	Terdapat Mitra kerja lokal, sebanyak 1 mitra usaha pertanian	Mitra kerja setempat lokal dan regional, sebanyak 1-3 mitra usaha pertanian, dan 1 mitra usaha non pertanian	Mitra kerja setempat lokal dan regional, sebanyak >3 mitra usaha pertanian, dan >2 mitra usaha non pertanian	Mitra kerja setempat lokal dan regional, sebanyak >3 mitra usaha pertanian, dan >2 mitra usaha non pertanian
38	Lembaga Keuangan (Pegadaian/Bank) (5%)	Lembaga keuangan (X38)	2.00%	Tidak tersedia pegadaian ataupun bank	Tersedia bank sebanyak 1 buah	Tersedia Bank 1-2 buah dan 1 pegadaian	Tersedia Bank 1-2 buah dan pegadaian serta lembaga keuangan lainnya sebanyak 1 buah	Tersedia Bank 1-2 buah dan pegadaian serta lembaga keuangan lainnya sebanyak 1-2 buah
39		Pemanfaatan lembaga (X39)	3.00%	Tidak ada pemanfaatan lembaga	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilaksanakan oleh 10-15 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 15-25 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 25-35 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh > 35 petani /hari
40	Terdapat Pasar: (harian, induk, grosir) (3%)	Jumlah pasar (X40)	1.00%	Tidak tersedia pasar	Tersedia pasar harian untuk kawasan sebanyak 1-2 buah	Tersedia pasar harian grosir, dan 1 pasar induk	Tersedia pasar harian 1-2 buah dan 1 pasar grosir, dan 1 pasar induk	Tersedia pasar harian 1-2 buah dan 1 pasar grosir, dan 1 pasar induk
41		Frekuensi kegiatan pasar (X41)	2.00%	Tidak ada kegiatan pasar	Kegiatan pasar harian /kalangan setiap 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian/ kalangan dan pasar grosir setiap 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian/ kalangan setiap hari, pasar grosir 1 hari dan pasar induk 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian/ kalangan setiap hari, pasar grosir 1 hari dan pasar induk >3 buah pusat bisnis
42	Pusat Bisnis: Petokoan (3%)	Jumlah pusat bisnis (X42)	1.00%	Tidak tersedia pusat bisnis pada kawasan	Tersedia pusat bisnis sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah pusat bisnis	Tersedia pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah pusat bisnis	Tersedia pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis

43		Frekuensi aktifitas bisnis (X43)	2.00%	Tidak ada aktifitas bisnis	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 2 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap minggu
44	Industri Pengolahan Hasil Panen	Jumlah industri pengolahan (X44)	1.00%	Tidak tersedia industri pengolahan hasil pertanian pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian 1 buah pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
45		Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X45)	2.00%	Tidak ada aktifitas industri pengolahan pada kawasan	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 2 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu
46	Industri Olahraga yang lebih bernilai tinggi (3%)	Jumlah industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X46)	1.00%	Tidak tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
47		Frekuensi aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X47)	2.00%	Tidak ada aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) pada kawasan	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap 2 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu
48	Listrik (6%)	Diesel (X48)	1.00%	Tidak tersedia diesel pada kawasan	Tersedia diesel sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia diesel 1-2 buah pada kawasan	Tersedia diesel 2-3 buah pada kawasan	Tersedia diesel >3 buah pada kawasan
49		Penggunaan diesel oleh Masyarakat (X49)	2.00%	Tidak ada aktifitas layanan diesel	< 50 % masyarakat memanfaatkan diesel	50-70 % masyarakat memanfaatkan diesel	70-90 % masyarakat memanfaatkan diesel	>90 % masyarakat memanfaatkan diesel
50		Jml PLN (50)	1.00%	-	-	-	-	Tersedia 1 Pembangkit PLN
51		Penggunaan PLN oleh Masyarakat (X51)	2.00%	-	< 50 % masyarakat memanfaatkan PLN	50-70 % masyarakat memanfaatkan PLN	70-90 % masyarakat memanfaatkan PLN	70-90 % masyarakat memanfaatkan PLN

52	Telekomunikasi (2%)	Seluler (X52)	2.00%	Tidak tersedia seluler di PP	Tersedia seluler dengan 1 operator	Tersedia seluler dengan 1-2 operator	Tersedia seluler dengan 2-3 operator	Tersedia seluler dengan >3 operator
53	Air Bersih (4%)	Kualitas setara MCK (X53)	4.00%	Kualitas di bawah standar air minum maupun setara MCK	Kualitas air bersih secara Fisik memenuhi syarat, Biologis dan kimia belum	Kualitas air bersih secara Fisik dan Biologis memenuhi syarat	Kualitas air bersih secara kimia dan Biologis memenuhi syarat	Kualitas air bersih secara fisik, kimia, dan biologis memenuhi syarat
54	Komposisi luas lahan terbangun (5%)	Luas lahan terbangun (X54)	5.00%	Luas lahan terbangun < 19 % dari PP	Luas lahan terbangun 20-39 % dari luas PP	Luas lahan terbangun 40-59% dari luas PP	Luas lahan terbangun 60-79% dari luas PP	Luas lahan terbangun >80 %
IV. Keterhubungan inter dan antar								
55	Keterhubungan dalam kawasan (10%)	Akses dalam kawasan (X55)	4.00%	Jalan tidak memiliki akses dengan simpul lain	< 20% jalan sudah terbentuk jaringan jalan	20-50% jalan sudah terhubung	50- 80% jalan sudah terhubung	> 80 % jalan sudah terhubung
56		Perkerasan (X56)	5.00%		<20% terhubung dan diperkeras	20-50% jalan sudah terhubung, diperkeras	50- 80% jalan sudah terhubung diperkeras	> 80 % jalan sudah terhubung diperkeras
57		Angkutan (X57)	1.00%			Tersedia Ojek	Tersedia kendaraan umum colt dan ojek	Tersedia kendaraan umum colt maupun bis
58	Keterhubungan antar kawasan (5%)	Akses dan kondisi (X58)	3.00%	Jalan terhubung ataupun jalan air			Jalan 50-75 % dari PP sudah diaspal Hotmix	Jalan > 80 % dari PP sudah diaspal Hotmix
59		Angkutan (x59)	2.00%					Angkutan tersedia Bis umum atau kendaraan roda 4 lainnya
60	Kelembagaan Pengelolaan (10%)	Badan Peengelola KTM (X60)	3.00%	Tidak ada dukungan lembaga	Ada lembaga adhoc di kawasan Transmigrasi (PP)	Terdapat lembaga pengelola sesuai PP 39/2009	Terdapat BLU pada PP	Angkutan tersedia Bis umum atau kendaraan roda 4 lainnya
61		Lembaga Pengelola (X61)	3.00%	Tidak terdapat kelembagaan pengelola pasar	Terdapat lembaga pengelola Pasar dan Pusat agro	Terdapat lembaga pengelola Pusat industri dan Pusat Bisnis	Terdapat lembaga pengelola Pusat industri olahan, Pusat Bisnis dan Pusat pelatihan dan penyuluhan agribisnis	Terdapat lembaga pengelola Pusat industri olahan, Pusat Bisnis, Pusat pelatihan dan penyuluhan agribisnis
62		Lembaga social, seni budaya, mental spiritual, wasdal (X62)	4.00%	Tidak tersedia lembaga social, budaya	Terdapat lembaga social, dan seni budaya	Terdapat lembaga social, seni budaya dan mental spiritual	Terdapat lembaga social, seni budaya dan mental spiritual, dan lembaga wasdal	Terdapat lembaga social, seni budaya dan mental spiritual dan lembaga wasdal dan lembaga wasdal pembangunan
			100.00%					

3.5. Teknik penentuan sampel

Pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Yamano, jika populasi diketahui, maka rumus yang diberlakukan adalah:

$$n = N/Nd^2 + 1$$

di mana n = jumlah sampel yang dibutuhkan, N = jumlah populasi, dan d^2 , dengan nilai = 0,01, dari populasi pelaksana KTM dan pelaku di tingkat unit analisis sebanyak 25 orang, maka di peroleh jumlah responden yang akan dijadikan informan sebesar 19 orang informan kunci, yang diambil dengan ciri karakter personal yang memahami *roadmap* terbentuknya KTM dan sekaligus adalah pelaku yang masih terlibat aktif, baik sebagai pelaksana, maupun masyarakat pelaku. sehingga secara hirarkhis teknik pengambilan adalah sebagai berikut:

Fokus grup	Masyarakat di KTM Mesuji
Stratum/Kelompok grup	Pengelola KTM Tokoh masyarakat Pelaku di tingkat masyarakat
Unit analisis	Pelaksana di tingkat lapangan Pelaku di tingkat masyarakat

3.6. Analisis

Pelaksanaan analisis untuk mengukur pusat pertumbuhan KTM Mesuji, dengan pendekatan bauran antara kuantitatif dan kualitatif. Hal ini nampak dari pengubahan variabel konseptual pada variabel Kawasan pertumbuhan maupun pusat pertumbuhan. demikian pula halnya dalam melaksanakan analisis strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan KTM,

Analisis kuantitatif dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama untuk mengukur klasifikasi deskriptif (menggunakan

analisis deskriptif), dari pertumbuhan KTM batu betumpang, dengan cara nilai untuk setiap indikator adalah nilai = bobot (%) * score

Total nilai untuk Kawasan Pertumbuhan = \sum bobot (%) * score, demikian pula untuk nilai dari Pusat Pertumbuhan KTM = \sum bobot (%) * score. hasil akhir dari dua nilai akan di konversikan pada klasifikasi kawasan pertumbuhan KTM Mesuji, sebagai berikut:

Klas	Interval	Keterangan
I	1,0-1,90	Layanan Dasar
II	2,0-2,90	Layanan Sedang
III	3,0-3,90	Mandiri Pertama
IV	4,0-4,9	Mandiri Penuh
V	5,0	Daya Saing

Selanjutnya dengan mempergunakan analisis regresi linier akan diperhitungkan faktor ataupun indikator yang berpengaruh bagi pertumbuhan kawasan, dengan menggunakan perumusan fungsi sebagai berikut:

$$\text{Kawasan Pertumbuhan} = F (a + b_1X_1 + \dots + b_nX_n)$$

$$\text{Pusat pertumbuhan} = F1(a_1 + b_{11}X_{11} + \dots + b_{nm}X_{nm})$$

Cara lain untuk mengenali *relationship* antara fungsi pusat pertumbuhan maupun kawasan pertumbuhan dilihat dari score yang diperoleh dari hasil opini informan, dan atau pun responden. Tahap ke dua, mengenali kelemahan, kekuatan dan pengaruh lingkungan kebijakan dianalisis dengan SWOT, sehingga akan disusun dalam bentuk Perencanaan jangka pendek, maupun jangka menengah, sekaligus program akselerasi pembangunan pertumbuhan kawasan KTM Mesuji.

1.8. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Sesuai dengan lingkup pekerjaan tahapan pelaksanaan pekerjaan dalam hal ini adalah evaluasi perkembangan pusat pertumbuhan KTM Mesuji, di mana dalam melaksanakan evaluasi melalui tahapan:

1. Melaksanakan survei identifikasi dari aspek pusat kawasan dan aspek pusat KTM, dengan titik pokok adalah *existing condition*, di mana aspek yang terkait dengan kawasan dicirikan dengan indikator pengembangan usaha, penduduk, dan sarana prasarana serta fasilitas umum.
2. Pelaksanaan pengumpulan data primer dan data sekunder, di mana dengan metode wawancara mendalam untuk informan kunci, dan kuisioner untuk responden meliputi kelompok petani, pedagang, usaha jasa lainnya, dengan mengambil 20 responden di kawasan dan 20 responden di pusat pertumbuhan KTM. Sedangkan untuk pemahaman data empirik mengenai lokasi KTM Mesuji, dilaksanakan dengan cara *Focus Group Discussion*.
3. Pelaksanaan analisis data di mana analisis dilaksanakan secara bauran kualitatif dan kuantitatif, di mana dalam kualitatif analisis *roadmap* dipergunakan untuk mengenali *expected value* dari KTM Mesuji, sedangkan untuk indikator pusat kawasan dan pusat pertumbuhan dengan menggunakan indikator Evaluasi (Pedoman evaluasi pusat pertumbuhan KTM (Dit. Penyerasian Lingkungan Ditjen P2MKT, 2010).
4. Pelaksanaan analisis strategis dengan pendekatan SWOT, untuk menyusun perencanaan lima tahunan dalam usaha akselerasi pertumbuhan KTM Mesuji.

1.9. Keluaran yang dihasilkan

1. Terancangnya desain kajian evaluasi pusat pertumbuhan KTM Mesuji, dengan konsep berpikir dan konsep akselerasi pertumbuhan dengan pendekatan roadmap, dengan tolok ukur menggunakan indikator evaluasi pusat pertumbuhan kawasan.
2. Terlaksananya kegiatan evaluasi pusat pertumbuhan KTM Mesuji, meliputi pusat kawasan dan pusat pertumbuhan.
3. Terukurnya pusat pertumbuhan kawasan KTM Mesuji.
4. Terencananya akselerasi pusat pertumbuhan yang disusun dalam perencanaan kegiatan dalam strategi program (*action program*) jangka pendek dan jangka menengah.

1.10. Sistematika Penyajian

No	Bab	Sub Bab	Uraian
1	I	Pendahuluan	Berisikan latar belakang,tujuan dan sasaran, lingkup kegiatan,lokasi ,Metode pelaksanaan, luaran yang dihasilkan
2	II	Gambaran umum wilayah	Berisikan gambaran umum wilayah kajian pusat pertumbuhan kawasan KTM Mesuji kabupaten Mesuji Provinsi Lampung
3	III	Analisis dan Pembahasan	Analisis isi dan kelengkapan dari aspek evaluasi pusat kawasan serta pusat pertumbuhan KTM Mesuji, dilengkapi dengan strategi program pengembangan KTM Mesuji
4	IV	Kesimpulan dan rekomendasi	Kesimpulan yang menjawab secara kronologis dari tujuan penelitian, dilengkapi dengan rekomendasi program 5 tahun ke depan KTM Mesuji

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN

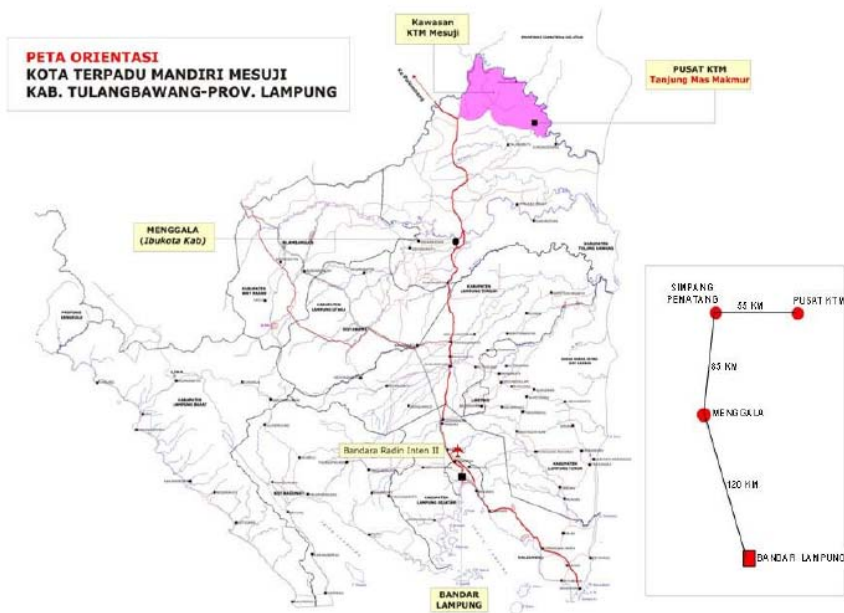
2.1 Letak Geografis dan Batas Kawasan

Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji secara administratif meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mesuji dengan Ibukota Wiralaga dan Kecamatan Mesuji Timur dengan Ibukota Tanjung Mas Makmur, terdapat di Kabupaten Mesuji (setelah pemekaran, sebelumnya berada di Kabupaten Tulang Bawang). Letak geografis pada posisi 03°45'–04°5' Lintang Selatan dan 105°07'–105°38' Bujur Timur. Luas kawasan ini adalah ... ha dan Lokasi transmigrasi yang termasuk KTM adalah Kawasan Transmigrasi Mesuji Atas yang terdiri dari Satuan Pemukiman (SP) 1 s/d 13, dan Kawasan Mesuji terdiri dari Satuan Pemukiman (SP) 1 s/d 3, serta Kawasan Mesuji A, B, C, D dan F di bagian selatan kampung S. Cambai.

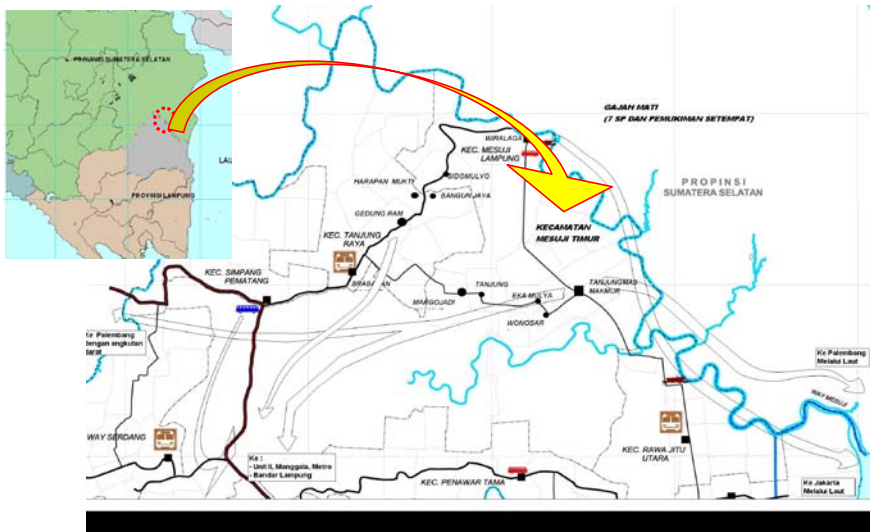
Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji berada di wilayah Provinsi Lampung, terdiri atas 24 kecamatan, 240 kampung/kelurahan, terhitung sejak keluarnya Perda No. 07 Tahun 2005 (BPS, 2006). Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah 7.770,84 Km² atau 22 % dari luas keseluruhan Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang terletak pada jalur jalan nasional yaitu jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Kota Bandar Lampung dengan kota-kota utama di Pulau Sumatera, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 dan 2.2 di bawah ini.

Saat ini Kabupaten Tulang Bawang mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten, yaitu Tulang Bawang sebagai kabupaten induk, Mesuji dan Tulang Bawang Barat, sebagai kabupaten baru. KTM Mesuji sekarang menjadi masuk di Kabupaten Mesuji. Sebagai

kabupaten baru, wilayah Kabupaten Mesuji meliputi 7 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Mesuji Timur, Rawa Jitu Utara, Way Serdang, Panca Jaya, dan Kec. Simpang Pematang. Dua di antara 7 kecamatan, sebagian besar wilayahnya masuk sebagai kawasan KTM, yaitu wilayah Kecamatan Mesuji dan Mesuji Timur. Desa-desa (kampung) yang masuk ke dalam Kawasan KTM mencakup 5 Desa/kampung, yaitu:



Gambar 2.1: Peta Lokasi KTM Mesuji Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung



Gambar 2.2: Kawasan KTM Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Wiralaga I dan II, Nipah Kuning, Sungai Badak, dan sebagian Kampung Sido Mulyo di Kecamatan Mesuji; dan 10 kampung: Margo Jadi, Tanjung Menang, Tanjung Mas Makmur, Tanjung Mas Jaya, Eka Muya, Muara Mas, Tanjung Mas Mulya, Dwikarya Mustika, Wonosari, dan Pangkal Mas Jaya, dengan Pusat KTM ada di Kampung (Desa) Tanjung Mas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur.

Pencapaian ke kawasan dapat ditempuh melalui jalan darat dengan jarak dari Ibukota Kabupaten ke kawasan KTM (Tanjung Mas Makmur) sekitar 102 km dengan kondisi jalan nasional sampai di Brabasan cukup baik. Sedangkan mulai dari Brabasan ke kawasan KTM, meski pun berupa jalan beraspal, tetapi kondisi jalannya relatif buruk (diperkeras lapis aspal berlubang dan tanpa perkerasan).

Aksesibilitas pencapaian ke lokasi pusat Pertumbuhan KTM Mesuji

Dari	Tujuan	Jarak /waktu	Keterangan
Jakarta	Lampung	55 menit	Pesawat reguler
Lampung	Tulang Bawang	125 km	Ibu kota kabupaten dengan kendaraan darat
Tulangbawang	Wiralaga	102 km	Kendaraan darat
Tulangbawang	Tanjung Mas Makmur	117 km	Kendaraan darat

Sumber: Astek Pembangunan KTM (2010), Dit. PU, 2011

Kondisi eksisting di lapangan desa-desa utama cenderung menunjukkan skala pelayanan lokal desa yang bersangkutan, sebagaimana pusat-pusat desa lainnya. Semua desa utama berjarak lurus dengan Pusat KTM masih dalam radius ± 20 km, dalam kondisi jalan kering (tidak berlumpur karena hujan) perjalanan dari Pusat KTM ke tiga desa utama Muara Mas, Sumber Makmur, dan Margojadi dapat ditempuh dengan kendaraan motor roda dua dalam waktu 15 s/d 30 menit, kecuali Kampung Wiralaga, karena masih terputus. Sedangkan jalan ke Wilaralaga lewat darat dari Pusat KTM – Brabasan – Sido Mulyo – Wiralaga I, dengan kondisi jalan saat ini (rusak) dapat ditempuh dalam waktu 3 jam, begitu pula lewat air Sungai Buaya ke Wiralaga II. Pusat pelayanan wilayah secara makro (Kecamatan Mesuji dan Mesuji Timur) saat ini adalah Kampung Muara Tenang yang dikenal masyarakat dengan Unit-II. Kebutuhan primer dan sekunder masyarakat umumnya dipenuhi dari pasar yang berada di Muara Tenang (Unit-II).

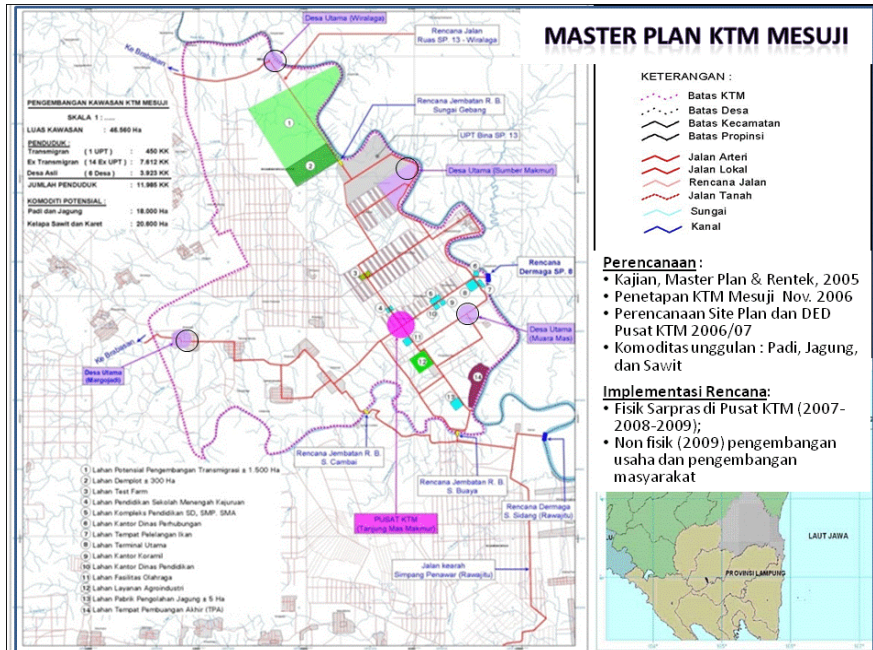
Dengan melihat realitas ini, maka dari sisi struktur ruang (sistem pusat-pusat pelayanan) kawasan KTM ini cukup dilayani oleh satu Pusat KTM dan Pusat-pusat Desa yang ada sekarang. Perkembangan selanjutnya akan berjalan sesuai dengan

perkembangan jumlah penduduk yang ada masing-masing desa (kampung). Namun untuk percepatan pertumbuhan sangat diperlukan jaringan infrastruktur transportasi, terutama jalan darat yang diperkeras sehingga mudah untuk dilalui pejalan kaki dan kendaraan.

Sistem struktur pusat-pusat di dalam kawasan KTM terdiri atas 3 (tiga) hierarki, yaitu Hierarki I, II, dan Hierarki III. Pusat Hierarki I adalah Pusat KTM, yaitu di Desa Tanjungmas Makmur (SP.6), berfungsi sebagai:

- a. Pusat kegiatan ekonomi yang melayani seluruh kawasan rencana, dan
- b. Pusat kota dan pusat kegiatan administrasi yang melayani kawasan KTM.

Pusat Hierarki II adalah desa-desa utama Margodadi, SP8, SP 11 dan Wiralaga, berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal yang mempunyai lingkup pengaruh terhadap desa-desa di sekitarnya (setara Pusat Satuan Permukiman = SKP), hirarki III adalah Pusat Desa yang memberikan pelayanan kepada desanya sendiri (setara Pusat Satuan Permukiman = SP).



Gambar 2.3. Peta Struktur Ruang Sistem Pusat2 Kawasan KTM Mesuji

2.2. Topografi dan Geologi Kawasan KTM Mesuji

Ketinggian kawasan ini berkisar dari 0 sampai 90 m di atas permukaan laut. Kawasan ini sebelah barat memiliki topografi berombak sampai berbukit, dengan kemiringan berkisar antara 3 sampai 30% seluas 2.15%. Sebelah timur di sepanjang aliran sungai Mesuji, topografinya relatif datar dengan kemiringan berkisar antara 0 – 3% seluas 97.85%. Kawasan ini tersusun dari formasi geologi Aluvium (Qa), Pasir Kuarsa (Qak), Endapan Rawa (Qs), Formasi Kasai (Qtk), dan Formasi Muaraenim (Tmpm). Formasi geologi yang paling luas adalah Formasi Muaraenim (Tmpm) Areal di mana lokasi transmigrasi berada terutama tersusun atas formasi geologi Aluvium dan Endapan Rawa

2.3. Penggunaan Lahan, Jenis Tanah, dan Kesesuaian lahan

Penggunaan lahan meliputi perkebunan kelapa sawit, karet, perkebunan rakyat, sawah dan tegalan, lahan terbuka serta rawa. Perkebunan kelapa sawit pada umumnya milik swasta dalam skala besar, diantaranya milik PT. Barat Selatan Makmur Investindo (PT. BSMI/PT. LIP), PT. Bumi Waras (PT. BW), dan PT. LA serta PT. Budi Dwiyasa. Luasan kawasan yang dialokasikan pada wilayah perencanaan adalah seluas 109,302.23 ha meliputi kawasan lindung (8,373.19 ha), Lahan Terbuka (1,046.42 ha), Pemukiman (4,023.53 ha), Pengembangan Akasia (411.50 ha), Pengembangan Perkebunan Besar (Kelapa Sawit) (24,806.47 ha), Pengembangan Tanaman Jagung (8,354.29 ha), Pengembangan Tanaman Pangan Padi (10,154.11 ha), Pengembangan Tanaman Pangan palawija (2,584.16 ha) dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Kelapa Sawit atau Karet) (49,548.57 ha). Sedangkan alokasi untuk KTM seluas 47,285.75 meliputi Kawasan Lindung (4,102.06 ha), Pemukiman (1,790.35 ha), Pengembangan Perkebunan Besar (Kelapa Sawit) (8,921.54 ha), Pengembangan Tanaman Pangan Jagung (8,347.71 ha), Pengembangan Tanaman Pangan Padi (10,100.94 ha), Pengembangan Tanaman Pangan palawija (2,484.06 ha), dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat (Kelapa Sawit atau Karet) (11,539.09 ha).

Kawasan ini tersusun atas 7 sistem lahan yaitu Gambut, Kahayan, Kajapah, Klaru, Muara Beliti, Mendawai, dan Putting. Sistem lahan yang memiliki luasan terbesar adalah sistem lahan Muara Beliti yaitu seluas 254.781.68 hektar atau 55,83 % dari seluruh kawasan. Jenis tanah digolongkan dalam tiga kelompok besar yaitu kelompok tanah lahan kering, kelompok tanah lahan basah yang memiliki ciri hidromorfik dan kelompok tanah gambut. Kelompok tanah lahan kering berada di bagian barat dan kelompok tanah lahan basah berada di bagian timur. Hasil analisis kesesuaian lahan di kawasan ini menghasilkan zonasi wilayah

pengembangan yang berkisar dari sangat sesuai (S1) sampai tidak sesuai (N). Untuk pengembangan tanaman budidaya yang dinilai cukup sesuai adalah kelapa sawit, karet, padi, jagung dan singkong.

2.4. Kondisi Sosial ekonomi

Mata pencaharian pokok yang dominan adalah bekerja pada sektor perkebunan yaitu sebesar 81,54% dari total penduduk, diikuti oleh sektor pertanian (8,32%), sektor jasa (4,9%). Tingkat pendidikan SD–SLTP mencapai > 75% dari jumlah penduduk. Tingkat partisipasi pendidikan SD mencapai 100%, untuk SLTP mencapai 90%, sedangkan SLTA hanya 65%. Pergerakan ke dalam (*in migration*) terjadi pada aktivitas perdagangan, sedangkan pergerakan keluar (*out migration*) terjadi pada pencarian lapangan pekerjaan (Astek, 2010). Mata pencaharian pokok yang dominan adalah bekerja pada sektor perkebunan yaitu sebesar 81,54% dari total penduduk, diikuti oleh sektor pertanian (8,32%), dan sektor jasa (4,9%).

Produksi pertanian, terdiri atas sektor tanaman pangan dan hortikultur, sebagai berikut:

1. Sektor Tanaman Pangan, Luas tanam padi dan palawija 17.787 ha, ubi kayu 12.949 ha, padi ladang 1.007 ha, jagung 4.225 ha, kedelai 176 ha, kacang tanah 151 ha, kacang hijau 61 ha dan ubi jalar seluas 51 ha. Data produksi padi dan palawija tercatat yakni padi sawah sebesar 74.981 ton, padi ladang 2.686 ton, jagung 18.853 ton, kedelai 188 ton, kacang tanah 158 ton, kacang hijau 57 ton, ubi kayu 252.966 ton, dan ubi jalar sebesar 358 ton. Dari data-data tersebut bahwa Kecamatan Mesuji Timur dijadikan sentra penghasil padi dan jagung.

2. Sektor Tanaman Hortikultura, Jenis tanaman hortikultura yang dimaksud adalah jenis buah-buahan, sayuran dan biofarmaka antara lain adalah jeruk, nenas, pisang, salak, rambutan, cabe merah, kacang panjang, terong, ketimun, jahe, kencur, laos, temulawak, dan lempuyang. Dari komoditas tersebut, jenis paling banyak ditanam adalah jeruk sebanyak 49.520 pohon, sedangkan jenis sayuran yang paling banyak ditanam adalah cabe merah, yaitu seluas 96 hektar. Jenis biofarmaka adalah kencur, yaitu seluas 11.541 m². Komoditas jeruk cukup berpotensi untuk ditanam dan telah dibangun perkebunan jeruk oleh investor swasta.

Ketersediaan fasilitas kesehatan di kawasan KTM Mesuji saat ini terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu) berjumlah 14 unit, Puskesmas Induk berjumlah 5 unit dan Puskesmas Perawatan berjumlah 1 unit.

Di wilayah lokasi KTM, sarana pendidikan masih relatif sedikit dan relatif belum merata. Fasilitas pendidikan yang ada terdiri dari TK (7 buah), SD (18 buah), SLTP (10 buah), SLTA (3 buah), Pondok Pesantren/PP (15 buah), 13 buah fasilitas pendidikan lain-lain. Dari beberapa fasilitas pendidikan tersebut, hanya fasilitas SD yang terdapat di setiap desa, sedangkan SLTA hanya terdapat di Desa Tanjung Mas Makmur, Dwi Karya Mustika, dan Wonosari.

AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMPUNG

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Dasar Dukungan Perundangan Pembangunan

Pengembangan serta pembangunan kawasan di daerah, senantiasa terkait dengan program umum pembangunan Transmigrasi, Perubahan Undang-undang No. 22 tahun 1999 menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 membawa perubahan dalam mekanisme pengelolaan pemerintahan secara umum di seluruh provinsi di Indonesia

Kemampuan pemerintah daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki baik potensi fisik, potensi sosial, maupun ekonomi dan budaya. Keterpaduan potensi yang termaktub dalam potensi kawasan sumber daya alam, diharapkan akan mampu untuk mandiri melaksanakan manajemen pemerintahan secara *akuntabel*, dan demokratis sesuai dengan tujuan pembangunan transmigrasi pada paradigma baru pembangunan nasional. Mempunyai filosofi Pembangunan wilayah transmigrasi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir/tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. Pembangunan yang mempunyai *multiplier effect* bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Didukung dengan perencanaan dan pemrograman yang matang dalam pembangunan kawasan. Hasil dari investasi pembangunan menjadi *entry point* pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah pada peningkatan pemerintah dalam layanan publik (*public services*),

dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dan peningkatan investasi daerah. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi, direvisi menjadi UU No. 29 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan transmigrasi adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar
- b. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah
- c. Memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa

Peranan program transmigrasi terhadap pembangunan cukup besar, baik terhadap pembangunan daerah maupun pembangunan nasional, terutama dalam membuka isolasi wilayah, menambah tenaga kerja/petani, mendukung ketahanan pangan, menambah devisa negara, pembentukan desa-desa baru dan pembangunan sarana sosial-ekonomi budaya di setiap pemukiman transmigrasi.

Konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM) digulirkan pada tahun 2006, saat ini KTM sudah menjadi ikon Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagai suatu ikon pelaksanaan pembangunan KTM merupakan akulturasi, simplifikasi, terhadap paradigma baru pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang mengacu kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan arah kebijakan UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian, arah kebijakan di dalam PP No. 34 Tahun 2009 tentang Kawasan Perkotaan Baru dan PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sampai awal tahun 2011 realisasi program pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), berjumlah 42 buah. Pelaksanaan pembangunan Kota Terpadu Mandiri ditentukan berdasarkan pengembangan Strategi untuk: (1) Penguatan sistem agribisnis (produksi) komoditas unggulan, (2) Pengembangan manfaat ruang (sistem pusat2 kegiatan & sistem prasarana

kawasan), dan (3) Titik berat pada pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sebagai embrio perkotaan baru. di dalam penjabaran serta pelaksanaan pembangunan KTM relasinya terhadap pembangunan kawasan (daerah) secara umum disukung oleh landasan hukum perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonomi;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 214 tahun 2007 tentang Kota Terpadu Mandiri.

Selanjutnya untuk implementasi pelaksanaan di masing-masing kabupaten dan kota di provinsi, diatur dalam Peraturan Bupati maupun Walikota sebagai dasar hukum sebagaimana disajikan pada tabel. 3.1.

Tabel.3.1. Dasar perundangan dan peraturan pelaksanaan pembangunan

Legal aspek perundangan	Isi	Penjab
Undang-Undang N0.32 Tahun 2004	Tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah Pusat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2009	tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.	Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1999,	tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;	Kemenakertrans

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1999	tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonomi;	Kemendagri
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.214 tahun 2007	tentang Kota Terpadu Mandiri	Kemenakertrans

Sumber: Data Primer, 2012

Pembangunan daerah yang dirancang serta direncanakan secara komprehensif atas dasar UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Nasional, yang dijabarkan menjadi Rencana Tata Ruang Daerah. Di mana Tata Ruang Daerah ini dipergunakan sebagai *base data*, dalam penyusunan RTSP Kota Terpadu Mandiri, dari perencanaan yang implisit dalam perencanaan daerah, kemudian konsep KTM dikembangkan sesuai dengan pembangunan program Transmigrasi, dengan *multiplier effect* nyata pada yaitu peningkatan pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran. Sehingga secara filosofi perundangan ketransmigrasian maupun Peraturan pendukungnya secara substansi tidak terjadi kesenjangan, untuk mengetahui tingkat kebenarannya, pelaksanaan perundangan dengan fisik lapangan dan implementasi pada saat dialihserahkan ke pihak pemerintah daerah secara menyeluruh baik fisik maupun masyarakatnya.

3.2. Pelaksanaan Perundangan KTM dalam bidang pembangunan daerah

Salah satu upaya akselerasi implementasi kebijakan pembangunan transmigrasi dan dalam menunjang pembangunan daerah yang tertuang dalam UU No. 29 tahun 2009, dengan dukungan koordinasi antardepartemen, terhadap UU No. 32 tahun 2004. Di mana dalam pembangunan daerah, dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya alam yang dimiliki. Potensi

yang cukup gayut dalam hal ini adalah sumberdaya fisik lahan, potensi sumberdaya manusia, dan tidak bisa dilepaskan adalah sumberdaya berupa komoditas. hal ini akan terkait erat dengan filosofi pembangunan Kota Terpadu Mandiri, sesuai dengan Peraturan Menteri Transmigrasi No. 214 tahun 2007 yang menjelaskan pentingnya KTM sebagai salah satu kontributor dalam pembangunan daerah, dengan unit pengembangan atau pun unit analisis dalam pembangunan adalah program transmigrasi. Diharapkan dengan adanya kantong-kantong pertumbuhan yang bersumber dari kawasan Transmigrasi secara umum dan permukiman secara umum, analogi yang diharapkan dengan pembangunan KTM relasinya bagi pembangunan daerah, merupakan bentuk lain dari agropolitan, di mana dalam hal ini pusat pertumbuhan diarahkan pada Wilayah SKP yang akan setara dengan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, demikian pula untuk orde yang lebih tinggi berupa pusat Kawasan setara dengan Kabupaten.

Peranan dari sisi lain KTM diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan daerah secara komprehensif, pada jangka menengah 5 tahun ke depan mendukung terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal, investasi, di mana selanjutnya menjadi *entry point* mempercepat peningkatan investasi di kawasan pertumbuhan baik di pusat pertumbuhan maupun di tingkat kawasan KTM. Dengan pendekatan realistis pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment/*FDI) maupun dalam bentuk portofolio investasi. Didukung oleh pemerintah dalam menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi investor yang akan ikut dalam pembangunan KTM dan pembangunan investasi daerah yang dimulai sejak proses pengurusan perijinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal (Darsono, 2011).

Undang Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang diberlakukan secara Nasional, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana tata Ruang Provinsi yang diturunkan pada tataran rencana Tata Ruang kabupaten, Demikian ke tiga Rencana Tata Ruang tersebut menjadi dasar untuk penyusunan kawasan KTM, yang sampai saat ini telah masuk ke generasi III. Secara filosofi pembangunan KTM merupakan inisiasi dari konsepsi agropolitan, sehingga secara *strike* dan *significant* mempunyai relasi yang tinggi, jika dalam implementasinya dilaksanakn secara komprehensif dengan melibatkan dari awalnya dengan pihak pemerintah daerah, termasuk dalam MOU dan *master sharing*, walaupun disadari pada saat pemyusunan *masterplan* secara legal aspek di dasari permintaan dari pihak kabupaten ataupun Gubernur yang bertanggung jawab secara struktural untuk pembangunan daerahnya. Dilihat dari pelaksanaan perundangan sebagai pokok utamanya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan pelaksanaan pembangunan KTM PP No. 214 tahun 2007, di dalam implementasinya terdapat beberapa yang tidak sejalan baik dengan perencanaan, perancangan, pelaksanaan di lapangan, baik ditinjau secara internal pada peraturannya sendiri, maupun tinjauan secara eksternal dengan perundangan lainnya ,sebagaimana ditunjukkan antara lain:

1. Kota Terpadu Mandiri, dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan. Strateginya, adalah dengan mendorong desa transmigrasi/UPT yang sudah menunjukkan peran sebagai desa utama (pusat SKP, memiliki basis ekonomi berdasarkan pada komoditas unggulan). Jadi desa yang dimaksud adalah yang pada posisi *Basic Service* (pemenuhan kebutuhan dasar = kriteria T5).
2. Prinsipnya, adalah Revitalisasi (mempercepat/mendorong perkembangan desa utama yang sudah ada menjadi pusat per-

tumbuhan). Atau istilah yang kita kenal sebagai SSDP = *second stage development programme*.

3. Masalah lambatnya perkembangan KTM, karena lokasi yang dipilih adalah lokasi baru, sehingga lokasi KTM yang baru mulai dari nol ini, harus melewati fase pertumbuhan desa sebagaimana lokasi transmigrasi yang baru saja dibuka.
4. Ada indikasi bahwa lokasi-lokasi KTM yang demikian karena ada interest politik tertentu sehingga mengabaikan norma atau logika pusat pertumbuhan.
5. Masalah lain yang berpengaruh adalah, bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN. Sejauh fasilitas-fasilitas KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/ memanfaatkan fasilitas tersebut.
6. Aturan dari Menkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kekayaan negara, bahwa untuk pengalihan *asset* negara dari pusat ke daerah, harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu (ada IMB, ada sertifikat tanah, ada gambar detail, dsb). Kemenarkertrans dalam menyusun detail KTM sama sekali tidak menyinggung serta melengkapi dengan dokumen dimaksud.
7. Berikutnya, dalam memfungsikan sarana prasarana KTM, harus dibentuk/ditetapkan organisasinya. sehingga akan jelas tupoksi dari instansi yang bertanggung jawab (untuk kawasan KTM siapa yang mengelola: pasar, mesjid, pusat bisnis, rumah pintar, *demfarm*, *boulevard*, tugu dan taman kota, fasilitas pendidikan, semua ini siapa yang akan kelola. Idealnya, dikembalikan pada dinas yang terkait yang bertanggung jawab dibidangnya. Lalu siapa yang mengkoordinir dinas itu. Apakah dikoordinir oleh pengelola KTM, atau oleh Bupati. Apalagi jika nanti menyangkut masalah retribusi (pasar, terminal, pelabuhan), apakah akan dimasukkan sebagai penghasilan KTM atau penghasilan Pemda)

8. Kepmenakertrans No. 214 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kota Terpadu Mandiri, belum mengatur masalah-masalah tersebut di atas secara rinci, sehingga terjadilah multi tafsir.

3.3. Kondisi yang diharapkan

UU No. 32 tahun 2004, sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah setelah paradigma baru pembangunan di Indonesia dilaksanakan, menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam membangun daerahnya berpagu pada sumberdaya dan keseluruhan potensi yang dimiliki baik yang secara keseluruhan modal tetap, maupun modal berjalan. Pembangunan KTM saat ini dibangun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam akselerasi pembangunan daerahnya dengan kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan dan pusat kawasan pelayanan.

Pelaksanaan pembangunan KTM dalam menunjang pembangunan pemerintah daerah berdasarkan pada azas: kepastian hukum (perundangan), keterbukaan, akuntabilitas, Memperhatikan pada klausul tersebut sebenarnya sintesis dari kondisi saat ini yaitu kondisi keberadaan KTM dalam menjadi kotributor pembangunan daerah dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan, yang sebenarnya ke arah sesuai dengan filosofi pembangunan daerah mengubah kondisi menjadi lebih mapan, disajikan pada tabel.3.2 sebagai berikut.

**Tabel.3.2. Kondisi Diharapkan dari kondisi yang ada saat ini
KTM Mesuji**

Kondisi saat ini	Kondisi Diharapkan	Permasalahan
Bidang perundangan	Bidang perundangan	
<p>Pelaksanaan Perundangan khususnya pada PP 214 tahun 2007, mengenai pembangunan KTM, yang saat ini mendasari pemikiran dan pembangunan KTM sebagai bentuk kepastian hukum masih banyak terjadi overlap dan tidak selaras. UU No. 34 tahun 2009</p>	<p>Keselarasn dengan Dasar UU 32 tahun 2004, maka PP 214 tahun 2007, diharapkan KTM menjadi fasilitator dan kontributor pembangunan daerah</p>	<p>Bentuk pembangunan KTM walaupun pada dasarnya mengacu pada RTRD akan tetapi fokusnya masih pada ketransmigrasian, sehingga muncul pemahaman overlap bahkan cenderung memikirkan UPT Kota Terpadu Mandiri, dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan. Strateginya, adalah dengan mendorong desa transmigrasi/UPT yang sudah menunjukkan peran sebagai desa utama (pusat SKP, memiliki basis ekonomi berdasarkan pada komoditas unggulan). Jadi desa yang dimaksud adalah yang pada posisi Basic Service (pemenuhan kebutuhan dasar = kriteria T5)</p>
<p>PP.214 Tahun 2007, tidak mengatur secara detail mengenai kelembagaan, masa peralihan yang harus didukung oleh dokumen dokumen peralihan</p>	<p>Regulasi dan revitalisasi PP 214 tahun 2007, disesuaikan dengan peraturan pendukung yang diperlukan</p>	<p>Aturan dari Menkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kekayaan negara, bahwa untuk pengalihan <i>asset</i> negara dari pusat ke daerah, harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu (ada IMB, ada sertifikat tanah, ada gambar detail, dsb, dsb). Kemenarkertrans dalam menyusun detil KTM sama sekali tidak menyinggung serta melengkapi dengan dokumen dimaksud</p>

Bentuk Perencanaan		
<p>Perencanaan sudah mengacu pada Tata Ruang Provinsi maupun Kabupaten, KTM dibangun pada UPT yang bersifat SSDP, ataupun pada kawasan yang disetarakan dengan kawasan transmigrasi, sehingga masih kosong dan tidak ada dukungan asses fisik dan sarana prasarana</p>	<p>Untuk mendorong pusat pertumbuhan pada tingkat orde III, ataupun orde di atasnya orde II dan orde I, tentunya keberangkatan program KTM merencanakan pada desa-desa yang sudah maju dan terdapat pengelola dari pihak pemda</p>	<p>Perencanaan masih mengandalkan pada pusat UPT ataupun SKP, yang tidak akan berkembang sebelum T5, sehingga kondisi senantiasa di bawah basic service</p> <p>Perencanaan yang riel adalah menggunakan desa yang sudah maju (desa lama), memiliki akses mpasar dan pemasaran yang direncanakan sebagai pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan (Prinsipnya, adalah REVITALISASI (mempercepat/mendorong perkembangan desa utama yang sudah ada menjadi pusat pertumbuhan).</p>
Bentuk kelembagaan (pelaksanaan)		
<p>Bentuk kelembagaan KTM bersifat internal, dibawah Dinas atau institusi Kemenakertrans, belum mengatur secara detil apabila akan dilaksanakn pengalihan pengelolaan, sehingga saat ini tidak pernah diakses langsung oleh pemda.</p>	<p>Bentuk kelembagaan serta organisasi tata Laksana, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, serta mengacu pada peraturan yang lebih tinggi</p>	<p>Masalah lain yang berpengaruh adalah, bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN (=milik pemerintah pusat).</p> <p>Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/memanfaatkan fasilitas tersebut.</p> <p>Masalah lain yang berpengaruh adalah, bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN (=milik pemerintah pusat). Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/ memanfaatkan fasilitas tersebut.</p>

Dukungan sektoral (pelaksanaan)		
Koordinasi yang lemah dan kebijakan sektoral dalam pembangunan KTM	Koordinasi sektoral yang terpadu dan baik, dengan koordinator Kepala daerah atau Bupati dalam pelaksanaan pembangunan KTM akan lebih baik. Sehingga bentuk pengelola KTM harus diatur dalam pedoman dan peraturan daerah	Dalam memfungsikan sarana prasarana KTM, harus dibentuk/ditetapkan organisasinya. sehingga akan jelas tupoksi dari instansi yang bertanggung jawab (untuk kawasan KTM siapa yang mengelola: pasar, mesjid, pusat bisnis, rumah pintar, <i>demfarm</i> , <i>boulevard</i> , tugu dan taman kota, fasilitas pendidikan, masalah retribusi (pasar, terminal, pelabuhan) .Idealnya, dikembalikan pada dinas2 yang terkait yang bertanggung jawab dibidangnya. dikoordinir oleh atau oleh Bupati.

Kelemahan menjadi permasalahan dalam pembangunan KTM sampai generasi III, untuk memperbaiki kondisi tersebut diperlukan strategi pemecahan sekaligus program untuk melaksanakan regulasi yang nyata, mulai dari perundangan, implementasi sampai nilai manfaat diperoleh.

3.4. Indikator evaluasi pusat pertumbuhan KTM

Perkembangan dari dilaksanakannya UU 32 tahun 2004, tentunya berdampak luas bagi sisi pemerintahan dan perluasannya, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang. Beragamnya kondisi dan situasi pemerintah daerah yang ada, membawa *effect* pada bervariasinya determinan variabel pembangunan yang berkembang di tingkat akar rumput (masyarakat), dimana *multiplier efectnya* akan membentuk perilaku masyarakat, terhadap pembangunan yang memiliki ciri *good governance*. Pembangunan KTM diharapkan mampu memberikan kejelasan melalui pertumbuhan dan percepatan bagi permukiman transmigrasi yang disiapkan menjadi pusat pertumbuhan, maupun pusat kawasan. dengan demikian perkembangan yang sudah

mencapai generasi III, perlu memperoleh perhatian dengan melaksanakan evaluasi. Dimana evaluasi dimaksudkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan KTM yang dipersiapkan menjadi *Growth pole*, maupun *growth centre* mendukung pembangunan daerah. Dimana aspek variabel, dibedakan menjadi 2, yaitu pusat Kawasan Transmigrasi (setara dengan WPT), dan pusat pertumbuhan (setara UPT), disajikan pada tabel. 3.3. dan 3.4.

Tabel.3.3. Indikator Pusat Kawasan

No	Variabel	Indikator	Bobot	1	2	3	4	5
1	Komoditas unggulan sudah berkembang dengan skala usaha ekonomi kawasan (20%)	Penetapan komoditas unggulan disetarkan dengan produksi beras (X1)	5,00%	Tidak terdapat produksi komoditas unggulan	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dari 1 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan 1 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan > 3 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan > 4 kali produksi berat pada satuan yang sama
		Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat (X2)	5,00%	Pendapatan masyarakat rata-rata 100-500.000/bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 501-999.000 /bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 1000.000-1.499.000 /bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 1.500.000-1.999.000 /bulan	Pendapatan petani rata-rata 2000.000-2.499.000 /bulan
		Memberikan kontribusi bagi PDRB pemerintah pada tingkat orde pemerintahan dimana komoditas tersebut berada (kecamatan / kabupaten) (X3)	5,00%	Memberikan Kontribusi 0- 5 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 6- 10 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 11-20 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 21-29 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 30- 39 % dalam sektor pertanian
		Kontiuitas komoditas unggulan ke pasar sasaran (X4)	5,00%	Kurang dari 10 % kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran	10-15% kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran	15-20% kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran	20-25% kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran	>25 % kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran
2	Pengolahan Lahan (7%)	Produktifitas lahan usaha untuk komoditas unggulan (X5)	4,00%	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar <19% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 20-39% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 40-59% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 60 -79% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 80-100% dari luas total kawasan 18000 ha

				Pengolahan sepenuhnya dengan tenaga manusia	Pengolahan separoh dengan tenaga manusia, dibantu hewan	Pengolahan sepenuhnya menggunakan tenaga hewan	Pengolahan dengan tenaga hewan, dan 50% menggunakan alsintan dengan alsintan	Pengolahan -100 % dengan alsintan
	Teknologi dan sarana produksi pengolahan lahan (X6)	3.00%	Tidak tersedia KUD/Gapoktan/ KUB	KUD/KUB/ Gapoktan sedang dalam proses pembentukan	KUD/KUB/ Gapoktan sudah terbentuk, dengan dukungan sarana prasarana kelembagaan	KUD/KUB/ Gapoktan sudah beraktifitas, belum optimal 100 %	KUD/KUB/ Gapoktan, sudah beraktifitas, belum optimal 100 %	
	Keberadaan Koperasi / Gapoktan (X7)	2.00%	Tidak ada anggota	Anggota sebanyak 25 orang, belum ada aktifitas	Anggota 26-50 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul	Anggota 50-75 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul	Anggota 75- 100 orang, dukungan sarana prasarana, aktifitas mulai muncul	
3	Koperasi/ Gapoktan (4%)							
	Aktifitas anggota (X8)	2.00%	Tidak ada mitra usaha	Terdapat Mitra kerja tingkat local, sebanyak 2-3 mitra	Mitra kerja seingkat local dan regional, sebanyak 4-5 mitra	Mitra kerja seingkat local dan regional, sebanyak 5-6 mitra	Mitra kerja seingkat local dan regional, sebanyak >6 mitra	
4	Jumlah Mitra usaha (X9)	3.00%						
	Bentuk Mitra (X10)	1.00%	Tidak ada mitra usaha	Terdapat Mitra kerja tingkat local, sebanyak 1 mitra usaha pertanian	Mitra kerja seingkat local dan regional, sebanyak 1 mitra usaha pertanian, dan 1 mitra usaha non pertanian	Mitra kerja seingkat local dan regional, sebanyak 1-3 mitra usaha pertanian, dan -1-2 mitra usaha non pertanian	Mitra kerja seingkat local dan regional, sebanyak >3 mitra usaha pertanian, dan >2 mitra usaha non pertanian	
5	Investor Non Pertanian (2%)							
	Lembaga keuangan (X11)	3.00%	Tidak tersedia pegadaian ataupun bank	Tersedia bank sebanyak 1 buah	Tersedia Bank 1-2 buah dan 1 pegadaian	Tersedia Bank 1-2 buah dan pegadaian serta lembaga keuangan lainnya sebanyak 1 buah	Tersedia Bank 1-2 buah dan pegadaian serta lembaga keuangan lainnya sebanyak 1-2 buah	
6	Lembaga Keuangan (Pegadaian/Bank) (5%)							

			Tidak ada pemanfaatan lembaga	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 10-15 petani /hari	Tersedia pasar harian untuk kawasan sebanyak 1-2 buah	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 15-25 petani / hari	Tersedia pasar harian 1-2 buah dan 1 pasar grosir	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 25-35 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh > 35 petani /hari
7	Terdapat Pasar: (harian, induk, grosir) (8%)	Jumlah pasar (X13)	Tidak tersedia pasar	Terdapat lembaga pengelola informal (tidak resmi)	Terdapat lembaga pengelola	Terdapat lembaga pengelola, dengan pengurus yang lengkap tetapi tidak mengelola pasar	Terdapat lembaga pengelola, dengan pengurus yang lengkap dan baik dalam mengelola pasar	Terdapat lembaga pengelola, dengan pengurus yang lengkap dan baik dalam mengelola pasar	Pasar harian >2 dengan pasar grosir >1, ditinjau 1 pasar induk
		Terdapat lembaga pengelola pasar (X14)	Tidak ada kegiatan pasar	Kegiatan pasar harian / kalangan setiap 7 hari sekali	Tidak ada kegiatan pasar	Kegiatan pasar harian/kalangan dan pasar grosir setiap 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian/kalangan setiap hari, pasar grosir 1 hari dan pasar induk 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian/kalangan setiap hari, pasar grosir 1 hari dan pasar induk 1 hari sekali	
8	Pusat Bisnis, Pertokoan (4%)	Jumlah pusat bisnis (X16)	Tidak ada pusat bisnis pada kawasan	Terdapat pusat bisnis sebanyak 1 buah pada kawasan	Terdapat pusat bisnis	Terdapat pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah pusat bisnis	Terdapat pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah pusat bisnis	Terdapat pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis	
		Frekuensi aktifitas bisnis (X17)	Tidak ada aktifitas bisnis	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 2 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu	

9	Industri Pengolahan Hasil Panen (6%)	Jumlah industri pengolahan (X18)	3.00%	Tidak tersedia industri pengolahan hasil pertanian pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian 1 buah pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
		Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X19)	3.00%	Tidak ada aktifitas industri pengolahan pada kawasan	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 2 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu
10	Industri Olahan yang lebih bernilai tinggi (6%)	Jumlah industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X20)	3.00%	Tidak tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
		Frekuensi aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X21)	3.00%	Tidak ada aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) pada kawasan	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan dalam` satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap 2 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu

II. Kondisi penduduk								
11	Jumlah Penduduk pada kawasan (5%)	Jumlah pada saat kajian dilaksanakan (X22)	5.00%	Jumlah penduduk < dari 2000 KK	Jumlah penduduk 2000-5000 KK	Jumlah penduduk 5000-7000 KK	Jumlah penduduk 7000-9000 KK	Jumlah penduduk > 9000 KK
III. Sarana prasarana								
12	Pendidikan (5%)	TK (X23)	0.50%	Tidak tersedia TK pada kawasan	Tersedia TK sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah
13		Aktifitas TK (X24)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan TK	< 50 % anak usia TK mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia TK mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia TK mengikuti pendidikan	>90 % anak usia TK mengikuti pendidikan
14		SD (X25)	0.50%	Tidak tersedia SD pada kawasan	Tersedia SD sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah
15		Aktifitas SD (X26)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan SD	< 50 % anak usia SD mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SD mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SD mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SD mengikuti pendidikan
16		SMP (X27)	0.50%	Tidak tersedia SMP pada kawasan	Tersedia SMP sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SMP 1-2 buah pada kawasan	Tersedia SMP 2-3 buah pada kawasan	Tersedia SMP >3 buah pada kawasan
17		Aktifitas SMP (X28)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan SMP	< 50 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SMP mengikuti pendidikan
18		SMA (X29)	1.00%	Tidak tersedia SMA pada kawasan	Tersedia SMA sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SMA 1-2 buah pada kawasan	Tersedia SMA 2-3 buah pada kawasan	Tersedia SMA >3 buah pada kawasan

19		Aktivitas SMA (X30)	1.00%	Tidak ada aktifitas pendidikan SMA	< 50 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SMA mengikuti pendidikan
20	Kesehatan (5%)	Jumlah Pustu/polides (X31)	0.50%	Tidak tersedia Pustu pada kawasan	Tersedia Pustu sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Pustu 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Pustu 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Pustu >3 buah pada kawasan
21		Penggunaan Pustu/Polides oleh Masyarakat (X32)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan Pustu	< 50 % masyarakat memanfaatkan Pustu	50-70 % masyarakat memanfaatkan Pustu	70-90 % masyarakat memanfaatkan Pustu	>90 % masyarakat memanfaatkan Pustu
22		Jml Puskesmas (X33)	1.00%	-	-	Tersedia 1 puskesmas	Tersedia 1-2 Puskesmas	Tersedia Puskesmas 1-2 dengan fasilitas Rawat inap
23		Penggunaan Puskesmas oleh Masyarakat (X34)	1.00%			< 50 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas	50-70 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas	70-90 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas dan rawat inap
24		Rumah sakit tipe C (X35)	1.00%					Terdapat 1 RS tipe C
25		Penggunaan RS oleh Masyarakat (X36)	1.00%		Penduduk <50% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk 50% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk 50-80% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk >80% menggunakan layanan RS tipe C
26	Peribadatan (2%)	Jumlah Mesjid Kecil (X37)	0.25%	Tidak tersedia Mesjid Kecil pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid >3 buah pada kawasan
27		Penggunaan Mesjid Kecil oleh Masyarakat (X38)	0.25%	Tidak ada aktifitas layanan Mesjid kecil	< 50 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	50-70 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	70-90 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	>90 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil

28		Jml Mesjid Besar (X39)	0.25%	-	-	Tersedia 1 Mesjid Besar	Tersedia 1-2 Mesjid Besar	Tersedia >2 Mesjid Besar
29		Penggunaan Mesjid Besar oleh Masyarakat (X40)	0.25%			< 50 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	50-70 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	70-90 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar
30		Islamic Centre (X41)	0.50%					Terdapat 1 Islamic Centre
31		Penggunaan Islamic Center oleh Masyarakat (X42)	0.50%			Penduduk <50% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk 50-80% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk >80% menggunakan layanan Islamic Centre
32	Terminal (4%)	Terminal Lokal (X43)	1.00%	Tidak tersedia terminal local pada kawasan	Tersedia terminal local sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia terminal local 1-2 buah pada kawasan	Tersedia terminal local 2-3 buah pada kawasan	Tersedia terminal local >3 buah pada kawasan
33		Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X44)	1.00%	Tidak ada aktifitas layanan terminal local	< 50 % masyarakat memanfaatkan terminal local	50-70 % masyarakat memanfaatkan terminal local	70-90 % masyarakat memanfaatkan terminal local	>90 % masyarakat memanfaatkan terminal local
34		Antar Daerah (X45)	1.00%					Tersedia terminal antar daerah 1-2 buah pada kawasan
35		Penggunaan terminal oleh masyarakat (X46)	1.00%			50-70 % masyarakat memanfaatkan terminal local	70-90 % masyarakat memanfaatkan terminal local	>90 % masyarakat memanfaatkan terminal local
36	Kantor polisi I (2%)	Pos polisi (X47)	0.50%	Tidak tersedia Pos polisi pada kawasan	Tersedia Pos polisi sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi >3 buah pada kawasan

37	Aktifitas pos/ Pelayanan pada masyarakat (X48)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan Pos polisi	< 50 % masyarakat dilayani Pos polisi	50-70 % masyarakat dilayani Pos polisi	70-90 % masyarakat dilayani Pos polisi	>90 % masyarakat dilayani Pos polisi
38	Polsek (X49)	0.50%					Tersedia Polsek 1-2 buah pada kawasan
39	Aktifitas Polsek/ Pelayanan pada masyarakat (X50)	0.50%		< 50 % masyarakat dilayani Polsek	50-70 % masyarakat dilayani Polsek	70-90 % masyarakat dilayani Polsek	>90 % masyarakat dilayani Polsek
40	Jaringan irigasi (komoditas padi sawah) (2%)	1.00%	<25% sudah beririgasi	25-50% sudah beririgasi	50-75% sudah beririgasi		
41	Irigasi teknis (X52)	1.00%				50-75% irigasi teknis	75-90% irigasi teknis
V. Sistem Pusat-pusat							
42	Sistem pusat-pusat (5%)	2.50%	Tidak tersedia pusat kawasan				Tersedia pusat pertumbuhan kawasan
43	Kegiatan di Pusat Kawasan (X54)	2.50%			Aktifitas pusat pertumbuhan <3 hari dalam seminggu	Aktifitas pusat pertumbuhan 5 hari dalam seminggu	Aktifitas pusat pertumbuhan 7 hari dalam seminggu
44	Keterhubungan antar kawasan (2,5%)	2.50%	Jalan belum perkerasan	Jalan dibangun dengan AWC/AS	Jalan diperkeras dengan pasir dan batu	Jalan sebagian besar > 50% diperkeras dengan aspal	Seluruh jalan yang ada pada kawasan diperkeras dengan aspal
45	Keterhubungan dalam kawasan (2,5%)	2.50%	Belum seluruhnya terhubung ke pusat kawasan	Terhubung dan rata-rata diperkeras dengan AWC/AS	< 50% terhubung dan diperkeras dengan aspal	50-80 % terhubung dan diperkeras dengan aspal	90-100 % terhubung dan diperkeras dengan aspal
		100.00%					

Tabel.3.4 Indikator Pusat Pertumbuhan

No	Variabel	Indikator	Bobot	1	2	3	4	5
1	Komoditas unggulan sudah berkembang dengan skala usaha ekonomi kawasan (20%)	Penetapan komoditas unggulan disetarakan dengan produksi beras (X1)	5.00%	Tidak terdapat produksi komoditas unggulan	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio kurang dari 1 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan 1 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan 2 - 3 kali produksi berat pada satuan yang sama	Produksi komoditas unggulan mempunyai rasio dengan > 4 kali produksi berat pada satuan yang sama
		Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat (X2)	5.00%	Pendapatan masyarakat rata-rata 100-500.000/bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 501-999.000 /bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 1000.000-1.499.000 /bulan	Pendapatan masyarakat rata-rata 1.500.000-1.999.000 /bulan	Pendapatan petani rata-rata 2000.000-2.499.000 /bulan
		Memberikan kontribusi bagi PDRB pemerintah pada tingkat orde pemerintahan dimana komoditas tersebut berada (kecamatan / kabupaten) (X3)	5.00%	Memberikan Kontribusi 0- 5 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 6- 10 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 11-20 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 21-29 % dalam sektor pertanian	Memberikan Kontribusi 30- 39 % dalam sektor pertanian
		Kontuitas komoditas unggulan ke pasar sasaran (X4)	5.00%	Kurang dari 10 % kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran	10-15% kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran	15-20% kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran	20-25% kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran	>25 % kontiuitas komoditas diterima pasar sasaran
2	Pengolahan Lahan (7%)	Produktifitas lahan usaha untuk komoditas unggulan (X5)	4.00%	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar <19% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 20-39% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 40-59% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 60 -79% dari luas total kawasan 18000 ha	Pengolahan lahan dilaksanakan oleh petani sebesar 80-100% dari luas total kawasan 18000 ha

					Pengolahan dengan tenaga manusia	Pengolahan separuh dengan tenaga manusia, dibantu hewan	Pengolahan sepenuhnya menggunakan tenaga hewan	Pengolahan 50% dengan hewan, dan 50% menggunakan aisintan	Pengolahan -100 % dengan aisintan
3	Koperasi/ Gapoktan (4%)	Keberadaan Koperasi / Gapoktan (X7)	3.00%	2.00%	Tidak tersedia KUD/Gapoktan/KUB	KUD/KUB/Gapoktan sedang dalam proses pembentukan	KUD/KUB/Gapoktan sudah terbentuk, dengan dukungan sarana prasana kelembagaan	KUD/KUB/Gapoktan, sudah beraktifitas, belum optimal 100 %	KUD/KUB/Gapoktan, sudah beraktifitas, belum optimal 100 %
		Aktifitas anggota (X8)	2.00%	2.00%	Tidak ada anggota	Anggota sebanyak 25 orang, belum ada aktifitas	Anggota 26-50 orang, dukungan sarana prasana, aktifitas mulai muncul	Anggota 50-75 orang, dukungan sarana prasana, aktifitas mulai muncul	Anggota 75-100 orang, dukungan sarana prasana, aktifitas mulai muncul
4	Investor/Mitra Usaha (3%)	Jumlah Mitra usaha (X9)	3.00%	3.00%	Tidak ada mitra usaha	Terdapat Mitra kerja tingkat lokal, sebanyak 2-3 mitra	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak 4-5 mitra	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak 5-6 mitra	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak >6 mitra
5	Investor Non Pertanian (2%)	Bentuk Mitra (X10)	1.00%	1.00%	Tidak ada mitra usaha	Terdapat Mitra kerja tingkat local, sebanyak 1 mitra usaha pertanian	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak 1 mitra usaha pertanian, dan 1 mitra usaha non pertanian	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak 1-3 mitra usaha pertanian, dan 1-2 mitra usaha non pertanian	Mitra kerja setingkat local dan regional, sebanyak >3 mitra usaha pertanian, dan >2 mitra usaha non pertanian
6	Lembaga Keuangan (Pegadaian/Bank) (5%)	Lembaga Keuangan (X11)	3.00%	3.00%	Tidak tersedia pegadaian ataupun bank	Tersedia bank sebanyak 1 buah	Tersedia Bank 1-2 buah dan 1 pegadaian	Tersedia Bank 1-2 buah dan pegadaian serta lembaga keuangan lainnya sebanyak 1 buah	Tersedia Bank 1-2 buah dan pegadaian serta lembaga keuangan lainnya sebanyak 1-2 buah

			Tidak ada pemanfaatan lembaga	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilaksanakan oleh 10-15 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh 25-35 petani /hari	Transaksi dengan bank maupun lembaga keuangan lainnya rata-rata dilakukan oleh > 35 petani /hari
7	Pemanfaatan lembaga oleh masyarakat(X12)	3.00%	Tidak ada pasar	Terdapat pasar harian untuk kawasan sebanyak 1-2 buah	Terdapat pasar harian 1-2 buah dan 1 pasar grosir, dan 1 pasar induk	Pasar harian >2 dengan pasar grosir >1, ditinjau 1 pasar induk
	Terdapat lembaga pengelola pasar (X14)	3.00%	Tidak terdapat lembaga pengelola	Terdapat lembaga pengelola informal (tidak resmi)	Terdapat lembaga pengelola, dengan pengurus yang lengkap tetapi dalam mengelola pasar	Terdapat lembaga pengelola, dengan pengurus yang lengkap dan baik dalam mengelola pasar dengan
	Frekuensi kegiatan pasar (X15)	2.00%	Tidak ada kegiatan pasar	Kegiatan pasar harian /kalangan setiap 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian/kalangan setiap hari, pasar grosir 1 hari dan pasar induk 7 hari sekali	Kegiatan pasar harian/kalangan setiap hari, pasar grosir 1 hari dan pasar induk 1 hari sekali
8	Pusat Bisnis, Pertokoan (4%)	2.00%	Tidak terdapat pusat bisnis pada kawasan	Terdapat pusat bisnis sebanyak 1 buah pada kawasan	Terdapat pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah pusat bisnis	Terdapat pusat bisnis di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
	Frekuensi aktifitas bisnis (X17)	2.00%	Tidak ada aktifitas bisnis	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas bisnis dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu

9	Industri Pengolahan Hasil Panen (6%)	Jumlah industri pengolahan (X18)	3.00%	Tidak tersedia industri pengolahan hasil pertanian pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian 1 buah pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa)	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
		Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X19)	3.00%	Tidak ada aktifitas industri pengolahan pada kawasan	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 3 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap 2 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu
10	Industri Olahan yang lebih bernilai tinggi (6%)	Jumlah industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X20)	3.00%	Tidak tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian di setiap wilayah (UPT/ desa)	Tersedia industri pengolahan hasil pertanian dengan rata-rata >3 buah pusat bisnis
		Frekuensi aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X21)	3.00%	Tidak ada aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) pada kawasan	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap 7 hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu	Aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) dilaksanakan setiap hari dalam satu minggu

II. Kondisi penduduk								
11	Jumlah Penduduk pada kawasan (5%)	Jumlah pada saat kajian dilaksanakan (X22)	5.00%	Jumlah penduduk < dari 2000 KK	Jumlah penduduk 2000-5000 KK	Jumlah penduduk 5000-7000 KK	Jumlah penduduk 7000-9000 KK	Jumlah penduduk > 9000 KK
III. Sarana prasarana								
12	Pendidikan (5%)	TK (X23)	0.50%	Tidak ada TK pada kawasan	Tersedia TK sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia TK di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah
13		Aktifitas TK (X24)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan TK	< 50 % anak usia TK mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia TK mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia TK mengikuti pendidikan	>90 % anak usia TK mengikuti pendidikan
14		SD (X25)	0.50%	Tidak tersedia SD pada kawasan	Tersedia SD sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 1-2 buah	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata 2-3 buah	Tersedia SD di setiap wilayah (UPT/ desa) dengan rata-rata >3 buah
15		Aktifitas SD (X26)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan SD	< 50 % anak usia SD mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SD mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SD mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SD mengikuti pendidikan
16		SMP (X27)	0.50%	Tidak tersedia SMP pada kawasan	Tersedia SMP sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SMP 1-2 buah pada kawasan	Tersedia SMP 2-3 buah pada kawasan	Tersedia SMP >3 buah pada kawasan
17		Aktifitas SMP (X28)	0.50%	Tidak ada aktifitas pendidikan SMP	< 50 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SMP mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SMP mengikuti pendidikan
18		SMA (X29)	1.00%	Tidak tersedia SMA pada kawasan	Tersedia SMA sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia SMA 1-2 buah pada kawasan	Tersedia SMA 2-3 buah pada kawasan	Tersedia SMA >3 buah pada kawasan

19		Aktifitas SMA (X30)	1.00%	Tidak ada aktifitas pendidikan SMA	< 50 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	50-70 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	70-90 % anak usia SMA mengikuti pendidikan	>90 % anak usia SMA mengikuti pendidikan
20	Kesehatan (5%)	Jumlah Pustu/polides (X31)	0.50%	Tidak tersedia Pustu pada kawasan	Tersedia Pustu sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Pustu 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Pustu 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Pustu >3 buah pada kawasan
21		Penggunaan Pustu/Polides oleh Masyarakat (X32)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan Pustu	< 50 % masyarakat memanfaatkan Pustu	50-70 % masyarakat memanfaatkan Pustu	70-90 % masyarakat memanfaatkan Pustu	>90 % masyarakat memanfaatkan Pustu
22		Jml Puskesmas (X33)	1.00%	-	-	Tersedia 1 puskesmas	Tersedia 1-2 Puskesmas	Tersedia Puskesmas 1-2 dengan fasilitas Rawat Inap
23		Penggunaan Puskesmas oleh Masyarakat (X34)	1.00%			< 50 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas	50-70 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas	70-90 % masyarakat memanfaatkan Puskesmas dan rawat inap
24		Rumah sakit tipe C (X35)	1.00%					Terdapat 1 RS tipe C
25		Penggunaan RS oleh Masyarakat (X36)	1.00%		Penduduk <50% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk 50% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk 50-80% menggunakan layanan RS tipe C	Penduduk >80% menggunakan layanan RS tipe C
26	Peribadatan (2%)	Jumlah Mesjid Kecil (X37)	0.25%	Tidak tersedia Mesjid kecil pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid kecil 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Mesjid >3 buah pada kawasan
27		Penggunaan Mesjid Kecil oleh Masyarakat (X38)	0.25%	Tidak ada aktifitas layanan Mesjid kecil	< 50 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	50-70 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	70-90 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil	>90 % masyarakat memanfaatkan mesjid kecil

28		Jml Mesjid Besar (X39)	0.25%	-	-	Tersedia 1 Mesjid Besar	Tersedia 1-2 Mesjid Besar	Tersedia >2 Mesjid Besar
29		Penggunaan Mesjid Besar oleh Masyarakat (X40)	0.25%			< 50 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	50-70 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar	70-90 % masyarakat memanfaatkan Mesjid Besar
30		Islamic Centre (X41)	0.50%					Terdapat 1 Islamic Centre
31		Penggunaan Islamic Center oleh Masyarakat (X42)	0.50%		Penduduk <50% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk 50% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk 50-80% menggunakan layanan Islamic Centre	Penduduk >80% menggunakan layanan Islamic Centre
32	Terminal (4%)	Terminal Lokal (X43)	1.00%	Tidak tersedia terminal local pada kawasan	Tersedia terminal local sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia terminal local 1-2 buah pada kawasan	Tersedia terminal local 2-3 buah pada kawasan	Tersedia terminal local >3 buah pada kawasan
33		Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X44)	1.00%	Tidak ada aktifitas layanan terminal local	< 50 % masyarakat memanfaatkan terminal local	50-70 % masyarakat memanfaatkan terminal local	70-90 % masyarakat memanfaatkan terminal local	>90 % masyarakat memanfaatkan terminal local
34		Antar Daerah (X45)	1.00%					Tersedia terminal antar daerah 1-2 buah pada kawasan
35		Penggunaan terminal oleh masyarakat (X46)	1.00%		< 50 % masyarakat memanfaatkan terminal local	50-70 % masyarakat memanfaatkan terminal local	70-90 % masyarakat memanfaatkan terminal local	>90 % masyarakat memanfaatkan terminal local
36	Kantor polisi I (2%)	Pos polisi (X47)	0.50%	Tidak tersedia Pos polisi pada kawasan	Tersedia Pos polisi sebanyak 1 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi 1-2 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi 2-3 buah pada kawasan	Tersedia Pos polisi >3 buah pada kawasan

37		Aktifitas pos/ Pelayanan pada masyarakat (X48)	0.50%	Tidak ada aktifitas layanan Pos polisi	< 50 % masyarakat dilayani Pos polisi	50-70 % masyarakat dilayani Pos polisi	70-90 % masyarakat dilayani Pos polisi	>90 % masyarakat dilayani Pos polisi	Tersedia Polsek 1-2 buah pada kawasan
38		Polsek (X49)	0.50%		< 50 % masyarakat dilayani Polsek	50-70 % masyarakat dilayani Polsek	70-90 % masyarakat dilayani Polsek	>90 % masyarakat dilayani Polsek	
39		Aktifitas Polsek/ Pelayanan pada masyarakat (X50)	0.50%		25-50% sudah beririgasi	50-75% sudah beririgasi			
40	Jaringan irigasi (komoditas padi sawah) (2%)	Irigasi biasa (X51)	1.00%	<25% sudah beririgasi					
41		Irigasi teknis (X52)	1.00%					75-90% irigasi teknis	
IV. Sistem Pusat-pusat									
42	Sistem pusat-pusat (5%)	Sistem pusat (X53)	2.50%	Tidak tersedia pusat kawasan					Tersedia pusat perubahan kawasan
43		Kegiatan di Pusat Kawasan (X54)	2.50%			Aktifitas pusat pertumbuhan <3 hari dalam seminggu	Aktifitas pusat pertumbuhan 5 hari dalam seminggu	Aktifitas pusat pertumbuhan 7 hari dalam seminggu	
44	Keterhubungan antar kawasan (2,5%)	Kondisi jalan (X55)	2.50%	Jalan belum perkerasan	Jalan dibangun dengan AWC/AS	Jalan diperkeras dengan pasir dan batu	Jalan sebagian besar > 50% diperkeras dengan aspal	Seluruh jalan yang ada pada kawasan diperkeras dengan aspal	
45	Keterhubungan dalam kawasan (2,5%)	Akses jalan antar Kawasan (X56)	2.50%	Belum seluruhnya terhubung ke pusat kawasan	Terhubung dan rata-rata diperkeras dengan AWC/AS	< 50% terhubung dan diperkeras dengan aspal	50-80 % terhubung dan diperkeras dengan aspal	90-100 % terhubung dan diperkeras dengan aspal	
			100.00%						

3.5. Analisis pusat Kawasan dan Pusat Pertumbuhan

Analisis data perkembangan pusat kawasan maupun untuk pusat pertumbuhan dihitung secara deskriptif, kemudian dengan perhitungan bobot, diperoleh nilai yang diklasifikasi menjadi beberapa klas yang akan memberikan deskripsi dari kondisi senyatanya (*real condition*) pada saat dilaksanakan pengujian.

Pemahaman untuk pengujian Variabel yang disusun dalam indikator, dimaksudkan untuk mengetahui tolok ukur yang dipergunakan dasar analisis deskriptif, yaitu sejauhmana kinerja pertumbuhan kawasan KTM khususnya di Mesuji.

Asumsi dasar yang dipergunakan dalam perhitungan ini dengan mempergunakan data pengujian informan bersumber dari hasil identifikasi lapangan pada tahun 2011 melalui pendekatan *focus group*, serta diskusi mendalam disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Selanjutnya asumsi ini menjadi *entry point* pemikiran untuk mendalami keterkaitan unsur-unsur pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan di tingkat lapangan dan *multiplier effectnya* pada tingkat kabupaten.

Asumsi ini bertujuan dengan cara untuk mengidentifikasi peranan masukan-masukan yang dilaksanakan sektoral terhadap efektivitas pertumbuhan kawasan transmigrasi dalam mendukung pembangunan daerah, selanjutnya dengan memperhatikan perubahan pertumbuhan eksisting sebagai wujud indikasi keberhasilan dalam peningkatan pembangunan kawasan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat masyarakat. Secara deskriptif pengukuran telah dilakukan dengan maksud untuk mengenali perkembangan pusat kawasan yang disajikan pada Tabel. 3.5

x32	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	5,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,41	0,02
x33	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,34	0,01
x34	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00	3,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,39	0,02
x35	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,01
x36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,01
x37	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,72	0,01
x38	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,45	0,01
x39	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,34	0,01
x40	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,83	0,01
x41	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,41	0,01
x42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,21	0,01
x43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,01
x44	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,01
x45	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,93	0,03
x46	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,93	0,03
x47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,10	0,01
x48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,69	0,01
x49	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,72	0,02
x50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,86	0,02
x51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,10	0,02
x52	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,52	0,02
x53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,125
x54	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,6	0,115
x55	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,2	0,085
x56	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,4	0,036
x57	170	170	163	170	170	170	170	170	170	163	157	158	159	169	171	170	167	170	166	158	130	129	130	131	130	3,021	

Berdasarkan klasifikasi klas interval, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6

Tabel.3.6 Klasifikasi Pusat Kawasan dan Pertumbuhan KTM

Klas	Interval	Keterangan
I	1,0-1,90	Layanan Dasar
II	2,0-2,90	Layanan Sedang
III	3,0-3,90	Mandiri Pertama
IV	4,0-4,9	Mandiri Penuh
V	5,0	Daya Saing

Maka KTM kawasan Mesuji pada saat ini memiliki nilai 3.02, yang berarti masuk kriteria layanan Mandiri pertama, artinya adalah kawasan transmigrasi cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi belum sepenuhnya mampu *supply* daerah penyangga di sekitarnya. Memperhatikan pada hasil observasi yang dilihat dengan pendekatan triangulasi, maka dapat dipilahkan indikator penyebab menjadi tiga dengan kisaran sebagai berikut:

Tabel.3.7. Deskripsi berdasarkan pengamatan triangulasi Pusat kawasan

		Baik	Sedang	Lemah	Keterangan	Indikator perlu/ tidak saat ini
Komoditas unggulan sudah berkembang dengan skala usaha ekonomi kawasan (20%)	Penetapan komoditas unggulan disetarakan dengan produksi beras (X1)		v		Terdapat komoditas unggulan berfungsi mampu mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi	Perlu

	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat (X2)		v		Komoditas unggulan diproyeksikan dalam jangka 5 tahun ke depan mampu mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi	Perlu
	Memberikan kontribusi bagi PDRB pemerintah pada tingkat orde pemerintahan dimana komoditas tersebut berada (kecamatan / kabupaten) (X3)			v	Komoditas unggulan diproyeksikan dalam jangka 5 tahun ke depan mampu mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi termasuk pada orde pemasaran II dan III	Perlu
	Kontinuitas komoditas unggulan ke pasar sasaran (X4)	v			Ketersediaan komoditas unggulan diproyeksikan akan tersedia setiap saat di pasar sasaran	Perlu
Pengolahan Lahan (7%)	Produktifitas lahan usaha untuk komoditas unggulan (X5)	v			Kesesuaian lahan untuk peningkatan komoditas unggulan di kawasan KTM Mesuji cukup baik	Perlu
	Teknologi dan sarana produksi pengolahan lahan (X6)	v			Untuk pengembangan produksi usahatani, dirasakan teknologi dan dukungan sarana produksi untuk pengolahan lahan masih menjadi kendala	Perlu

Koperasi/ Gapoktan (4%)	Keberadaan Koperasi / Gapoktan (X7)	v			Koperasi usahatani dalam embrio persiapan, dimana dalam jangka menengah keberadaan koperasi ataupun Gapoktan, menjadi satu penting untuk mendorong perkembangan usahatani di kawasan KTM Mesuji	Perlu
	Aktifitas anggota` (X8)	v			Belum ada aktifitas untuk kegiatan koperasi usahatani di kawasan KTM Mesuji	Perlu
Investor/Mitra Usaha (3%)	Jumlah Mitra usaha (X9)			v	Untuk Kawasan KTM Mesuji terdapat investor bergerak di bidang perkebunan, diharapkan mampu menjadi mitra kerja dalam pengembangan usahatani perkebunan.	Perlu
Investor Non Pertanian (2%)	Bentuk Mitra (X10)		v		Bentuk kemitraan saat ini belum tersedia, baik dengan investor pertanian, maupun non pertanian, mengingat perkembangan kawasan KTM Mesuji	Perlu

Lembaga Keuangan (Pegadaian/ Bank) (5%)	Lembaga keuangan (X11)		v		Belum tersedia kelembagaan mikro, sebagai modal usaha bagi masyarakat di kawasan KTM Mesuji, apabila tersedia perbankan di tingkat orde III kecamatan belum bisa diakses oleh masyarakat, harus dimediasi oleh Kelompok Gapoktan	Belum
	Pemanfaatan lembaga oleh masyarakat (X12)	v			Lembaga keuangan dalam bentuk koperasi Usaha oleh masyarakat petani belum berjalan	Belum
Terdapat Pasar: (harian, induk, grosir) (8%)	Jumlah pasar (X13)		v		Untuk tingkat kawasan pasar harian terdapat di kecamatan orde III	Perlu
	Terdapat lembaga pengelola pasar (X14)			v	Lembaga pengelola pasar ditangani langsung oleh Dinas Pasar di tingkat Kecamatan, sehingga mendukung akses pemasaran produk dari masyarakat di kawasan KTM Mesuji pada saat ini.	Perlu
	Frekuensi kegiatan pasar (X15)		v		Frekuensi kegiatan pasar di tingkat kawasan yang dipusatkan di orde III sudah berjalan, sehingga mampu mengakses kawasan KTM secara kontinyu	Perlu

Pusat Bisnis, Pertokoan (4%)	Jumlah pusat bisnis (X16)			v	Pusat bisnis berkembang di kecamatan orde III sedangkan untuk pusat Kawasan dirasakan belum berkembang	Perlu
	Frekuensi aktifitas bisnis (X17)			v	Frekuensi aktifitas bisnis untuk di orde III berjalan setiap hari, sedangkan untuk pusat kawasan frekuensi aktifitas bisnis rendah	perlu
Industri Pengolahan Hasil Panen (6%)	Jumlah industri pengolahan (X18)	v			Pusat pengolahan sebagai industri pengolahan kurang tersedia di pusat Kawasan, tetapi berkembang di kecamatan sebagai orde III	Perlu
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X19)	v			Untuk pusat kawasan saat ini belum berkembang usaha industri pengolahan, baik untuk industri kecil, atau menengah	Perlu
Industri Olahan pertung lebih bernilai tinggi (6%)	Jumlah industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X20)	v			Industri pengolahan bernilai tinggi berkembang di kecamatan orde III	Belum
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X21)	v			Tidak tersedia di tingkat Kawasan saat ini, perkembangan aktifitas pengolahan di orde II dan III	Belum

Jumlah Penduduk pada kawasan (5%)	Jumlah pada saat kajian dilaksanakan (X22)	v			Jumlah penduduk sudah sangat mendukung untuk berkembang menjadi kawasan penyangga produksi komoditas untuk orde II maupun III	Perlu
Pendidikan (5%)	TK (X23)	v			Terdapat TK sebagai sarana pendidikan yang tersedia dengan pembatas pada pengajar yang kurang	Perlu
	Aktifitas TK (X24)	v			Aktifitas TK berjalan setiap hari walaupun peserta masih sedikit	Perlu
	SD (X25)		v		Terdapat SD sebagai sarana pendidikan yang tersedia dengan pembatas pada pengajar yang kurang	Perlu
	Aktifitas SD (X26)	v			Aktifitas SD berjalan setiap hari walaupun peserta didik masih sedikit	Perlu
	SMP (X27)			v	Di tingkat kecamatan sebagai pusat orde III	Perlu
	Aktifitas SMP (X28)		v		Di tingkat kecamatan sebagai pusat orde III	Perlu
	SMA (X29)			v	Di tingkat kecamatan sebagai pusat orde III	
	Aktifitas SMA (X30)			v	Di tingkat kecamatan sebagai pusat orde III	

Kesehatan (5%)	Jumlah Pustu/polides (X31)			v	Terdapat Satu buah, sarana kesehatan	perlu
	Penggunaan Pustu/ Polides oleh Masyarakat (X32)		v		Sangat dibutuhkan secara umum oleh masyarakat, walaupun fasilitas masih terbatas.	perlu
	Jml Puskesmas (X33)			v	Belum tersedia	perlu
	Penggunaan Puskesmas oleh Masyarakat (X34)			v	Belum digunakan oleh masyarakat	perlu
	Rumah sakit tipe C (X35)			v		belum
	Penggunaan RS oleh Masyarakat (X36)			v		belum
Peribadatan (2%)	Jumlah Masjid Kecil (X37)	v			Terdapat satu mesjid yang memenuhi syarat	perlu
	Penggunaan Masjid Kecil oleh Masyarakat (X38)	v			Dipergunakan setiap waktu	Perlu
	Jml Masjid Besar (X39)	v			tersedia mesjid besar	Belum
	Penggunaan Masjid Besar oleh Masyarakat (X40)	v			Belum	Belum
	Islamic Centre (X41)			v	Terdapat Islamic centre	Belum
	Penggunaan Islamic Center oleh Masyarakat (X42)			v		Belum

Terminal (4%)	Terminal Lokal (X43)			v	Saat ini telah tersedia angkutan, walaupun belum terdapat fasilitas terminal lokal di pusat kawasan	Perlu
	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X44)			v	Dmanfaatkan setiap hari	Perlu
	Antar Daerah (X45)		v		Belum tersedia untuk kawasan, tersedia di tingkat orde III	Belum
	Penggunaan terminal oleh masyarakat (X46)		v		Belum	Belum
Kantor polisi I (2%)	Pos polisi (X47)			v	Pos Polisi di tingkat kecamatan orde III	Belum
	Aktifitas pos/ pada masyarakat (X48)		v		Di tingkat kecamatan	
	Polsek (X49)	v			Di tingkat orde kecamatan	Belum
	Aktifitas Polsek/ Pelaperlunan pada masyarakat (X50)	v			Di tingkat orde kecamatan	
Jaringan irigasi (komoditas padi sawah) (2%)	Irigasi biasa (X51)		v		Untuk persawahan kawasan KTM Mesuji dibutuhkan 3 tahun mendatang setelah penataan lahan	Belum
	Irigasi teknis (X52)			v	Belum	Belum
Sistem pusat-pusat (5%)	Sistem pusat (X53)	v			Di tingkat kecamatan	Perlu

	Kegiatan di Pusat Kawasan (X54)	v			Belum dilaksanakan, kegiatan berlangsung sentral di kecamatan sebagai orde III	Perlu
Keterhubungan antar kawasan (2,5%)	Kondisi jalan (X55)			v	Akses dari dan ke orde II dan III maupun orde I cukup baik	Perlu
Keterhubungan dalam kawasan (2,5%)	Akses jalan antar Kawasan (X56)			v	Akses dari dan ke orde II dan III maupun orde I cukup baik	Perlu

Memperhatikan pada deskripsi pusat kawasan, maka efektivitas indikator yang dinyatakan baik sebesar 39,285%, sedangkan yang termasuk dalam kategori cukup sebesar 23,214%, dan yang lemah sebesar 37,501%. Kelemahan tersebut masuk dalam beberapa kategori ekonomi dan sosial, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sarana produksi, termasuk dalam hal ini adalah kualitas dan kuantitas teknologi terapan untuk usahatani produktif, masih bersifat standar.
2. Kualitas dari SDM yang rata-rata dalam berusaha tani skala kecil, dan rumah tangga.
3. Kelembagaan pendukung untuk usahatani, antara lain koperasi dan kemitraan dengan investor belum tersedia dan difasilitasi oleh kelembagaan secara optimal.
4. Aktivitas pasar dan pemasaran produk komoditas yang belum memungkinkan secara rutin dilaksanakan di tingkat kawasan KTM Mesuji, terkait dengan kontinuitas produk.
5. Industri pengolahan skala rumah tangga belum mampu berjalan dengan baik, belum dalam bentuk kelompok usaha, apabila terdapat industri rumah tangga ber dimensi sangat kecil, dan bersifat temporal.

x43	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,38	0,0275
x44	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05
x45	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,1
x46	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05
x47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,1
x48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,05
x49	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,1
x50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,01
x51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,02
x52	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,63	0,0325
x53	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,04
x54	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,1
x55	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,2
x56	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,1
x57	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,03
x58	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,12
x59	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,1
x60	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,25	0,10
x61	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,06
x62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,16
	217,00	216,00	217,00	213,00	218,00	216,00	220,00	216,00		3,54

Pusat pertumbuhan KTM Mesuji pada saat ini memiliki nilai 3,54, yang berarti masuk kriteria mandiri pertama, artinya adalah kawasan transmigrasi cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri, akan tetapi belum sepenuhnya mampu *supply* daerah penyangga di sekitarnya. Memperhatikan pada hasil observasi yang dilihat dengan pendekatan triangulasi, maka dapat dipilahkan indikator penyebab menjadi tiga dengan kisaran sebagai berikut:

Tabel.3.9. Deskripsi berdasarkan pengamatan triangulasi Pusat Pertumbuhan

		Baik	Sedang	Lemah	Keterangan	Indikator perlu/tidak saat ini
Jumlah penduduk (10%)	Jumlah penduduk di SKP – Pusat pertumbuhan (X1)	x			Penduduk sebagai factor produksim dalam pengembangan pusat pertumbuhan menjadi sangat penting, dan dibutuhkan dalam jangka panjang	Perlu
Ketersediaan komoditas diusahakan masyarakat petani (5%)	Penetapan komoditas unggulan disetarakan dengan produksi beras (X2)	x			Komoditas yang dikembangkan untuk perkebunan dan tanaman pangan oleh masyarakat transmighran, mencukupi pada saat ini bagi masyarakat	Perlu
	Memberikan kontribusi pendapatan masyarakat (X3)	x			Komoditas yang dikembangkan, saat ini sudah mulai memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat	Perlu
Pendidikan (7%)	TK (X4)	x			Tersedia TK sebanyak satu buah, dengan keterbatasan peserta didik yang rendah karena rendahnya APK APS maupun APM	Perlu
	Aktifitas TK (X5)	x			Aktifitas dilaksanakan setiap hari	Perlu
	SD (X6)	x			Tingkatan pendidikan untuk SD bagi pusat pertumbuhan KTM Mesuji selayaknya sudah bisa berjalan, tetapi rendahnya angka APK, APM< maupun APS yang menjadi rendahnya jumlah peserta anak didik	Perlu
	Aktifitas SD (X7)	x			Aktifitas dilaksanakan setiap hari, dengan keterbatasan pengajar, mengingat kondisi keberadaan pendidikan sangat penting, maka perlu disiapkan dengan implementasinya	Perlu
	SMP (X8)	x			Di tingkat kecamatan	Perlu
	Aktifita (X9)	x			Di tingkat kecamatan	Perlu

	SMA/SMK (X10)		x		Di tingkat kecamatan	Perlu	
	Aktifitas SMA (X11)	x			Di tingkat kecamatan	Perlu	
	Akademik/poli (X12)		x		Di tingkat provinsi	Belum	
	Aktifitas (X13)		x			Belum	
Kesehatan (5%)	Jumlah Pustu (X14)	x			Kualitas dan kuantitas Pustu untuk Pusat Pertumbuhan mencukupi, walaupun keterbatasan di paramedik dan bantuan obat-obatan	Perlu	
	Penggunaan Pustu oleh Masyarakat (X15)	x			Sangat bermanfaat, mengingat Pustu di Pusat Pertumbuhan menjadi satu-satunya sarana kesehatan yang menunjang bagi ke seluruh masyarakat	Perlu	
	Jml Puskesmas (X16)	x			Belum tersedia	Belum	
	Penggunaan Puskesmas oleh Masyarakat (X17)	x			Belum digunakan oleh masyarakat	Belum	
	Rumah sakit tipe C (X18)			x	Belum tersedia	Belum	
	Penggunaan RS oleh Masyarakat (X19)			x	Belum digunakan oleh masyarakat	Belum	
Peribadatan (2%)	Jumlah Mesjid kecil (X20)	x			Terdapat satu mesjid yang memenuhi syarat	perlu	
	Penggunaan Mesjid kecil oleh Masyarakat (X21)	x			Dipergunakan setiap waktu	Perlu	
	Jml Mesjid besar (X22)	x			Belum tersedia mesjid besar	Belum	
	Penggunaan Mesjid Besar oleh Masyarakat (X23)	x			Belum	Belum	
	Islamic Centre (X24)	x			Terdapat Islamic centre	Belum	
	Penggunaan oleh masyarakat (X25)			x			Belum
	Terminal (2%)	Lokal (X26)			x	Saat ini telah tersedia angkutan, walaupun belum terdapat fasilitas terminal lokal di pusat kawasan	Perlu
	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X27)			x	Dmanfaatkan setiap hari	Perlu	
	Antar Daerah (X28)	x			Belum tersedia untuk kawasan, tersedia di tingkat orde III	Belum	

	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X29)	x			Belum	Belum
Kantor polisi I (2%)	Pos polisi (X30)			x	Pos Polisi di tingkat kecamatan orde III	Belum
	Pelayanan untuk masyarakat (X31)			x	Di tingkat kecamatan	
	Polsek (X32)	x			Di tingkat orde kecamatan	Belum
	Pelayanan masyarakat (X33)	x			Di tingkat orde kecamatan	
KUD/KUB/Gapoktan (3%)	Keberadaan KUD/ KUB/Gapoktan (X34)	x			Koperasi usahatani dalam embrio persiapan, dimana dalam jangka menengah keberadaan koperasi ataupun Gapoktan, menjadi satu penting untuk mendorong perkembangan usahatani di pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Perlu
	Aktifitas anggota (X35)	x			Belum ada aktifitas untuk kegiatan koperasi usahatani di pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Perlu
Investor/Mitra Usaha (3%)	Jumlah Mitra usaha (X36)			x	Untuk pusat pertumbuhan KTM Mesuji terdapat investor bergerak di bidang perkebunan, diharapkan mampu menjadi mitra kerja dalam pengembangan usahatani perkebunan.	Perlu
Investor Non Pertanian (2%)	Bentuk mitra (X37)	x			Bentuk kemitraan saat ini belum tersedia, baik dengan investor pertanian, maupun non pertanian, mengingat perkembangan kawasan KTM Mesuji perlung kurang	Perlu
Lembaga Keuangan (Pegadaian/ Bank) (5%)	Lembaga keuangan (X38)	x			Lembaga keuangan dalam bentuk perbankan ataupun pegadaian belum tersedia di pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Perlu
	Pemanfaatan lembaga (X39)	x			Belum dimanfaatkan	

Terdapat Pasar: (harian, induk, grosir) (3%)	Jumlah pasar (X40)		x		Pasar induk dan grosir tersedia di kecamatan sebagai kota orde III, untuk pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Belum
	Frekuensi kegiatan pasar (X41)	x			Frekuensi kegiatan pasar harian belum berjalan secara optimal untuk pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Perlu
Pusat Bisnis, Pertokoan (3%)	Jumlah pusat bisnis (X42)		x		Pusat bisnis sebagai pertokoan belum tersedia di pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Belum
	Frekuensi aktifitas bisnis (X43)			x	Belum berjalan	Belum
Industri Pengolahan Hasil Panen	Jumlah industri pengolahan (X44)	x			Industri pengolah sederhana sudah dibutuhkan di pusat pertumbuhan, minimal untuk industri rumah tangga	Perlu
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X45)	x			Aktifitas belum dilaksanakan secara berkesinambungan,	Perlu
Industri Olahan yang lebih bernilai tinggi (3%)	Jumlah industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X46)	x			Industri pengolahan dilaksanakan di pusat kecamatan orde III, untuk pusat pertumbuhan KTM Mesuji dirasakan belum	Belum
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X47)	x			Belum berjalan di pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Belum
Listrik (6%)	Diesel (X48)	x			Untuk kebutuhan power supply dibutuhkan oleh masyarakat, dan telah dilaksanakan di pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Perlu
	Penggunaan diesel oleh Masyarakat (X49)	x			Pemanfaatan power supply dalam bentuk listrik dibutuhkan oleh masyarakat di pusat pertumbuhan	Perlu
	Jml PLN (50)			x	Belum tersedia di pusat pertumbuhan	Belum

	Penggunaan PLN oleh Masyarakat (X51)			x	Belum diakses oleh masyarakat khususnya untuk pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Belum
Telekomunikasi (2%)	Seluler (X52)			x	Kemajuan teknologi informasi, mendorong pula kebutuhan seluler, yang dibutuhkan oleh masyarakat di pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Perlu
Air Bersih (4%)	Kualitas setara MCK (X53)			x	Kebutuhan sarana air bersih, dinyatakan masih rendah, dialami oleh sebagian besar masyarakat pusat pertumbuhan KTM Mesuji	Perlu
Komposisi luas lahan terbangun (5%)	Luas lahan terbangun (X54)		x		Kebutuhan komposisi lahan luas terbangun, kurang diperhatikan oleh masyarakat pusat pertumbuhan, dengan alasan luasan lahan rasionya sangat luas dengan land cover	Belum
Keterhubungan dalam kawasan (10%)	Akses dalam kawasan (X55)	x			Akses dalam kawasan pusat pertumbuhan kualitas cukup menjamin akses komoditas ke luar dan masuk ke pusat pertumbuhan	Perlu
	Perkerasan (X56)		x		Untuk memperlancar akses komoditas, dibutuhkan perkerasan	Perlu
	Angkutan (X57)	x			Frekuensi angkutan umum belum tersedia secara optimal	Perlu
Keterhubungan antar kawasan (5%)	Akses dan kondisi (X58)	x			Akses dan kondisi antar kawasan dirasakan belum semuanya dalam kondisi baik, sebagai prasarana pendukung akses komoditas ke luar dan masuk pusat pertumbuhan	Perlu
	Angkutan (x59)	x			Frekuensi transportasi diperbaiki dengan layanan prima, dan jumlah sarana transportasi yang bertambah	Perlu

Kelembagaan Pengelolaan (10%)	Badan Peengelola KTM (X60)	x			Badan Pengelola KTM sudah berjalan dengan efektifitas rendah	Perlu
	Lembaga Pengelola (X61)		x		Kelembagaan tersedia, walaupun belum nampak kinerjanya secara nyata	Perlu
	Lembaga social, seni budaya, mental spiritual, wasdal (X62)	x			Kelembagaan social berjalan secara normative	Perlu

Dengan memperhatikan secara empirik indikator yang tersedia dalam penilaian pertumbuhan pusat kawasan, maupun pusat pertumbuhan di KTM Mesuji, dapat dipilahkan sebagai berikut:

Tabel.3.10. Indikator yang diperlukan untuk penilaian Kawasan Mesuji

Variabel Kawasan	Deskripsi indikator	Symbol	Indikator perlu/tidak saat ini
Komoditas unggulan sudah berkembang dengan skala usaha ekonomi kawasan	Penetapan komoditas unggulan disetarakan dengan produksi beras (X1)	X1	Perlu
	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat (X2)	X2	Perlu
	Memberikan kontribusi bagi PDRB pemerintah pada tingkat orde pemerintahan dimana komoditas tersebut berada (kecamatan / kabupaten) (X3)	X3	Perlu
	Kontinuitas komoditas unggulan ke pasar sasaran (X4)	X4	Perlu
Pengolahan Lahan	Produktifitas lahan usaha untuk komoditas unggulan (X5)	X5	Perlu
	Teknologi dan sarana produksi pengolahan lahan (X6)	X6	Perlu
Koperasi/Gapoktan	Keberadaan Koperasi / Gapoktan (X7)	X7	Perlu
	Aktifitas anggota' (X8)	X8	Perlu
Investor/Mitra Usaha	Jumlah Mitra usaha (X9)	X9	Perlu
Investor Non Pertanian	Bentuk Mitra (X10)	X10	Perlu

Lembaga Keuangan (Pegadaian/Bank)	Lembaga keuangan (X11)	X11	Perlu
	Terdapat lembaga pengelola pasar (X14)	X14	Perlu
	Frekuensi kegiatan pasar (X15)	X15	Perlu
Pusat Bisnis, Pertokoan	Jumlah pusat bisnis (X16)	X16	Perlu
	Frekuensi aktifitas bisnis (X17)	X17	perlu
Industri Pengolahan Hasil Panen	Jumlah industri pengolahan (X18)	X18	Perlu
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X19)	X19	Perlu
Jumlah Penduduk pada kawasan	Jumlah pada saat kajian dilaksanakan (X22)	X22	Perlu
Pendidikan	TK (X23)	X23	Perlu
	Aktifitas TK (X24)	X24	Perlu
	SD (X25)	X25	Perlu
	Aktifitas SD (X26)	X26	Perlu
	SMP (X27)	X27	Perlu
	Aktifitas SMP (X28)	X28	Perlu
\Kesehatan	Jumlah Pustu/polides (X31)	X31	perlu
	Penggunaan Pustu/Polides oleh Masyarakat (X32)	X32	perlu
	Jml Puskesmas (X33)	X33	perlu
	Penggunaan Puskesmas oleh Masyarakat (X34)	X34	perlu
Peribadatan	Jumlah Masjid Kecil (X37)	X37	perlu
	Penggunaan Masjid Kecil oleh Masyarakat (X38)	X38	Perlu
Terminal	Terminal Lokal (X43)	X43	Perlu
	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X44)	X44	Perlu
Sistem pusat-pusat	Sistem pusat (X53)	X53	Perlu
	Kegiatan di Pusat Kawasan (X54)	X54	Perlu
Keterhubungan antar kawasan	Kondisi jalan (X55)	X55	Perlu
Keterhubungan dalam kawasan	Akses jalan antar Kawasan (X56)	X56	Perlu

Sumber: Data Primer, 2012

Dari indikator yang diperlukan, dipilih berdasarkan pada asumsi tujuan pembangunan kawasan yang merupakan arah dan tujuan transmigrasi dalam konteks pembangunan daerah yaitu kapabilitas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pendekatan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, maupun pendekatan ekonomi. Indikator sebanyak 36 indikator dinyatakan signifikan dipergunakan saat ini untuk menjadi indikator dasar pengukuran pertumbuhan kawasan. Sedangkan untuk pusat pertumbuhan indikator yang disyaratkan minimal untuk pengukuran pusat pertumbuhan, disajikan pada tabel. 3.11.

Tabel.3.10. Indikator yang diperlukan untuk penilaian pusat pertumbuhan Mesuji

Variabel	Deskripsi indikator	Simbol	Indikator perlu/tidak saat ini
Jumlah penduduk	Jumlah penduduk di SKP – Pusat pertumbuhan (X1)	X1	Perlu
Ketersediaan komoditas diusahakan masyarakat petani	Penetapan komoditas unggulan disetarakan dengan produksi beras (X2)	X2	Perlu
	Memberikan kontribusi pendapatan masyarakat (X3)	X3	Perlu
Pendidikan	TK (X4)	X4	Perlu
	Aktifitas TK (X5)	X5	Perlu
	SD (X6)	X6	Perlu
	Aktifitas SD (X7)	X7	Perlu
	SMP (X8)	X8	Perlu
	Aktifita (X9)	X9	Perlu
Kesehatan	Jumlah Pustu (X14)	X14	Perlu
	Penggunaan Pustu oleh Masyarakat (X15)	X15	Perlu
Peribadatan	Jumlah Mesjid kecil (X20)	X20	perlu
	Penggunaan Mesjid kecil oleh Masyarakat (X21)	X21	Perlu

Terminal	Lokal (X26)	X26	Perlu
	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X27)	X27	Perlu
KUD/KUB/Gapoktan	Keberadaan KUD/KUB/Gapoktan (X34)	X34	Perlu
	Aktifitas anggota (X35)	X35	Perlu
Investor/Mitra Usaha	Jumlah Mitra usaha (X36)	X36	Perlu
Investor Non Pertanian	Bentuk mitra (X37)	X37	Perlu
Lembaga Keuangan (Pegadaian/Bank)	Lembaga keuangan (X38)	X38	Perlu
	Pemanfaatan lembaga (X39)	X39	
	Frekuensi kegiatan pasar (X41)	X41	Perlu
Industri Pengolahan Hasil Panen	Jumlah industri pengolahan (X44)	X44	Perlu
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X45)	X45	Perlu
Listrik	Diesel (X48)	X48	Perlu
	Penggunaan diesel oleh Masyarakat (X49)	X48	Perlu
Telekomunikasi	Seluler (X52)	X52	Perlu
Air Bersih	Kualitas setara MCK (X53)	X53	Perlu
Keterhubungan dalam kawasan	Akses dalam kawasan (X55)	X55	Perlu
	Perkerasan (X56)	X56	Perlu
	Angkutan (X57)	X57	Perlu
Keterhubungan antar kawasan	Akses dan kondisi (X58)	X58	Perlu
	Angkutan (x59)	X59	Perlu
Kelembagaan Pengelolaan	Badan Peengelola KTM (X60)	X60	Perlu
	Lembaga Pengelola (X61)	X61	Perlu
	Lembaga social, seni budaya, mental spiritual, wasdal (X62)	X62	Perlu

Sumber: Data Primer, 2012

Sedangkan untuk pusat pertumbuhan indikator yang disyaratkan minimal untuk pengukuran pusat pertumbuhan, disajikan pada tabel. 3.11. dari 62 indikator, maka yang diperlukan

pada saat dilaksanakan pengkajian sebesar 36 indikator, di mana dari 36 indikator dari pusat pertumbuhan maupun pusat kawasan, dikelompokkan menjadi tiga sebagaimana tabel. 3.12.

Tabel.3.12. Kategori penyebab keterlambatan pertumbuhan di kawasan maupun pusat pertumbuhan KTM Mesuji

Kategori	Indikator	Penyebab kelemahan
sarana dasar pengembangan kawasan	Power suply Air Bersih Jalan dan Transpotasi Keamanan	Kelemahan dari Badan Pengelola Lemahnya koordinasi dengan Pemda Ketidak jelasan tupoksi Pemda dalam pengembangan KTM saat ini, dengan demikian Pemda dan jajaran SKPD tidak mungkin bertanggung jawab untuk pengembangan
Sarana dasar pengembangan produksi	Komoditas Sarana pengolahan Teknologi Pasar dan Pemasaran Industri kecil	Pertumbuhan dan pembinaan masih di bawah kemenakertrans Lemahnya koordinasi dan sosialisasi badan pengelola yang dibentuk Kemenakertrans dengan Pemda dan jajarannya
Sarana dasar sosial	Pendidikan Kesehatan Keagamaan	Kelemahan dengan pengelolaan Sarana prasarana pusat pertumbuhan dan kawasan, terlebih menyangkut dengan retribusi, pajak, dan perijinan, semakin tidak terdapat koordinasi Indikator sebagai indikasi pertumbuhan tidak memperoleh empowering dari Pemda, satu sisi Kemenakertrans tidak akan mampu menangani semua indikator pertumbuhan maupun perkembangan kawasan KTM Mesuji

Sumber: data Primer,2012

3.6. Sintesis Kelemahan dari indikator pengukur Kawasan dan Pusat Pertumbuhan

Sebagai sintesis analisis indikator yang lemah di KTM Mesuji, berangkat dari undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan KTM secara umum, khususnya di KTM Mesuji. Mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 dan implementasi UU No. 29 tahun 2009, serta PP No. 214 tahun 2007, dalam melaksanakan perencanaan sampai pembentukan desain masterplan, mengikuti mekanisme dengan mengacu pada Perencanaan Tata Ruang

Daerah. Keselarasan yang dibentuk dan disusun dalam desain tersebut, mengalami kelemahan pada saat pelaksanaan, baik di sisi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana, maupun dukungan kelembagaan yang dipersiapkan menjadi pelaksana. Sehingga berdampak nyata dan signifikan KTM secara umum Generasi I sampai generasi IV. Secara klasifikasi pertumbuhan masuk pada layanan dasar sampai layanan sedang, artinya secara fisik KTM tersebut masih belum mampu mencukupi kebutuhan internal. Hal ini pada saat pengujian ataupun evaluasi dengan menggunakan indikator yang disiapkan sebagai instrumen ukur, di mana hanya sekitar 50% dari indikator yang *valid* serta *reliable* untuk dipergunakan, dari ke 36 indikator untuk pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan (lihat .tabel.3.12), terbagi dalam tiga kategori sarana dan prasarana fisik, sarana-prasarana ekonomi, dan sarana prasarana sosial. Ketidak berhasilan untuk mengakselerasi pada kondisi yang diharapkan tidak terlepas dari beberapa penyebab, yaitu:

Dimensi	Indikasi
Perencanaan	Perencanaan masih mengandalkan pada pusat UPT ataupun SKP, yang tidak akan berkembang sebelum T5, sehingga kondisi senantiasa di bawah basic service, atau layanan dasar
	Perencanaan yang riil semestinya menggunakan desa yang sudah maju (desa lama), memiliki akses pasar dan pemasaran yang direncanakan sebagai pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan (Prinsipnya, adalah REVITALISASI (mempercepat/mendorong perkembangan desa utama yang sudah ada menjadi pusat pertumbuhan).
	Aturan dari Menkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kekayaan negara, bahwa untuk pengalihan <i>asset</i> negara dari pusat ke daerah, harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu (ada IMB, ada sertifikat tanah, ada gambar detail, dsb, dsb). Kemenarketrans dalam menyusun detil KTM sama sekali tidak menyinggung serta melengkapi dengan dokumen dimaksud
Kelembagaan dan tata laksana	Masalah lain yang berpengaruh adalah, bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN (=milik pemerintah pusat).
	Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/ memanfaatkan fasilitas tersebut.
	Masalah lain yang berpengaruh adalah, bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN (=milik pemerintah pusat). Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/ memanfaatkan fasilitas tersebut.

Koordinasi sektoral	Dalam memfungsikan sarana prasarana KTM, harus dibentuk/ditetapkan organisasinya. sehingga akan jelas tupoksi dari instansi yang bertanggung jawab (untuk kawasan KTM siapa yang mengelola: pasar, mesjid, pusat bisnis, rumah pintar, <i>demfarm</i> , <i>boulevard</i> , tugu dan taman kota, fasilitas pendidikan, masalah retribusi (pasar, terminal, pelabuhan)
	.Idealnya, dikembalikan pada dinas2 yang terkait yang bertanggung jawab dibidangnya. dikoordinir oleh atau oleh Bupati.

3.7. Sintesis dasar pembagian dinamika kawasan dan pusat pertumbuhan

Pelaksanaan analisis indikator secara bauran), kualitatif, maupun kuantitatif, nampak diidentifikasi dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

1. Perubahan aspek, variabel yang konseptual menjadi operasional, di mana salah satu pendekatan yang diijinkan adalah penggunaan skala pengukuran. Skala pengukuran akan menurunkan perubahan indikator menjadi skala ordinal maupun skala interval. Dalam kajian ini perubahan variabel konseptual (*string*), diubah menjadi operasional (*numeric*) dilaksanakan dengan menggunakan skala Likert, dengan skor 1 sampai 5.
2. Penggunaan analisis strategi, di mana aspek dan variabel yang konseptual, dan sudah diubah menjadi operasional, diterapkan lebih lanjut pada analisis tersebut.
3. Penggunaan analisis deskriptif dan inferensial, dalam analisis instrumen, analisis relasional antara variabel yang membentuk indikator.
4. Penggunaan analisis bauran, yang diterapkan pada saat pengujian kebijakan, yang didekati dengan dasar analisis perundangan, implementasi perundangan, analisis indikator, dan nilai manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Kajian tersebut menjadi analisis kajian yang komprehensif, yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi, sederhana, realistik, dan *akuntabel* untuk diterapkan, dalam mendorong pusat pertumbuhan dan kawasan di KTM Mesuji. Hasil analisis kuantitatif untuk Pusat Kawasan dan Pusat pertumbuhan, diperoleh nilai klas pertumbuhan yang diukur dengan menggunakan indikator pengukur, selanjutnya diperoleh informasi *riel* untuk pusat kawasan sebesar 3,02 (setara dengan mandiri pertama), demikian pula untuk pusat pertumbuhan dalam ukuran 3,54 (setara dengan mandiri pertama).

Jika diperhatikan dari 62 indikator untuk pusat pertumbuhan dan 56 indikator pusat kawasan, pendekatan deskriptif kualitatif, mendeteksi dan menemukan indikator yang mampu berkembang dinamik sesuai dengan kebutuhan perkembangan (*need assesment* kawasan). Sintesis dari 62 indikator dan 56 indikator, menunjukkan adanya 4 kelompok penting yang harus ada pada setiap tahapan umur perkembangan, di mana secara umum terbagi sebagai berikut:

Tabel.3.13. Kebutuhan Untuk Kawasan /Pusat pertumbuhan dalam klas layanan sedang

Variabel	Indikator
sarana dasar pengembangan kawasan	Power suply Air Bersih Jalan dan Transpotasi Keamanan
Sarana dasar pengembangan produksi	Komoditas Sarana pengolahan Teknologi Pasar dan Pemasaran Industri kecil
Sarana dasar sosial	Pendidikan Kesehatan Keagamaan

Sumber: Tabel.3.12

Dengan memahami hasil analisis, dan sintesis kebutuhan untuk masyarakat secara komunitas maupun individual, dan secara holistik untuk mengarah pada pertumbuhan kota berbasis agrobisnis, maka dapat disusun suatu hipotesis deskriptif kaitan antara klas pertumbuhan kawasan maupun pusat pertumbuhan dengan sarana prasarana dibutuhkan untuk memenuhi layanan dasar masyarakat (*general of public services*), disajikan dalam tabel. 3.14. fokus pada pusat kawasan, dan tabel.3.15. pada pusat pertumbuhan.

Tabel.3.14. Klasifikasi Pusat Kawasan kaitannya dengan kebutuhan sarana prasarana

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Layanan Dasar Layanan sedang	0-5 tahun	Pengembangan Kawasan	Jalan poros/penghubung Power Supply Air Bersih Security (Pos Polisi) Kantor Pos Terminal
		Pengembangan Produksi	Komoditas unggulan Pasar regional/lokal Pengolahan produk Industri pengolahan
		Pengembangan sosial	Pendidikan SD Pendidikan SMP Pendidikan SMA RS tipe C Puskesmas

Sumber: Primer, 2012

Layanan Dasar maupun layanan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu layanan pada klasifikasi sedang untuk kawasan, merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada tingkat primer. Untuk kedua klasifikasi yang berbeda tetapi dimungkinkan pada umur pertumbuhan yang sama, maka dapat diasumsikan kebutuhan paling utama berdasarkan kajian empirik sebagaimana disajikan pada tabel 3.14. Klasifikasi

layanan meningkat dengan standar layanan mandiri, untuk layanan mandiri ini dibedakan menjadi dua yaitu mandiri pada tingkat pertama, artinya kemampuan kawasan untuk pemenuhan kebutuhan sudah mencukupi, tetapi masih tergantung pada akses kelancaran *demand supply* dari daerah lain, dengan demikian jika terjadi *stagnan* (bencana alam, tanah lonsor, banjir, dll) yang akan memutuskan akses antarkawasan, maka kawasan akan mengalami defisit dalam kebutuhan primernya. Klasifikasi mandiri penuh di mana kawasan tersebut mampu mencukupi segala kebutuhan baik primer, maupun sekunder, dan sedikit akses dari kawasan penyangga di sekitarnya. Indikator minimal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di kawasan yang memiliki klasifikasi layanan mandiri sebagaimana disajikan pada tabel.3.15.

Tabel.3.15. Klasifikasi Pusat Kawasan untuk layanan mandiri

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Layanan mandiri pertama	5-10 th	sarana prasarana	jalan poros/penghubung
mandiri penuh			Air Bersih
			Power supply/PLN
			Security
			Kantor pos
			terminal lokal
			terminal antar kawasan
			akses dan kondisi jalan
			telekom
		ekonomi	Komoditas unggulan
			Koperasi /Gapoktan
			Pengolahan produk
			Pasar lokal/regional
			Teknologi pengolahan
			Pengolahan lahan

			Mitra pertanian
			Mitra non pertanian
			Lembaga keuangan mikro
			Pertokoan/pusat bisnis
		sosial	Pendidikan SD
			Pendidikan SMP
			Rumah Sakit tipe C
			Puskesmas
			Tempat ibadah

Sumber: Primer, 2012

Perkembangan indikator dari klasifikasi layanan dasar menuju layanan mandiri, nampak pada semua variabel, baik pada variabel pengembangan fisik yang berupa sarana prasarana, variabel pengembangan ekonomi, dan pengembangan sosial. Perubahan yang cukup signifikan terjadi di sini, disebabkan pada klasifikasi mandiri, merupakan *starting point* kawasan meningkat pada kemampuan berdaya saing dengan kawasan lainnya. Kesiapan di semua aspek layanan publik (sosial, dan ekonomi, yang didukung oleh sarana prasarana) nampak jelas dipersiapkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya wilayah, maupun sumberdaya manusia, sebagai pelaku ekonomi di tingkat kawasan. Jika dilihat peningkatan pada klasifikasi kemampuan kawasan untuk berdaya saing, tidak cukup banyak perubahan, perubahan sebagai penambahan, terjadi pada variabel ekonomi dan sosial. Perkembangan kebutuhan indikator ekonomi nampak pada perlunya untuk penyiapan Perbankan, Pusat Bisnis Area, dan Industri pengolahan yang lebih tinggi, demikian pula untuk variabel sosial, indikator penting yang dipersiapkan adalah rumah sakit dengan tipe yang lebih tinggi, dan pendidikan pada tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Tabel. 3.16.. Klasifikasi Pusat Kawasan untuk layanan berdaya saing

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Daya saing	>10 tahun	sarana prasarana	jalan poros/penghubung
			Air Bersih
			Power supply/PLN
			Security
			Kantor pos
			terminal lokal
			terminal antar kawasan
			akses dan kondisi jalan
			Perkantoran
			Telekom
		ekonomi	Komoditas unggulan
			Koperasi /Gapoktan
			Pengolahan produk
			Industri pengolahan
			Pasar lokal/regional
			Teknologi pengolahan
			Pusat Bisnis Area
			Mitra pertanian
			Mitra non pertanian
			Perbankan
			Pertokoan/pusat bisnis
			Industri pengolahan hasil panen
		sosial	Pendidikan SD
			Pendidikan SMP
			Pendidikan SMA
			Perguruan Tinggi
			Rumah sakit tipe B
			Puskesmas
			Tempat ibadah

Sumber: Data Primer, 2012

Dalam pembangunan KTM terdapat dua sisi positif yang perlu dilihat dalam perkembangannya, yaitu pada sisi kawasan sebagai wadah besar yang secara nyata memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah pada orde III, dan pada tingkatan orde yang lebih rendah didukung oleh *buffer zone*, yang merupakan desa dan UPT, yang tergabung dalam pusat pertumbuhan. Dengan demikian pusat pertumbuhan merupakan embrio pembentukan kota orde III. Untuk mengetahui perkembangan pusat pertumbuhan indikator terukur serta *reliable* merupakan sarana instrumen yang perlu, dengan karakter yang sedikit berbeda dengan pusat kawasan, disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat orde yang lebih rendah. Pada tingkatan layanan dasar maupun layanan sedang, indikator hampir tidak ada perbedaannya, perbedaan nyata akan nampak pada saat klas layanan berubah meningkat menjadi layanan mandiri. Indikator perkembangan pada layanan dasar maupun layanan sedang, untuk pusat pertumbuhan disajikan pada tabel.3.17.

Tabel. 3.17. Klasifikasi Pusat Pertumbuhan untuk layanan dasar dan sedang

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
layanan dasar	0-5 th	kebutuhan	
Layanan sedang		sarana prasarana	Jalan poros/penghubung
			Jalan desa
			Air Bersih
			Angkutan barang/jasa
			Terminal
			Badan pengelola
		ekonomi	Komoditas unggulan
			Pasar lokal
			Pengolahan produk

			Koperasi
		Sosial	Pendidikan TK
			Pendidikan SD
			Polindes

Sumber: Data Primer, 2012

Perkembangan indikator dari klasifikasi layanan dasar menuju layanan mandiri, khususnya di pusat pertumbuhan, mulai terjadi perubahan yang significant, hal tersebut sejalan dengan permintaan pasar yang nyata- terjadi, sehingga nampak pada semua variabel, baik pada variabel pengembangan fisik yang berupa sarana prasarana, variabel pengembangan ekonomi, dan pengembangan sosial, mengalami perubahan positif dan linier. Perubahan yang cukup signifikan terjadi disebabkan pada klasifikasi mandiri, merupakan *starting point* pusat pertumbuhan meningkat pada kemampuan berdaya saing dengan pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Kesiapan di semua aspek layanan publik (sosial, dan ekonomi, yang didukung oleh sarana prasarana) nampak jelas dipersiapkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya wilayah, maupun sumberdaya manusia, sebagai pelaku ekonomi di tingkat pusat pertumbuhan. Indikator minimal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di pusat pertumbuhan yang memiliki klasifikasi layanan mandiri sebagaimana disajikan pada tabel.3.18.

Tabel. 3.18.. Klasifikasi Pusat Pertumbuhan untuk layanan mandiri

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Layanan mandiri pertama	5-10 th	sarana prasarana	jalan desa
mandiri penuh			jalan poros/penghubung
			Power supply/PLN
			terminal antar kawasan

			akses dan kondisi jalan
			kantor pos
			Kelembagaan pengelola
		ekonomi	komoditas unggulan
			koperasi/gapoktan
			pengolahan produk
			lembaga keuangan mikro
			mitra kerja pertanian
			pasar lokal
		sosial	Pendidikan SD
			Pendidikan SMP
			Puskesmas
			Tempat ibadah

Sumber: Data Primer, 2012

Kesiapan untuk pusat pertumbuhan memasuki era klasifikasi daya saing, diindikasikan dengan semakin lengkapnya indikator suatu kota kecil, artinya kebutuhan masyarakat dalam tingkatan untuk mampu melaksanakan produksi dan pengolahan serta kemampuan pemasaran dimiliki oleh komponen pusat pertumbuhan, sehingga orde III, hanya melaksanakan pengolahan lebih lanjut. Pengolahan produk pada tingkat awal, mampu dilaksanakan oleh petani atau komunitas kelompok tani (RMU, Pengolahan Sawit mini, Pengolahan karet atau *sheet*). Indikator yang berkembang antara lain di variabel ekonomi cenderung lebih, antara lain kemitraan dengan non pertanian, menunjukkan langkah diversifikasi hasil pertanian dalam bentuk *off farm* pertokoan atau pusat bisnis, sedangkan untuk variabel sosial yang paling penting adalah pendidikan SMA atau kejuruan sudah perlu diadakan di tingkat pusat pertumbuhan.

Tabel. 3.19. Klasifikasi Pusat Pertumbuhan untuk layanan berdaya saing

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Daya saing	>10 tahun	sarana prasarana	jalan desa
			jalan poros/penghubung
			Power supply/PLN
			terminal antar kawasan
			akses dan kondisi jalan
			kantor pos
			Kelembagaan pengelola
		ekonomi	Komoditas unggulan
			Koperasi /Gapoktan
			Pengolahan produk
			Pasar lokal
			Mitra pertanian
			Mitra non pertanian
			Lembaga keuangan mikro
			Pertokoan /pusat bisnis
		sosial	Pendidikan SD
			Pendidikan SMP
			Pendidikan SMA atau kejuruan
			Puskesmas
			Tempat ibadah

Sumber: Data Primer, 2012

3.8. Strategi Pengembangan KTM Mesuji secara umum

Filosofi dasar pembangunan KTM di Indonesia saat ini, sejalan dan *indepth* dalam konteks dasar hukum pembangunan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 yang di revisi menjadi UU No.9 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian pembangunan KTM secara umum dan khususnya di KTM Mesuji menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam anggaran

pembangunan APBN. Di dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada pilar dalam mencapai pembangunan masyarakat yang sejahtera, serta optimal untuk pembangunan masyarakat transmigran dan penduduk di sekitarnya. Ukuran keberhasilan dalam ukuran pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan KTM, menjadi indikasi bukti keberhasilan pemerintah dalam membawa masyarakatnya mencapai pertumbuhan menuju sejahtera.

Salah satu *entry point* untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan Kota Terpadu Mandiri Mesuji, yang menjadi ciri adalah transparan, partisipasi yang tinggi dari masyarakat, pemerintah daerah, dan investor. Memperhatikan pada klausul tersebut sebenarnya dapat diperoleh deskripsi dari kondisi saat ini, serta kondisi yang diharapkan, yang menjadi dasar mengubah kondisi menjadi lebih mapan, sebagaimana disajikan pada tabel.3.20. sebagai berikut.

Tabel.3.20. Kondisi Diharapkan dari kondisi yang ada saat ini dalam pelaksanan evaluasi pusat Pertumbuhan KTM Mesuji

Kondisi saat ini	Kondisi diharapkan	Permasalahan
Pelaksanaan Perundangan khususnya pada PP 214 tahun 2007, mengenai pembangunan KTM, yang saat ini mendasari pemikiran dan pembangunan KTM sebagai bentuk kepastian hukum masih banyak terjadi overlap dan tidak selaras. UU No. 34 tahun 2009	Keselarasan dengan Dasar UU 32 tahun 2004, maka PP 214 tahun 2007, diharapkan KTM menjadi fasilitator dan kontributor pembangunan daerah	Bentuk pembangunan KTM Mesuji walaupun pada dasarnya mengacu pada RTRD akan tetapi fokusnya masih pada ketransmigrasian, sehingga muncul pemahaman overlap bahkan cenderung memikirkan UPT
		Kota Terpadu Mandiri Mesuji, dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan. Strateginya, adalah dengan mendorong desa transmigrasi/UPT yang sudah menunjukkan peran sebagai desa utama (pusat SKP, memiliki basis ekonomi berdasarkan pada komoditas unggulan). Jadi desa yang dimaksud adalah yang pada posisi Basic Service (pemenuhan kebutuhan dasar = kriteria T5)

<p>PP.214 Tahun 2007, tidak mengatur secara detil mengenai kelembagaan, masa peralihan yang harus didukung oleh dokumen dokumen peralihan</p>	<p>Regulasi dan revitalisasi PP 214 tahun 2007, disesuaikan dengan peraturan pendukung yang diperlukan</p>	<p>Aturan dari Menkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kekayaan negara, bahwa untuk pengalihan asset negara dari pusat ke daerah, harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu (ada IMB, ada sertifikat tanah, ada gambar detail, dsb, dsb). Kemenakertrans dalam menyusun detil KTM Mesuji sama sekali tidak menyinggung serta melengkap dengan dokumen dimaksud</p>
<p>Bentuk Perencanaan</p>		
<p>Perencanaan sudah mengacu pada Tata Ruang Provinsi maupun Kabupaten, KTM dibangun pada UPT yang bersifat SSDP, ataupun pada kawasan yang disetarakan dengan kawasan transmigrasi, sehingga masih kosong dan tidak ada dukungan asses fisik dan sarana prasarana</p>	<p>Untuk mendorong pusat pertumbuhan pada tingkat orde III, ataupun orde di atasnya orde II dan orde I, tentunya keberangkatan program KTM merencanakan pada desa-desa yang sudah maju dan terdapat pengelola dari pihak pemda</p>	<p>Perencanaan masih mengandalkan pada pusat UPT ataupun SKP, yang tidak akan berkembang sebelum T5, sehingga kondisi senantiasa di bawah basic service</p>
		<p>Perencanaan yang riil adalah menggunakan desa yang sudah maju (desa lama), memiliki akses pasar dan pemasaran yang direncanakan sebagai pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan (Prinsipnya, adalah REVITALISASI (mempercepat/ mendorong perkembangan desa utama yang sudah ada menjadi pusat pertumbuhan).</p>
<p>Bentuk kelembagaan (pelaksanaan)</p>		
<p>Bentuk kelembagaan KTM bersifat internal, dibawah Dinas atau institusi Kemenakertrans, belum mengatur secara detil apabila akan dilaksanakn pengalihan pengelolaan, sehingga saat ini tidak pernah diakses langsung oleh pemda.</p>	<p>Bentuk kelembagaan serta organisasi tata Laksana, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, serta mengacu pada peraturan yang lebih tinggi</p>	<p>Masalah lain yang berpengaruh adalah, bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN (=milik pemerintah pusat).</p>
		<p>Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/ memanfaatkan fasilitas tersebut.</p>

		Masalah lain yang berpengaruh adalah, bahwa fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN (=milik pemerintah pusat). Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/ memanfaatkan fasilitas tersebut.
--	--	---

Sumber: data primer, 2012

Kelemahan menjadi permasalahan dalam meningkatkan indikator pusat pertumbuhan maupun pusat kawasan pada KTM Mesuji, sehingga diperlukan strategi pemecahan sekaligus program untuk melaksanakan regulasi dalam peningkatan dari indikator yang diukur. Di dalam strategi termuat unsur-unsur dasar untuk mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal, dalam bentuk kekuatan dan kelemahan dari institusi untuk mencapai sasaran, atau pun sebagai peluang dan persaingan sebagai ancaman. Untuk mendeteksi serta analisis pelaksanaan didekati dengan ALI dan ALE, yaitu Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal.

3.7.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Dalam analisis lingkungan internal diidentifikasi variabel atau pun faktor yang menjadi kekuatan maupun kelemahan, bersumber dari institusi pelaksana. Untuk itu identifikasi kekuatan yang dimiliki dari institusi maupun pelaku lainnya, disusun dalam matrik dan bobot, dimana bobot (*weighted factor*) ditetapkan secara empirik berdasarkan *profesional judgement*, sebagaimana disajikan pada tabel. 3.21.

Tabel 3.21 .Faktor internal

No	Faktor internal	Bobot	Rating	Score
I.	Kekuatan			
1	Pelaksanaan pembangunan Kota Terpadu Mandiri Mesuji didasarkan pada PP 214 tahun 2007 mengacu pada UU 32 tahun 2004 dengan revisinya No 9 tahun 2009	0.10	3	0.30
2	Penyelenggaraan institusi KTM Mesuji sebagai salah satu bentuk kontribusi pembangunan daerah	0, 10	4	0.40
3	Pemahaman dari Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Selatan mengenai kebutuhan pembangunan wilayah, dengan mengikutsertakan kawasan KTM sebagai <i>buffer zone</i> dan <i>growth centre</i> . Kota Terpadu Mandiri Mesuji, dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan	0, 10	4	0,40
4	Pelaksanaan pembangunan KTM Mesuji sebagai KTM generasi 1, dilengkapi dengan instrument evaluasi pengukuran pusat pertumbuhan KTM	0.10	4	0.40
	Sub total	0.40		1.50
I.	Kelemahan :			
	Perencanaan masih mengandalkan pada pusat UPT ataupun SKP yang tidak akan berkembang sebelum T5, sehingga kondisi senantiasa di bawah basic service	0,10	2	0.20
	Perencanaan yang riil adalah menggunakan desa yang sudah maju (desa lama), memiliki akses pasar dan pemasaran yang direncanakan sebagai pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan (Prinsipnya, adalah REVITALISASI (mempercepat/mendorong perkembangan desa utama yang sudah ada menjadi pusat pertumbuhan).	0.10	3	0.30
	Aturan dari Menkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kekayaan negara, bahwa untuk pengalihan asset negara dari pusat ke daerah, harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu (ada IMB, ada sertifikat tanah, ada gambar detail, dsb, dsb). Kemenarkertrans dalam menyusun detil KTM Mesuji sama sekali tidak menyinggung serta melengkapi dengan dokumen	0,15	3	0.45
	Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/memanfaatkan fasilitas tersebut.	0.10	2	0.20
	Dalam memfungsikan sarana prasarana KTM, harus dibentuk/ditetapkan organisasinya. sehingga akan jelas tupoksi dari instansi yang bertanggung jawab (untuk kawasan KTM siapa yang mengelola: pasar, mesjid, pusat bisnis, rumah pintar, <i>demfarm</i> , <i>boulevard</i> , tugu dan taman kota, fasilitas pendidikan, masalah retribusi (pasar, terminal, pelabuhan)	0.15	3	0.45
	Sub total	0.60		1.60

Keterangan:

Nilai rating diawali dari 1 dan paling tinggi 4

4 : sangat tinggi

3 : tinggi

2 : rata-rata

1 : di bawah rata-rata

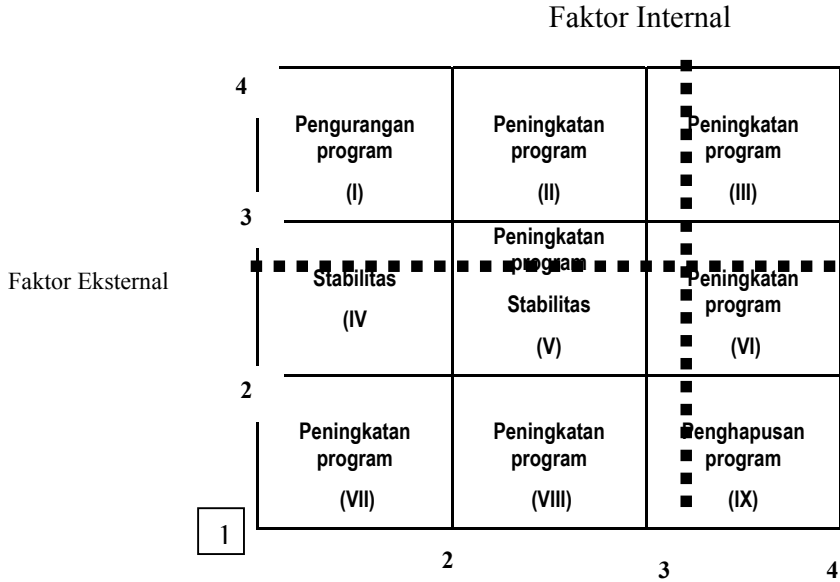
3.7.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Faktor eksternal berbeda dengan faktor internal, dimana eksternal berisikan kekuatan diluar institusi yang berpengaruh bagi sasaran pengembangan KTM Mesuji, terbagi menjadi peluang dan ancaman. Berdasarkan identifikasi lapangan, disajikan pada tabel 3.22.

Tabel 3.22. Faktor eksternal

No	Faktor eksternal	Bobot	Rating	Score
I.	Peluang			
1.	Konsistensi pemerintah dalam pembangunan daerah khususnya di provinsi Lampung	0,25	3	0,75
2	Komitmen Kemenakertrans untuk mengembangkan pembangunan kawasan dan daerah melalui pendekatan KTM, salah satu KTM Mesuji di Provinsi Lampung, yang diturunkan dalam PP No.214 tahun 2007	0,25	3	0,75
	Sub total	0.50		1,50
II.	Ancaman :			
1	Regulasi kebijakan pembangunan seringkali tidak sesuai dengan kesiapan daerah	0,25	3	0,75
2	Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/memanfaatkan fasilitas tersebut.	0,25	2	0,50
	Sub total	0.50		1,25

Langkah lanjut adalah mengenal posisi dan letak kedua faktor yang disajikan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Matriks Hubungan Faktor Internal – Eksternal

Dari perhitungan faktor internal dan eksternal diplotkan pada gambar 3.1. ditemukan pada posisi VI, yang diartikan Peningkatan program mengandalkan pada 2 hal pokok yakni: kekuatan (internal) dan peluang usaha (eksternal). Selanjutnya dengan menggunakan analisis keruangan yang memperlihatkan posisi berada pada:

- Kuadran I: memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada, strategi yang harus diterapkan adalah agresif.
- Kuadran II: meskipun menghadapi berbagai ancaman masih memiliki kekuatan dari segi internal, strategi yang harus diterapkan adalah strategi diversifikasi.
- Kuadran III: menghadapi peluang besar, dilain pihak menghadapi kelemahan internal, strategi yang harus

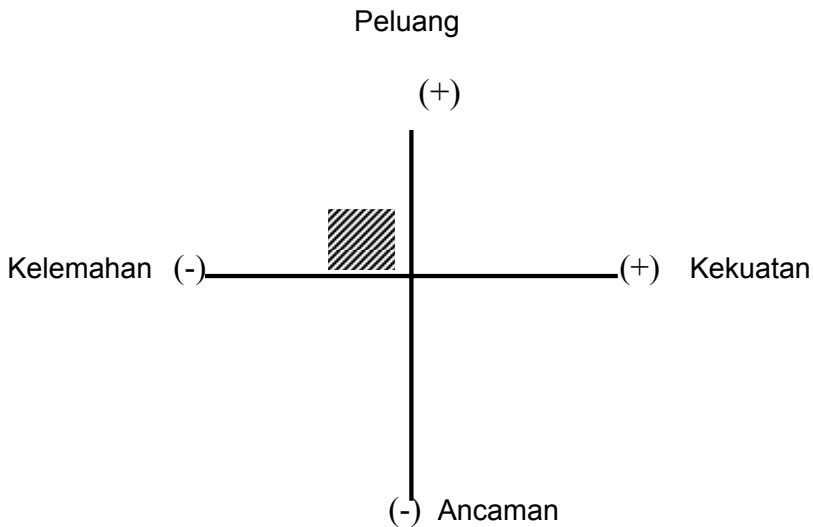
diterapkan adalah mengubah haluan (*turn around*).

Kuadran IV: kelemahan besar dan peluang sangat kecil, strategi diterapkan adalah defensif.

Dengan menggunakan analisis keruangan dihitung antara rumus:

1. Kekuatan – kelemahan = $1,50 - 1,60 = - 0,10$
2. Peluang – ancaman = $1,5 - 1,25 = 0,25$

antara kedua parameter diperoleh gambaran strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Analisis keruangan pembangunan pusat pertumbuhan KTM Mesuji

Nampak dari gambar 3.2, untuk mengembangkan KTM Mesuji termasuk dalam kategori diversifikasi, bahwa kawasan KTM dengan badan Pengelolanya, memiliki peluang untuk mengembangkan lebih maju Untuk merubah kondisi dan situasi perlu dilaksanakan strategi-strategi internal sebagai berikut.

1. Strategi Kekuatan –peluang (S-O)

Kekuatan	Peluang	S-O
Pelaksanaan pembangunan Kota Terpadu Mandiri Mesuji didasarkan pada PP 214 tahun mengacu pada UU 32 tahun 2004 dengan revisinya No 9 tahun 2009	Konsistensi pemerintah dalam pembangunan daerah khususnya di provinsi Lampung	Meningkatkan performance kinerja pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pembangunan daerah
Penyelenggaraan institusi KTM Mesuji sebagai salah satu bentuk kontribusi pembangunan daerah	Komitmen Kemenakertrans untuk mengembangkan pembangunan kawasan dan daerah melalui pendekatan KTM, salah satu KTM Mesuji di Provinsi Lampung. yang diturunkan dalam PP No.214 tahun 2007	Meningkatkan kinerja institusi Kemenakertrans untuk menumbuh kembangkan pembangunan daerah dengan pendekatan Kawasan KTM Mesuji, yang selanjutnya dipersiapkan menjadi growth centre dan growth pole
Pemahaman dari Pemerintah Daerah Provinsi Bahgka Selatan mengenai kebutuhan pembangunan wilayah, dengan mengikutsertakan kawasan KTM sebagai buffer zone dan growth centre. Kota Terpadu Mandiri Mesuji, dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan		Pemahaman secara holistic bagi seluruh SKPD di Provinsi Lampung untuk memasukkan KTM Mesuji menjadi salah satu zone pengembangan agribisnis yang cukup potensial di 5 tahun mendatang (2010-2014) KTM Mesuji dikembangkan dalam kerangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan
Pelaksanaan pembangunan KTM Mesuji sebagai KTM generasi I, dilengkapi dengan instrument evaluasi pengukuran pusat pertumbuhan KTM		Meningkatkan akuntabilitas, transparasi, serta performance pusat pertumbuhan KTM Mesuji sebagai salah satu kontibutor pembangunan kawasan untuk Lampung

2. Strategi Kelemahan –peluang (W-O)

Kelemahan	Peluang	W-O
Perencanaan masih mengandalkan pada pusat UPT ataupun SKP yang tidak akan berkembang sebelum T5, sehingga kondisi senantiasa di bawah basic service	Konsistensi pemerintah dalam pembangunan daerah khususnya di provinsi Lampung	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan dengan UPT sebagai buffer zone dalam bentuk KTM Mesuji
Perencanaan yang riel adalah menggunakan desa yang sudah maju (desa lama), memiliki akses pasar dan pemasaran yang direncanakan sebagai pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan (Prinsipnya, adalah REVITALISASI (mempercepat/ mendorong perkembangan desa utama yang sudah ada menjadi pusat pertumbuhan).	Komitmen Kemenakertrans untuk mengembangkan pembangunan kawasan dan daerah melalui pendekatan KTM, salah satu KTM Mesuji di Provinsi Lampung. yang diturunkan dalam PP No.214 tahun 2007	Meningkatkan performance Kemenakertrans dalam membangun KTM khususnya KTM Mesuji sebagai agrocentre ataupun buufer zone pembangunan daerah di Provinsi Lampung .Pembangunan didasarkan pada revitalisasi desa yang sudah tumbuh

<p>Aturan dari Menkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kekayaan negara, bahwa untuk pengalihan <i>asset</i> negara dari pusat ke daerah, harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu (ada IMB, ada sertifikat tanah, ada gambar detail, dsb, dsb). Kemenarkertrans dalam menyusun detil KTM Mesuji sama sekali tidak menyinggung serta melengkapinya dengan dokumen</p>		<p>Peningkatan perencanaan dilengkapi dengan penataan dokumen persiapan penyerahan ke pihak pemda Provinsi Lampung</p>
<p>Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/memanfaatkan fasilitas tersebut.</p>		<p>Pelaksanaan pengelolaan KTM dalam masa pembinaan diatur dengan peraturan Gubernur, sebagai langkah antisipasi pembinaan setelah Penyerahan T+5</p>
<p>Dalam memfungsikan sarana prasarana KTM, harus dibentuk/ditetapkan organisasinya. sehingga akan jelas tupoksi dari instansi yang bertanggung jawab (untuk kawasan KTM siapa yang mengelola: pasar, mesjid, pusat bisnis, rumah pintar, <i>demfarm, boulevard</i>, tugu dan taman kota, fasilitas pendidikan, masalah retribusi (pasar, terminal, pelabuhan)</p>		<p>Pengembangan Organisasi pengelola KTM, dibentuk dengan koordinasi Pemerintah daerah dengan Kemenakertrans dalam pengelolaan sarana prasarana KTM, sehingga akan mampu dikelola oleh pihak dinas pada saat pengalihan pembinaan oleh pemerintah daerah</p>

3. Strategi Kekuatan –Ancaman (S-T)

Kekuatan	Ancaman	S-T
<p>Pelaksanaan pembangunan Kota Terpadu Mandiri Mesuji didasarkan pada PP 214 tahun mengacu pada UU 32 tahun 2004 dengan revisinya No 9 tahun 2009</p>	<p>Regulasi kebijakan pembangunan seringkali tidak sesuai dengan kesiapan daerah</p>	<p>Memperkecil frekuensi regulasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah</p>
<p>Penyelenggaraan institusi KTM Mesuji sebagai salah satu bentuk kontribusi pembangunan daerah</p>	<p>Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/memanfaatkan fasilitas tersebut.</p>	<p>Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelola KTM Mesuji, dan koordinasi dengan pemerintahdaerah untuk mendorong percepatan pertumbuhan kawasan KTM</p>

<p>Pemahaman dari Pemerintah Daerah Provinsi Bahgka Selatan mengenai kebutuhan pembangunan wilayah, dengan mengikutsertakan kawasan KTM sebagai buffer zone dan growth centre. Kota Terpadu Mandiri Mesuji, dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan</p>		<p>Memasukkan kawasan KTM dalam program pembangunan daerah dalam zone pertumbuhan dan zone penyangga</p>
<p>Pelaksanaan pembangunan KTM Mesuji sebagai KTM generasi I, dilengkapi dengan instrument evaluasi pengukuran pusat pertumbuhan KTM</p>		<p>Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta performance dari pusat pertumbuhan KTM Mesuji, melalui kinerja yang optimal</p>

3.9. Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan KTM Mesuji, merupakan pilihan strategis yang diharapkan oleh pemerintah daerah, yang akan dapat berjalan apabila penentu keberhasilan ini dapat dilaksanakan, dimana penentu keberhasilan, antara lain:

1. Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan KTM secara umum dan khususnya di KTM Mesuji, dibedakan kewenangan dan tanggung jawabnya antara Pemerintah pusat cq Kemenakertrans dengan Pemerintah daerah, dengan demikian pola dan bentuk tanggung jawab serta kewenangan dari awal pembangunan telah dapat berjalan baik. Di dalam pelaksanaan kebijakan didukung peraturan dalam bentuk peraturan daerah.
2. Kebijakan pembangunan KTM tidak semata-mata menggunakan kawasan Transmigrasi sebagai *entry point* pusat pertumbuhan, dengan pola pembangunan Transmigrasi yang dimulai dari awal, membutuhkan waktu lama untuk mencapai kategori layanan sedang. Sehingga kebijakan Pemerintah pusat dalam mendorong

- laju pertumbuhan KTM Mesuji khususnya, difokuskan pada revitalisasi desa yang sudah berkembang.
3. Didalam Grand desain KTM secara umum dan khususnya KTM Mesuji, seyogyanya mencantumkan dokumen tata administratif pengalihan asset dan barang sesuai ketentuan Menkeu melalui Ditjen Perbendaharaan Kekayaan negara, bahwa untuk pengalihan *asset* negara dari pusat ke daerah, harus memenuhi sejumlah kriteria tertentu (ada IMB, ada sertifikat tanah, ada gambar detail, dsb).
 4. Memiliki alat ukur atau instrumen yang dipergunakan untuk mengukur kinerja KTM khususnya untuk KTM Mesuji berupa pedoman evaluasi pusat pertumbuhan.

3.10. Sintesis Kelemahan dari indikator pengukur Kawasan dan Pusat Pertumbuhan

Sebagai sintesis analisis indikator yang lemah di KTM Mesuji, berangkat dari undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan KTM secara umum, khususnya di KTM Mesuji. Mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 dan implementasi UU No. 29 tahun 2009, serta PP No. 214 tahun 2007, dalam melaksanakan perencanaan sampai pembentukan desain *masterplan*, mengacu pada Perencanaan Tata Ruang Daerah.

Keselarasannya yang dibentuk dan disusun dalam desain tersebut, mengalami kelemahan pada saat pelaksanaan, baik di sisi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana, maupun dukungan kelembagaan yang dipersiapkan menjadi pelaksana. Sehingga berdampak nyata dan *significant* KTM secara umum Generasi I sampai generasi III, secara klasifikasi pertumbuhan masuk pada layanan dasar sampai layanan sedang. Artinya secara fisik KTM tersebut masih belum mampu mencukupi kebutuhan internal. Hal ini pada saat pengujian ataupun evaluasi dengan menggunakan indikator yang disiapkan sebagai instrumen ukur,

di mana hanya sekitar 50% dari indikator yang *valid* serta *reliable* untuk dipergunakan, dari ke 36 indikator untuk pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan, terbagi dalam tiga kategori sarana dan prasarana fisik, sarana-prasarana ekonomi, dan sarana prasarana sosial. Ketidak berhasilan untuk mengakselerasi pada kondisi yang diharapkan tidak terlepas dari beberapa penyebab, antara lain: perencanaan, kelembagaan dan koordinasi sektoral.

Perbaikan ke depan khususnya akselerasi pusat pertumbuhan KTM Mesuji, agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan, tentunya perlu memperbaiki kelemahan yang terjadi pada saat ini, dengan menggunakan suatu instrumen ukur yang disebut dengan pedoman evaluasi pusat pertumbuhan, di mana dalam instrumen tersebut dibedakan menjadi dua kategori yaitu indikator pengukuran pusat kawasan transmigrasi yang didukung oleh 56 indikator, dan indikator pusat pertumbuhan yang terdapat 62 indikator. Hasil pengujian instrumen ukur atas indikator yang diberlakukan, diperoleh validitas serta reliabilitas deskriptif rata-rata sebesar 50%, dengan memperhatikan banyaknya permasalahan berkaitan dengan indikator pusat pertumbuhan. Secara nyata tidak bisa dilepaskan dengan lingkungan administrasi dan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah, maka sintesis untuk indikator permasalahan disajikan pada tabel 3.23.

Tabel. 3.23. Kebijakan dan strategi Indikator pengembangan pusat pertumbuhan

Kondisi saat ini	Kondisi Diharapkan	Permasalahan	Kebijakan	Strategi
Bidang perundangan				
<p>Pelaksanaan Perundangan khususnya pada PP 214 tahun 2007, mengenai pembangunan KTM, yang saat ini mendasari pemikiran dan pembangunan KTM sebagai bentuk kepastian hukum masih banyak terjadi overlap dan tidak selaras. UU No. 34 tahun 2009</p>	<p>Keselarasn dengan Dasar UU 32 tahun 2004, maka PP 214 tahun 2007, diharapkan KTM menjadi fasilitator dan kontributor pembangunan daerah</p>	<p>Bentuk pembangunan KTM Mesuji walaupun pada dasarnya mengacu pada RTRD akan tetapi fokusnya masih ketransmigrasian, sehingga muncul pemahaman overlap bahkan cenderung memikirkan UPT</p> <p>b Kota Terpadu Mandiri Mesuji, dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan.</p>	<p>Regulasi pola pembangunan KTM Mesuji</p>	<p>Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan dengan UPT yang sudah berkembang sebagai buffer zone dalam bentuk KTM Mesuji</p>
Bentuk Perencanaan				
<p>Perencanaan sudah mengacu pada Tata Ruang Provinsi maupun Kabupaten, KTM dibangun pada UPT yang bersifat SSDP, ataupun pada kawasan yang disetarakan dengan kawasan transmigrasi, sehingga masih kosong dan tidak ada dukungan asses fisik dan sarana prasarana</p>	<p>Untuk mendorong pusat pertumbuhan pada tingkat orde III, ataupun orde di atasnya orde II dan orde I, tentunya keberangkatan program KTM merencanakan pada desa-desa yang sudah maju dan terdapat pengelola dari pihak pemda</p>	<p>a. Perencanaan masih mengandalkan pada pusat UPT ataupun SKP, yang tidak akan berkembang sebelum T5, sehingga kondisi senantiasa di bawah basic service</p> <p>b. Perencanan yang riel adalah menggunakan desa yang sudah maju (desa lama), memiliki akses pasar dan pemasaran yang direncanakan sebagai pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan (Prinsipnya, adalah REVITALISASI (mempercepat/ mendorong perkembangan desa utama yang sudah ada menjadi pusat pertumbuhan).</p>	<p>Peningkatan dan revitalisasi perencanaan KTM Mesuji</p>	<p>a. Menggunakan UPT yang sudah tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ataupun pusat kawasan</p> <p>b. Meningkatkan performance Kemenakertrans dalam membangun KTM khususnya KTM Mesuji sebagai agrocentre ataupun buufer zone pembangunan daerah di Provinsi Lampung .Pembangunan didasarkan pada revitalisasi desa yang sudah tumbuh</p>

Bentuk kelembagaan				
<p>Bentuk kelembagaan KTM bersifat internal, dibawah Dinas atau institusi Kemenakertrans, belum mengatur secara detil apabila akan dilaksanakn pengalihan pengelolaan, sehingga saat ini tidak pernah diakses langsung oleh pemda.</p>	<p>Bentuk kelembagaan serta organisasi tata Laksana, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, serta mengacu pada peraturan yang lebih tinggi</p>	<p>Masalah lain yang berpengaruh fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN (=milik pemerintah pusat). Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/ memanfaatkan fasilitas tersebut.</p>	<p>Pembentukan kelembagaan yang komprehensif dan melibatkan pemerintah daerah, dengan dukungan peaturan Gubernur</p>	<p>Pelaksanaan pengelolaan KTM dalam masa pembinaan diatur dengan peraturan Gubernur, sebagai langkah antisipasi pembinaan setelah Penyerahan T+5 Pengembangan Organisasi pengelola KTM, dibentuk dengan koordinasi Pemerintah daerah dengan Kemenakertrans dalam pengelolaan sarana prasarana KTM, sehingga akan mampu dikelola oleh pihak dinas pada saat pengalihan pembinaan oleh Pemdah</p>

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Hasil utama dari kajian evaluasi KTM Mesuji di Provinsi Lampung, dipengaruhi secara langsung oleh indikator, yang dipersiapkan sebagai langkah evaluasi guna mengenali kondisi serta situasi pertumbuhan di tingkat pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan, disusun menjadi beberapa kesimpulan:

1. Indikator pusat kawasan dan pusat pertumbuhan.
2. Efektifitas indikator pusat pertumbuhan dan pusat kawasan.
3. Indikator kerja pusat kawasan dan pusat pertumbuhan yang diperlukan saat ini.
4. Permasalahan indek pertumbuhan KTM dari sisi indikator pusat pertumbuhan.
5. Strategi dan kebijakan dalam mendorong Indikator pusat pertumbuhan.

Ke lima item tersebut, secara komprehensif menjawab jabaran dari tujuan penelitian, sebagai berikut:

Tujuan yang dijabarkan dalam Sasaran	Diindikasikan dalam
Mengidentifikasi potensi pusat pertumbuhan dan kawasan KTM Mesuji, dengan memperhatikan aspek dasar potensi suatu kota tumbuh, yaitu aspek pengembangan usaha, pembangunan Prasarana dan sarana, Kelembagaan, Struktur Ruang,	Potensi dan indikator pusat kawasan dan pusat pertumbuhan di KTM Mesuji

Menguji keabsahan indikator secara deskriptif dan maupun kuantitatif, dengan sasaran akhir adalah sub indikator significant untuk setiap kebutuhan dari hubungan pusat pertumbuhan dengan kawasan (berdasarkan gradasi kriteria pusat pertumbuhan) sehingga akan tercapai kriteria KTM Mesuji menuju mandiri penuh .	efektifitas indikator pusat pertumbuhan dan pusat kawasan KTM Mesuji Indikator kerja pusat kawasan dan pusat pertumbuhan yang diperlukan saat ini untuk KTM Mesuji Permasalahan indek pertumbuhan KTM dari sisi indikator pusat pertumbuhan Strategi dan kebijakan dalam mendorong Indikator pusat pertumbuhan
--	---

4.1.1. Indikator pusat kawasan dan pusat pertumbuhan

Indikator pusat pertumbuhan dimaksudkan sebagai variabel yang diukur dalam memperoleh kondisi dan situasi secara riil dari pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan di KTM Mesuji, secara empirik diperoleh relasi antara pusat kawasan, dan pusat pertumbuhan dengan variabel pendukungnya, sehingga jika dituliskan:

- a. Pusat Kawasan = f (variabel1, variabel 2,variabel 56)
- b. Pusat pertumbuhan = f (variabel1, variabel2, variabel 62)

Secara umum variabel yang diusulkan merupakan variabel pendukung pembangunan kawasan secara umum, meliputi variabel fisik, variabel sosial, variabel ekonomi, dan variabel budaya. Dengan kalsifikasi aspek, variabel dan indikator, maka dapat dilihat bahwa untuk pusat kawasan dibatasi oleh 56 indikator, sedangkan untuk pusat pertumbuhan dibatasi dengan 62 indikator, sebagai berikut:

a. *pusat kawasan didukung oleh 56 indikator berikut:*

Variabel Kawasan	Deskripsi indikator	Symbol
Komoditas unggulan sudah berkembang dengan skala usaha ekonomi kawasan	Penetapan komoditas unggulan disetarakan dengan produksi beras (X1)	X1
	Memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat (X2)	X2

	Memberikan kontribusi bagi PDRB pemerintah pada tingkat orde pemerintahan dimana komoditas tersebut berada (kecamatan /kabupaten) (X3)	X3
	Kontiuitas komoditas unggulan ke pasar sasaran (X4)	X4
Pengolahan Lahan	Produktifitas lahan usaha untuk komoditas unggulan (X5)	X5
	Teknologi dan sarana produksi pengolahan lahan (X6)	X6
Koperasi/Gapoktan	Keberadaan Koperasi / Gapoktan (X7)	X7
	Aktifitas anggota (X8)	X8
Investor/Mitra Usaha	Jumlah Mitra usaha (X9)	X9
Investor Non Pertanian	Bentuk Mitra (X10)	X10
Lembaga Keuangan (Pegadaian/Bank)	Lembaga keuangan (X11)	X11
		X12
		X13
	Terdapat lembaga pengelola pasar (X14)	X14
	Frekuensi kegiatan pasar (X15)	X15
Pusat Bisnis, Pertokoan	Jumlah pusat bisnis (X16)	X16
	Frekuensi aktifitas bisnis (X17)	X17
Industri Pengolahan Hasil Panen	Jumlah industri pengolahan (X18)	X18
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X19)	X19
Industri Olahan perlung lebih bernilai tinggi (6%)	Jumlah industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X20)	X20
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X21)	X21
Jumlah Penduduk pada kawasan	Jumlah pada saat kajian dilaksanakan (X22)	X22
Pendidikan	TK (X23)	X23
	Aktifitas TK (X24)	X24
	SD (X25)	X25
	Aktifitas SD (X26)	X26
	SMP (X27)	X27
	Aktifitas SMP (X28)	X28
	SMA (X29)	X29
	Aktifitas SMA (X30)	X30
Kesehatan	Jumlah Pustu/polides (X31)	X31
	Penggunaan Pustu/Polides oleh Masyarakatt (X32)	X32
	Jml Puskesmas (X33)	X33
	Penggunaan Puskesmas oleh Masyarakatt (X34)	X34
	Rumah sakit tipe C (X35)	X35
	Penggunaan RS oleh Masyarakatt (X36)	X36
Peribadatan	Jumlah Mesjid Kecil (X37)	X37
	Penggunaan Mesjid Kecil oleh Masyarakat (X38)	X38
	Jml Mesjid Besar (X39)	X39
	Penggunaan Mesjid Besar oleh Masyarakat (X40)	X40
	Islamic Centre (X41)	X41

	Penggunaan Islamic Center oleh Masyarakat (X42)	X42
Terminal	Terminal Lokal (X43)	X43
	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X44)	X44
	Antar Daerah (X45)	X45
	Penggunaan terminal oleh masyarakat (X46)	X46
Kantor polisi I (2%)	Pos polisi (X47)	X47
	Aktifitas pos/ pada masyarakat (X48)	X48
	Polsek (X49)	X49
	Aktifitas Polsek/Pelaperlunan pada masyarakat (X50)	X50
Jaringan irigasi (komoditas padi sawah) (2%)	Irigasi biasa (X51)	X51
	Irigasi teknis (X52)	X52
Sistem pusat-pusat	Sistem pusat (X53)	X53
	Kegiatan di Pusat Kawasan (X54)	X54
Keterhubungan antar kawasan	Kondisi jalan (X55)	X55
Keterhubungan dalam kawasan	Akses jalan antar Kawasan (X56)	X56

b. pusat pertumbuhan didukung oleh 62 indikator, sebagai berikut:

Variabel pusat pertumbuhan	Deskripsi indikator	
Jumlah penduduk (10%)	Jumlah penduduk di SKP – Pusat pertumbuhan (X1)	X1
Ketersediaan komoditas diusahakan masyarakat petani (5%)	Penetapan komoditas unggulan disetarakan dengan produksi beras (X2)	X2
	Memberikan kontribusi pendapatan masyarakat (X3)	X3
Pendidikan (7%)	TK (X4)	X4
	Aktifitas TK (X5)	X5
	SD (X6)	X6
	Aktifitas SD (X7)	X7
	SMP (X8)	X8
	Aktifita (X9)	X9
	SMA/SMK (X10)	X10
	Aktifitas SMA (X11)	X11
	Akademik/poli (X12)	X12
	Aktifitas (X13)	X13
Kesehatan (5%)	Jumlah Pustu (X14)	X14
	Penggunaan Pustu oleh Masyarakat (X15)	X15
	Jml Puskesmas (X16)	X16

	Penggunaan Puskesmas oleh Masyarakat (X17)	X17
	Rumah sakit tipe C (X18)	X18
	Penggunaan RS oleh Masyarakat (X19)	X19
Peribadatan (2%)	Jumlah Mesjid kecil (X20)	X20
	Penggunaan Mesjid kecil oleh Masyarakat (X21)	X21
	Jml Mesjid besar (X22)	X22
	Penggunaan Mesjid Besar oleh Masyarakat (X23)	X23
	Islamic Centre (X24)	X24
	Penggunaan oleh masyarakat (X25)	X25
Terminal (2%)	Lokal (X26)	X26
	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X27)	X27
	Antar Daerah (X28)	X28
	Pemanfaatan terminal oleh masyarakat (X29)	X29
Kantor polisi I (2%)	Pos polisi (X30)	X30
	Pelayanan untuk masyarakat (X31)	X31
	Polsek (X32)	X32
	Pelayanan masyarakat (X33)	X33
KUD/KUB/Gapoktan (3%)	Keberadaan KUD/KUB/Gapoktan (X34)	X34
	Aktifitas anggota (X35)	X35
Investor/Mitra Usaha (3%)	Jumlah Mitra usaha (X36)	X36
Investor Non Pertanian (2%)	Bentuk mitra (X37)	X37
Lembaga Keuangan (Pegadaian/Bank) (5%)	Lembaga keuangan (X38)	X38
	Pemanfaatan lembaga (X39)	X39
Terdapat Pasar: (harian, induk, grosir) (3%)	Jumlah pasar (X40)	X40
	Frekuensi kegiatan pasar (X41)	X41
Pusat Bisnis, Pertokoan (3%)	Jumlah pusat bisnis (X42)	X42
	Frekuensi aktifitas bisnis (X43)	X43
Industri Pengolahan Hasil Panen	Jumlah industri pengolahan (X44)	X44
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan (X45)	X45
Industri Olahan yang lebih bernilai tinggi (3%)	Jumlah industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X46)	X46
	Frekuensi aktifitas industri pengolahan bernilai tinggi (pengolahan orde II/lanjut) (X47)	X47
Listrik (6%)	Diesel (X48)	X48
	Penggunaan diesel oleh Masyarakat (X49)	X49
	Jml PLN (50)	X50

	Penggunaan PLN oleh Masyarakat (X51)	X51
Telekomunikasi (2%)	Seluler (X52)	X52
Air Bersih (4%)	Kualitas setara MCK (X53)	X53
Komposisi luas lahan terbangun (5%)	Luas lahan terbangun (X54)	X54
Keterhubungan dalam kawasan (10%)	Akses dalam kawasan (X55)	X55
	Perkerasan (X56)	X56
	Angkutan (X57)	X57
Keterhubungan antar kawasan (5%)	Akses dan kondisi (X58)	X58
	Angkutan (x59)	X59
Kelembagaan Pengelolaan (10%)	Badan Pengelola KTM (X60)	X60
	Lembaga Pengelola (X61)	X61
	Lembaga social, seni budaya, mental spiritual, wasdal (X62)	X62

4.1.2. Efektifitas indikator pusat pertumbuhan dan pusat kawasan

- a. Kondisi pusat kawasan dan pusat pertumbuhan diklasifikasi menjadi 5 klas dengan menggunakan interval yang disusun sebagai berikut:

Klas	Interval	Keterangan
I	1,0-1,90	Layanan Dasar
II	2,0-2,90	Layanan Sedang
III	3,0-3,90	Mandiri Pertama
IV	4,0-4,9	Mandiri Penuh
V	> 5,0	Daya Saing

maka KTM Mesuji pada saat ini pusat kawasan memiliki nilai **3,02** yang berarti masuk kriteria layanan mandiri pertama, sedangkan untuk pusat pertumbuhan memiliki nilai **3,54** termasuk dalam layanan mandiri pertama.

- b. Efektifitas indikator dinilai berdasarkan validitas serta reliabelitas instrumen yang mampu dipahami oleh informan,

untuk **pusat kawasan** efektifitas indikator yang dinyatakan baik sebesar 39,285%, sedangkan yang termasuk dalam kategori cukup sebesar 23,214%, dan yang lemah sebesar 37,501%. Sedangkan untuk pusat pertumbuhan efektifitas indikator yang dinyatakan baik sebesar 64,516%, sedangkan yang termasuk dalam kategori cukup sebesar 14,516%, dan yang lemah sebesar 20,968%.

Kelemahan tersebut masuk dalam beberapa kategori ekonomi dan sosial, yang diuraikan sebagai berikut:

1. sarana produksi, termasuk dalam hal ini adalah kualitas dan kuantitas teknologi terapan untuk usahatani produktif, masih bersifat standar.
2. Kualitas dari SDM yang rata-rata dalam ber usaha tani skala kecil, dan rumah tangga.
3. Kelembagaan pendukung untuk usahatani, antara lain koperasi dan kemitraan dengan investor belum tersedia dan difasilitasi oleh kelembagaan secara optimal.
4. Aktifitas pasar dan pemasaran produk komoditas yang belum memungkinkan secara rutin dilaksanakan di tingkat kawasan Transmigrasi KTM Mesuji, terkait dengan kontinuitas produk.
5. Industri pengolahan skala rumah tangga belum mampu berjalan dengan baik, belum dalam bentuk kelompok usaha, apabila terdapat industri rumah tangga berdimensi sangat kecil, dan bersifat temporal.
6. Industri pengolahan skala tinggi saat ini tidak memungkinkan di pusat kawasan, tetapi prasarana dan sarana tersedia di orde III (kecamatan).
7. Sarana dan Prasarana kesehatan yang tersedia masih belum diselenggarakan optimal baik oleh pelaku masyarakat

maupun paramediknya sendiri, dalam hal ini paramedis hadir 2 sampai 3 hari dalam satu minggu.

8. Sarana dan prasarana pendidikan, khususnya untuk TK, dan SD sudah tersedia, kelemahan daya APK, dan APS dari peserta didik untuk tingkatan tersebut masih rendah.
 9. Sarana dan prasarana transportasi untuk ke pusat kawasan KTM Mesuji cukup memadai, dan mencukupi untuk akses keluar masuknya produk.
 10. sarana dan prasarana peribadatan sangat mencukupi, dan dipergunakan untuk aktifitas kegiatan religius setiap waktu.
- c. Sedangkan efektifitas pusat pertumbuhan, sebesar 50% dari 62 indikator, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator yang dinyatakan baik sebesar 11,30%, sedangkan yang termasuk dalam kategori cukup sebesar 25,806%, dan yang lemah sebesar 62,894%. Kelemahan tersebut masuk dalam beberapa kategori ekonomi dan sosial, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana pendidikan dimulai di tingkat PAUD, sampai di tingkat SD dan SMP, semestinya sudah bisa disiapkan untuk pusat pertumbuhan KTM Mesuji, problem utamanya bagi PAUD, TK, ataupun SMP, terlalu rendah APK, APS, dan APM, hal ini diindikasikan dengan rendahnya peserta didik.
2. Sarana dan prasarana kesehatan, utamanya pustu belum secara optimal dilengkapi dengan paramedik yang setiap waktu tinggal di lokasi pusat pertumbuhan, demikian pula dengan kebutuhan obat-obatan terbatas.
3. Masih rendahnya pemahaman kesehatan dari masyarakat, atau diorong oleh kemauan masyarakat untuk mempergunakan sarana puskesmas pembantu di tingkat pusat pertumbuhan KTM Mesuji.

4. Prasarana dan sarana transportasi, diawali dari sub terminal, terminal, antar dan inter pusat pertumbuhan belum optimal, secara fisik maupun frekuensi penggunaan, dalam mendukung akses komoditas ke luar dan masuk pusat pertumbuhan KTM Mesuji.
5. Prasarana dan sarana untuk religiusitas, cukup memadai dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di pusat pertumbuhan.
6. Prasarana dan sarana keamanan secara umum berada di pusat kecamatan.
7. Koperasi nampak sudah cukup dibutuhkan untuk masyarakat di pusat pertumbuhan.
8. Aktifitas pasar dan pemasaran produk komoditas yang belum memungkinkan secara rutin dilaksanakan di tingkat pusat pertumbuhan KTM Mesuji, terkait dengan kontinuitas produk.
9. Industri pengolahan skala rumah tangga belum mampu berjalan dengan baik, belum dalam bentuk kelompok usaha, apabila terdapat industri rumah tangga ber dimensi sangat kecil, dan bersifat temporal.
10. Industri pengolahan skala tinggi saat ini tidak memungkinkan di pusat pertumbuhan tetapi prasarana dan sarana tersedia di orde III (kecamatan).
11. Sarana power supply dibutuhkan sebagai salah satu sarana produksi di pusat pertumbuhan KTM Mesuji, saat ini belum tersedia optimal.
12. Kebutuhan akan air bersih, sebagai sarana utama kehidupan masyarakat, kualitas maupun kuantitasnya sangat terbatas.
13. Badan Pengelola dan kelembagaan KTM belum bekerja secara optimal.

4.1.3. Indikator kerja pusat kawasan dan pusat pertumbuhan yang diperlukan

Dengan memperhatikan secara empirik indikator yang tersedia dalam penilaian pertumbuhan pusat kawasan, maupun pusat pertumbuhan di KTM Mesuji, dapat dipilahkan sebagai berikut:

Klasifikasi Pusat Kawasan dalam klasifikasi layanan dasar / sedang

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Layanan Dasar Layanan sedang	0-5 tahun	Pengembangan Kawasan	Jalan poros/penghubung Power Supply Air Bersih Security (Pos Polisi) Kantor Pos Terminal
		Pengembangan Produksi	Komoditas unggulan Pasar regional/lokal Pengolahan produk Industri pengolahan
		Pengembangan sosial	Pendidikan SD Pendidikan SMP Pendidikan SMA RS tipe C Puskesmas

Sumber: Primer, 2012

Klasifikasi Pusat Kawasan untuk layanan mandiri

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Layanan mandiri pertama	5-10 th	sarana prasarana	jalan poros/penghubung
mandiri penuh			Air Bersih
			Power supply/PLN
			Security
			Kantor pos
			terminal lokal
			terminal antar kawasan
			akses dan kondisi jalan

			telekom
		ekonomi	Komoditas unggulan
			Koperasi /Gapoktan
			Pengolahan produk
			Pasar lokal/regional
			Teknologi pengolahan
			Pengolahan lahan
			Mitra pertanian
			Mitra non pertanian
			Lembaga keuangan mikro
			Pertokoan/pusat bisnis
		sosial	Pendidikan SD
			Pendidikan SMP
			Rumah Sakit tipe C
			Puskesmas
			Tempat ibadah

Sumber: Primer, 2012

Klasifikasi Pusat Kawasan untuk layanan berdaya saing

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Daya saing	>10 tahun	sarana prasarana	jalan poros/penghubung
			Air Bersih
			Power supply/PLN
			Security
			Kantor pos
			terminal lokal
			terminal antar kawasan
			akses dan kondisi jalan
			Perkantoran
			Telekom

		ekonomi	Komoditas unggulan
			Koperasi /Gapoktan
			Pengolahan produk
			Industri pengolahan
			Pasar lokal/regional
			Teknologi pengolahan
			Pusat Bisnis Area
			Mitra pertanian
			Mitra non pertanian
			Perbankan
			Pertokoan/pusat bisnis
			Industri pengolahan hasil panen
		sosial	Pendidikan SD
			Pendidikan SMP
			Pendidikan SMA
			Perguruan Tinggi
			Rumah sakit tipe B
			Puskesmas
			Tempat ibadah

Klasifikasi Pusat Pertumbuhan untuk layanan dasar dan sedang

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
layanan dasar	0-5 th	kebutuhan	
Layanan sedang		sarana prasarana	Jalan poros/penghubung
			Jalan desa
			Air Bersih
			Angkutan barang/jasa
			Terminal
			Badan pengelola
		ekonomi	Komoditas unggulan
			Pasar lokal
			Pengolahan produk

			Koperasi
		Sosial	Pendidikan TK
			Pendidikan SD
			Polindes

Klasifikasi Pusat Pertumbuhan untuk layanan mandiri

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Layanan mandiri pertama	5-10 th	sarana prasarana	jalan desa
mandiri penuh			jalan poros/penghubung
			Power supply/PLN
			terminal antar kawasan
			akses dan kondisi jalan
			kantor pos
			Kelembagaan pengelola
		ekonomi	komoditas unggulan
			koperasi/gapoktan
			pengolahan produk
			lembaga keuangan mikro
			mitra kerja pertanian
			pasar lokal
		sosial	Pendidikan SD
			Pendidikan SMP
			Puskesmas
			Tempat ibadah

Klasifikasi Pusat Pertumbuhan untuk layanan berdaya saing

Klasifikasi	Umur kawasan	Variabel dibutuhkan	Indikator dibutuhkan
Daya saing	>10 tahun	sarana prasarana	jalan desa
			jalan poros/penghubung
			Power supply/PLN
			terminal antar kawasan
			akses dan kondisi jalan

			kantor pos
			Kelembagaan pengelola
		ekonomi	Komoditas unggulan
			Koperasi /Gapoktan
			Pengolahan produk
			Pasar lokal
			Mitra pertanian
			Mitra non pertanian
			Lembaga keuangan mikro
			Pertokoan /pusat bisnis
		sosial	Pendidikan SD
			Pendidikan SMP
			Pendidikan SMA atau kejuruan
			Puskesmas
			Tempat ibadah

4.1.4. Permasalahan indek pertumbuhan KTM dari sisi indikator pusat pertumbuhan

Permasalahan secara umum dari tidak optimalnya indikator dijawab oleh informan, merupakan salah satu ciri dari instrumen, akan tetapi lebih jauh dapat dinyatakan bahwa yang menjadi permasalahan dari keseluruhan indikator, dikelompokkan menjadi 3 kategori, sebagai berikut:

Kategori	Indikator	Penyebab kelemahan
sarana dasar pengembangan kawasan	Power suply Air Bersih Jalan dan Transpotasi Keamanan	Kelemahan dari Badan Pengelola Lemahnya koordinasi dengan Pemda Ketidak jelasan tupoksi Pemda dalam pengembangan KTM saat ini, dengan demikian Pemda dan jajaran SKPD tidak mungkin bertanggung jawab untuk pengembangan
Sarana dasar pengembangan produksi	Komoditas Sarana pengolahan Teknologi Pasar dan Pemasaran Industri kecil	Pertumbuhan dan pembinaan masih di bawah kemenakertrans Lemahnya koordinasi dan sosialisasi badan pengelola yang dibentuk Kemenakertrans dengan Pemda dan jajarannya
Sarana dasar sosial	Pendidikan Kesehatan Keagamaan	Kelemahan dengan pengelolaan Sarana prasarana pusat pertumbuhan dan kawasan, terlebih menyangkut dengan retribusi, pajak, dan perijinan, semakin tidak terdapat koordinasi Indikator sebagai indikasi pertumbuhan tidak memperoleh empowering dari Pemda, satu sisi Kemenakertrans tidak akan mampu menangani semua indikator pertumbuhan maupun perkembangan kawasan KTM Mesuji

4.1.5. Strategi dan kebijakan dalam mendorong Indikator pusat pertumbuhan

Perbaikan ke depan khususnya akselerasi pusat pertumbuhan KTM Mesuji, agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan. Secara nyata tidak bisa dilepaskan dengan lingkungan administrasi dan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.

Kebijakan dan strategi Indikator pengembangan pusat pertumbuhan

Kondisi saat ini	Kondisi Diharapkan	Permasalahan	Kebijakan	Strategi
Bidang perundangan				
<p>Pelaksanaan Perundangan khususnya pada PP 214 tahun 2007, mengenai pembangunan KTM, yang saat ini mendasari pemikiran dan pembangunan KTM sebagai bentuk kepastian hukum masih banyak terjadi overlap dan tidak selaras. UU No. 34 tahun 2009</p>	<p>Keselarasan dengan Dasar UU 32 tahun 2004, maka PP 214 tahun 2007, diharapkan KTM menjadi fasilitator dan kontributor pembangunan daerah</p>	<p>Bentuk pembangunan KTM Mesuji walaupun pada dasarnya mengacu pada RTRD akan tetapi fokusnya masih ketransmigrasian, sehingga muncul pemahaman overlap bahkan cenderung memikirkan UPT</p> <p>b Kota Terpadu Mandiri Mesuji, dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan.</p>	<p>Regulasi pola pembangunan KTM Mesuji</p>	<p>Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan dengan UPT yang sudah berkembang sebagai buffer zone dalam bentuk KTM Mesuji</p>
Bentuk Perencanaan				
<p>Perencanaan sudah mengacu pada Tata Ruang Provinsi maupun Kabupaten, KTM dibangun pada UPT yang bersifat SSDP, ataupun pada kawasan yang disetarakan dengan kawasan transmigrasi, sehingga masih kosong dan tidak ada dukungan asses fisik dan sarana prasarana</p>	<p>Untuk mendorong pusat pertumbuhan pada tingkat orde III, ataupun orde di atasnya orde II dan orde I, tentunya keberangkatan program KTM merencanakan pada desa-desa yang sudah maju dan terdapat pengelola dari pihak pemda</p>	<p>a. Perencanaan masih mengandalkan pada pusat UPT ataupun SKP, yang tidak akan berkembang sebelum T5, sehingga kondisi senantiasa di bawah basic service</p> <p>b. Perencanaan yang riil adalah menggunakan desa yang sudah maju (desa lama), memiliki akses pasar dan pemasaran yang direncanakan sebagai pusat kawasan maupun pusat pertumbuhan (Prinsipnya, adalah REVITALISASI (mempercepat/ mendorong perkembangan desa utama yang sudah ada menjadi pusat pertumbuhan).</p>	<p>Peningkatan dan revitalisasi perencanaan KTM Mesuji</p>	<p>a. Menggunakan UPT yang sudah tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ataupun pusat kawasan</p> <p>b. Meningkatkan performance Kemenakertrans dalam membangun KTM khususnya KTM Mesuji sebagai agrocentre ataupun buuffer zone pembangunan daerah di Provinsi Lampung .Pembangunan didasarkan pada revitalisasi desa yang sudah tumbuh</p>

Bentuk kelembagaan				
Bentuk kelembagaan KTM bersifat internal, dibawah Dinas atau institusi Kemenakertrans, belum mengatur secara detil apabila akan dilaksanakn pengalihan pengelolaan, sehingga saat ini tidak pernah diakses langsung oleh pemda.	Bentuk kelembagaan serta organisasi tata Laksana, disesuaikan dengan kondisi dan situasi, serta mengacu pada peraturan yang lebih tinggi	Masalah lain yang berpengaruh fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun di lokasi KTM didanai oleh APBN (=milik pemerintah pusat). Sejauh fasilitas2 KTM belum diserahkan pengelolaannya dari Pusat kepada Pemda, maka pihak daerah (dinas, camat, bupati) tidak berani memfungsikan/ memanfaatkan fasilitas tersebut.	Pembentukan kelembagaan yang komprehensif dan melibatkan pemerintah daerah, dengan dukungan peaturan Gubernur	Pelaksanaan pengelolaan KTM dalam masa pembinaan diatur dengan peraturan Gubernur, sebagai langkah antisipasi pembinaan setelah Penyerahan T+5 Pengembangan Organisasi pengelola KTM, dibentuk dengan koordinasi Pemerintah daerah dengan Kemenakertrans dalam pengelolaan sarana prasarana KTM, sehingga akan mampu dikelola oleh pihak dinas pada saat pengalihan pembinaan oleh pemerintah daerah

4.2. Rekomendasi:

Proyeksi usulan untuk peningkatan kemampuan pusat pertumbuhan dan pusat kawasan, program yang perlu dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (5-10 th) adalah:

Program usulan untuk pengembangan KTM Mesuji (5-10 tahun)

No.	Pokok-Pokok Kegiatan Pembinaan	TAHUN I			TAHUN II			Total Biaya
		Vol Input Pembinaan		Total Biaya	Vol Input Pembinaan		Harga/satuan	
		Standar	Non Standar		Standar	Non Standar		
1	Pengembangan sarana prasarana							
2	jalan poros/penghubung		2,0 km	Rp.15.000,000	Rp.30.000,000	2 km	Rp.15,000,000	Rp.30,000,000
3	Air Bersih	1 Paket		Rp.30.000,000	Rp.30.000,000	1 Paket	Rp. 20,000,000	Rp.20.000,000
3	Power supply/PLN		1 Paket	Rp.500.000,000	Rp.500.000,000			
4	Security		1 Paket	Rp.250.000,000	Rp.250.000,000			
5	Kantor pos		1 Paket	Rp.500.000,000	Rp.500.000,000	1 Paket	Rp.500,000,000	Rp.500.000,000
6	terminal lokal							
7	terminal antar kawasan		1 Paket	Rp.500.000,000	Rp.500.000,000	1 Paket	Rp.500,000,000	Rp.500.000,000
8	akses dan kondisi jalan		10 km	Rp.5000,000	Rp.50.000,000	5 km	Rp. 5000,000	Rp.25.000,000
9	telekom		1 paket	Rp.500.000,000	Rp.500.000,000	1 paket	Rp.500,000,000	Rp.500.000,000
	sub Jumlah . 1				Rp. 2.360.000,000			Rp. 1.575.000,000
II	Ekonomi							
	Komoditas unggulan	1 Paket		Rp.25.000,000	Rp.25.000,000	1 Paket	Rp. 25,000,000	Rp.25.000,000
	Koperasi /Gapoktan	1 Paket		Rp.25.000,000	Rp.25.000,000	1 Paket	Rp. 25,000,000	Rp.25.000,000
	Pengolahan produk	1 Paket		Rp.25.000,000	Rp.25.000,000	1 Paket	Rp. 25,000,000	Rp.25.000,000
	Pasar lokal/regional	1 Paket		Rp.500.000,000	Rp.500.000,000			
	Teknologi pengolahan	1 Paket		Rp.250.000,000	Rp.250.000,000	1 Paket	Rp.250,000,000	Rp.250.000,000
	Pengolahan lahan	1 Paket		Rp.250.000,000	Rp.250.000,000			
	Mitra pertanian	1 Paket pelatihan		Rp.50.000,000	Rp.50.000,000	1 Paket pelatihan	Rp.50,000,000	Rp.50,000,000
	Mitra non pertanian	1 Paket pelatihan		Rp.50.000,000	Rp.50.000,000			
	Lembaga keuangan mikro	1 Paket pelatihan		Rp.50.000,000	Rp.50.000,000			
	Pertokoan/pusat bisnis	1 Paket		Rp.500.000,000	Rp.500.000,000	1 Paket	Rp.500,000,000	Rp.500.000,000
	sub. Jumlah.2				Rp. 1225000000			Rp. 875000000

	Teknologi pengolahan	1 Paket	Rp.250.000.000	Rp.250.000.000	1 Paket pelatihan	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000
	Pengolahan lahan						
	Mitra pertanian	1 Paket pelatihan	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000	1 Paket pelatihan	Rp.50.000.000	Rp.50.000.000
	Mitra non pertanian						
	Lembaga keuangan mikro	1 Paket	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000	1 Paket	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000
	Pertokoan/pusat bisnis						
	sub. Jumlah.2			Rp.875.000.000			Rp.875.000.000
	Sosial						
	Pendidikan SD	1 Paket	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000	1 Paket	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000
	Pendidikan SMP	1 Paket	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000	1 Paket	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000
	Rumah Sakit tipe C	1 Paket	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000	1 Paket	Rp.500.000.000	Rp.500.000.000
	Puskesmas	1 Paket	Rp.100.000.000	Rp.100.000.000	1 Paket	Rp.100.000.000	Rp.100.000.000
	Tempat ibadah						
	sub Jumlah.3			1.600.000.000			1.600.000.000
	Jumlah 1+2+3			4.050.000.000			4.050.000.000

Lanjutan(2)

No.	Pokok-Pokok Kegiatan Pembinaan	TAHUN V				Total Biaya
		Vol Input Pembinaan		Harga/satuan		
		Standar	Non Standar			
1	Pengembangan sarana prasarana					
1	jalan poros/penghubung		2 km	Rp.15.000.000		Rp.30.000.000)
2	Air Bersih	1 Paket		Rp.20.000.000		Rp.20.000.000
3	Power supply/PLN					
4	Security					
5	Kantor pos		1 Paket	Rp.500.000.000		Rp.500.000.000
6	terminal lokal					

7	terminal antar kawasan			1 Paket	Rp.500,000,000	Rp.500,000,000
8	akses dan kondisi jalan			5 km	Rp. 5000,000	Rp.25,000,000
9	telekom			1 paket	Rp.500,000,000	Rp.500,000,000
	sub jumlah .1					Rp 1,575,000,000
II	Ekonomi					
	Komoditas unggulan		1 Paket		Rp. 25,000,000	Rp. 25,000,000
	Koperasi /Gapoktan		1 Paket		Rp. 25,000,000	Rp.25,000,000
	Pengolahan produk		1 Paket		Rp. 25,000,000	Rp.25,000,000
	Pasar lokal/regional					
	Teknologi pengolahan		1 Paket		Rp.250,000,000	Rp.250,000,000
	Pengolahan lahan					
	Mitra pertanian		1 Paket pelatihan		Rp.50,000,000	Rp.50,000,000
	Mitra non pertanian					
	Lembaga keuangan mikro		1 Paket		Rp.500,000,000	Rp.500,000,000
	Pertokoan/pusat bisnis					
	sub. Jumlah.2					Rp.875,000,000
III	Sosial					
	Pendidikan SD		1 Paket		Rp.500,000,000	Rp.500,000,000
	Pendidikan SMP		1 Paket		Rp.500,000,000	Rp.500,000,000
	Rumah Sakit tipe C		1 Paket		Rp.500,000,000	Rp.500,000,000
	Puskesmas		1 Paket		Rp.100,000,000	Rp.100,000,000
	Tempat ibadah					
	sub jumlah.3					1,600,000,000
	Jumlah 1+2+3					4,050,000,000

Total biaya selama 5 tahun: Rp. 21, 485,000,000 (dua puluh satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- Depatemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 2009. *Undang-Undang No.29 Tahun 2009, Tentang Ketransmigrasian*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 tentang Kawasan Perkotaan Baru*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010. *PP No.15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 412 Tahun 2007, *Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*, Biro Hukum Kemenakertrans, Jakarta.
- Ditjen P2MKT, 2010. *Asisten Teknis P2MKT*, Jakarta.
- Kemeteran Tenaga kerja dan Transmigrasi, 2008. *Peraturan Menteri Transmigrasi No. SK Men No 137/MEN/VI/2008, tentang pengembangan Mesuji menjadi KTM Mesuji*, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2009. *RTRW Kabupaten Mesuji Tahun 2009*, Mesuji, Lampung.
- Ditjen P2MKT, 2008. *Draft Pedoman Evaluasi KTM*, Jakarta.
- Ag. Subarsono, 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ananto, 2009. *Analisis Kebijakan Investasi Perdagangan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Freddy Rangkuti, 1977. *Analisis SWOT Teknik untuk Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

William Dunn, 2000. *Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan Gadjah Mada University Press, cetakan ke III, Yogyakarta.

Winardi, 1989. *Strategi Pemasaran*, Lembaga Penerbit Ekonomi UGM, Yogyakarta.

AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI LAMPUNG



Prof. Dr. Ir. Agus Djoko Santosa., SU adalah pengajar tetap di UPI YAI Jakarta, dan di beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Selain sebagai pengajar, juga peneliti dalam bidang Humaniora. Aktif menulis buku yang terkait dengan riset dan analisis kualitatif menggunakan Nvivo, dalam bidang riset Metodologi Kuantitatif dengan pendekatan SEM, dan Metodologi Kualitatif.




Dr. DWI SIHONO RAHARJO, SE., MM. Saat ini menjadi tenaga pengajar di Program Pascasarjana (S3) dan (S2), Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta dan di FEB Universitas Tarumanagara Jakarta. Aktif menulis buku dan jurnal serta menjadi konsultan di bidang manajemen dan keuangan.



Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telepon: 0274-884500, 081-227-10912
e-mail: amara_books@yahoo.com

 Amara Percetakan Penerbitan
(Penerbit Amara Books)  @Penerbitamara

ISBN : 978-602-356-341-8



9 786023 563418